



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

"Melayani Tanpa Pamrih, Mengawasi Tanpa Berpihak"

**LAPORAN
TAHUNAN
2013**

Kekuatan Pribadi Insan Ombudsman,
bukan dari kemampuannya
mengeluarkan kata-kata keras yang
menyakitkan tetapi dari kemampuannya
mengatur tutur kata lembut yang
menggugah kesadaran

Danang Girindrawardana



SEKAPUR SIRIH

Tiga belas tahun Ombudsman Republik Indonesia bekerjagunamewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tahun 2013 merupakan tahun kinerja bagi Ombudsman RI, sebuah momentum bagi seluruh *stakeholder* Ombudsman RI berupaya guna mewujudkan Ombudsman RI yang Bersih, Kredibel, dan Wibawa. Implementasi target tersebut internalisasi dalam diri Insan Ombudsman. Untuk membangun lembaga yang bersih dan berwibawa, nilai kredibilitas sangat menentukan. Kredibilitas dibangun dari kualitas lembaga dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa secara umum di bidang pelayanan publik dan penyelesaian laporan masyarakat secara khusus.

Kinerja Ombudsman RI harus mampu mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan laporan/pengaduan masyarakat secara perseorangan maupun peningkatan kualitas pelayanan secara komprehensif. Penanganan laporan/pengaduan perseorangan berupa pencatatan, klarifikasi, investigasi, monitoring, mediasi, rekomendasi, dan penutupan laporan/pengaduan. Sedangkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara komprehensif dilaksanakan kegiatan penilaian kepatuhan, supervisi, penegakan integritas, sosialisasi, dan kerja sama. Guna mendukung upaya tersebut diperlukan peningkatan profesionalitas personil, dukungan anggaran, dan dukungan manajerial lainnya.

Laporan ini merupakan gambaran secara umum, capaian Ombudsman RI pada tahun 2013 dan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya. Peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan waktu dan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan. Semoga kerja Ombudsman RI mampu meningkatkan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Danang Girindrawardana

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
EKSEKUTIF SUMMARY	viii
VISI DAN MISI OMBUDSMAN RI	x
PROFIL OMBUDSMAN RI	xi
Bagian Pertama Manajemen Penanganan Laporan	1
A. Penanganan Laporan.....	1
B. Investigasi, Monitoring, Mediasi, dan Ajudikasi	13
C. Putusan Penting	15
Bagian Kedua Upaya Pencegahan Maladministrasi	19
A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	19
B. Peningkatan Kesadaran Masyarakat.....	19
C. Kerja Sama	21
D. Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik.....	28
Bagian Ketiga Pengawasan Pelayanan Publik	38
A. Supervisi Pelayanan Publik	38
B. Investigasi Sistemik.....	42
Bagian Keempat Kegiatan di Forum Internasional	43
A. Forum <i>International Ombudsman Institute</i> (IOI <i>Anti Corruption Training</i> 2013).....	43
B. Konferensi Tahunan <i>Asian Ombudsman Association</i>	44
C. Seminar dan Workshop Internasional (oleh IOI dan AOA).....	44
D. Kerja Sama dengan <i>Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)</i>	45
E. Studi Banding Persiapan Ajudikasi Khusus kerja sama dengan <i>AusAid-Commonwealth Ombudsman</i>	45
F. Penandatanganan Kerja Sama dengan Ombudsman Belanda.....	46
Bagian Kelima Pengawasan Internal	47
A. Peningkatan Program Anti Korupsi	47
B. Zona Integritas	48
C. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi	50
D. Majelis Kehormatan Ombudsman RI	52
Bagian Keenam Dukungan Fasilitatif	53
A. Manajemen Sumber Daya Manusia	53

B. Keuangan	55
C. Manajemen Aset	56
Bagian Ketujuh Reformasi Birokrasi	57
A. Sasaran Reformasi Birokrasi	57
B. Capaian Reformasi Birokrasi	58
Bagian Kedelapan Penghargaan.....	60
PENUTUP	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Penyampaian	2
Tabel 2 Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor	3
Tabel 3 Laporan Masyarakat Berdasarkan Provinsi asal Pelapor	4
Tabel 4 Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor	6
Tabel 5 Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Instansi Terlapor	7
Tabel 6 Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi	9
Tabel 7 Tindak Lanjut Ombudsman Terhadap Laporan Masyarakat	11
Tabel 8 Tanggapan Terlapor Terhadap Tindak Lanjut Ombudsman	12
Tabel 9 Pemerintah Daerah yang Dilakukan Penelitian Kepatuhan	29
Tabel 10 Rekrutmen CPNS Tahun 2013	53
Tabel 11 Komposisi Pegawai Ombudsman RI	54
Tabel 12 Realisasi Anggaran	55
Tabel 13 Nilai Aset Ombudsman RI	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Laporan Masyarakat Berdasarkan Cara Penyampaian	2
Grafik 2 Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor	3
Grafik 3 Laporan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah Pelapor	5
Grafik 4 Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor	6
Grafik 5 Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Instansi Terlapor	8
Grafik 6 Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan	9
Grafik 7 Tindak Lanjut Ombudsman Terhadap Laporan Masyarakat	11
Grafik 8 Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Ombudsman	12
Grafik 9 Potret Kepatuhan Pemerintah Provinsi	30
Grafik 10 Potret Kepatuhan Pemerintah Kota/Kabupaten	30
Grafik 11 Penelitian Terhadap Kementerian	32
Grafik 12 Potret Hasil Pemantauan terhadap Kementerian	34
Grafik 13 Penelitian Terhadap Lembaga	36
Grafik 14 Komposisi Pegawai Ombudsman RI	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerja Sama dengan Kementerian Luar Negeri.....	21
Gambar 2 Kerja Sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	21
Gambar 3 Penandatanganan Nota Kesepahaman Ombudsman RI, Komisi Yudisial, dan LPSK.....	22
Gambar 4 Kerja Sama dengan KPK.....	23
Gambar 5 Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah.....	24
Gambar 6 Peran Serta Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Efisien	24
Gambar 7 Kerja Sama dengan AusAid dan Commonwealth Ombudsman Australia	25
Gambar 8 Kerja Sama dengan SAJI Project UNDP	26
Gambar 9 Aktif sebagai Peserta Pameran	27
Gambar 10 Forum International Ombudsman Institute (IOI Anti Corruption Training 2013)	43
Gambar 11 Konferensi Tahunan <i>Asian Ombudsman Association</i> di Teheran Iran.....	44
Gambar 12 Pengaduan Warga Korea	45
Gambar 13 Penandatanganan Kerja Sama dengan Ombudsman Belanda	46
Gambar 14 Penandatanganan Pakta Integritas	47
Gambar 15 Pencanaan Zona Integritas Provinsi Jawa Timur.....	48
Gambar 16 Penandatanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KKN di Lingkungan Kejaksaan RI	49
Gambar 17 Penandatanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KKN di Lingkungan Kepolisian RI	49
Gambar 18 Penandatanganan Zona Integritas Pemerintah Kota Manado	49
Gambar 19 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih, dan Melayani Provinsi Lampung	50
Gambar 20 Pembekalan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK).....	51
Gambar 21 Pagelaran Sastra Integritas Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi	51
Gambar 22 Penghargaan Ombudsman RI	60

EKSEKUTIF SUMMARY

Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI secara operasional bertugas mencegah maladministrasi, menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat, dan mengadakan pengawasan pelayanan publik. Tugas dan fungsi Ombudsman RI bertambah luas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Amanat untuk membentuk perwakilan (di Provinsi) telah diselesaikan pada akhir tahun 2013 dengan membentuk 32 (tiga puluh dua) Perwakilan. Pembentukan perwakilan tersebut dalam rangka mendekatkan dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan Ombudsman RI. Sedangkan dalam rangka mengenalkan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI dilaksanakan sosialisasi serentak di seluruh Perwakilan. Salah satu dampak pembentukan Perwakilan dan sosialisasi tersebut, laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik pada tahun 2013 meningkat 134% (tahun 2012 sebanyak 2209, sedangkan tahun 2013 sebanyak 5173).

Ombudsman RI selain bertugas menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat, juga melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dalam bentuk penilaian kepatuhan, supervisi, penegakan integritas, investigasi sistemik, dan lain-lain. Pada tahun 2013 Ombudsman melakukan penelitian untuk menilai kepatuhan Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Penilaian kepatuhan Pemerintah Daerah dilakukan terhadap 23 Pemerintah Provinsi dan 23 Pemerintah Kota/Kabupaten. Penilaian kepatuhan Kementerian dilakukan terhadap Unit Pelayanan Publik sampel di 18 Kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya unit pelayanan perizinan langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi khususnya penyelenggaraan perizinan di tingkat Kementerian yang berada di Jakarta. Penilaian kepatuhan terhadap Lembaga dilakukan terhadap 36 Lembaga Negara dan Pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah 10,5%; tingkat kepatuhan Kementerian 22,2% pada Juni 2013 dan 77,8% pada November 2013; dan tingkat kepatuhan Lembaga Negara dan Pemerintahan 27,8%. Perbaikan terhadap kepatuhan tidak sulit dan dapat dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama, jika didukung adanya komitmen pimpinan. Hal ini terjadi pada Kementerian, setelah dilakukan perbaikan dan diobservasi kembali, ternyata mengalami kemajuan yang luar biasa: Kementerian tidak ada yang memiliki kepatuhan rendah. Penilaian kepatuhan merupakan program jangka panjang dan berkelanjutan. Jangka panjang karena kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang rendah berpotensi mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan publik yaitu perilaku maladministrasi, korupsi, pungutan tidak resmi, pengabaian, ketidakpastian hukum, kesewenang-wenangan, dan lain-lain. Berkelanjutan karena tingkat kepatuhan merupakan salah satu tahapan penilaian kualitas pelayanan publik menuju penilaian berikutnya: efektivitas dan kualitas pelayanan; kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Supervisi pelayanan publik dilaksanakan pada 23 provinsi yaitu Provinsi yang telah dibentuk Perwakilan Ombudsman RI, terhadap unit pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor UPT Samsat, Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Pelayanan di Kantor Urusan Agama, Pelayanan di Kantor Pertanahan, Pelayanan Pelabuhan, Pelayanan di Kantor Imigrasi, dan Kantor Penerbitan SIM Kepolisian Resor. Gambaran umum hasil supervisi tersebut, disajikan dalam buku "*Ombudsman Undercover*". Penegakan integritas dilaksanakan di Perwakilan, sebagai upaya menjaga integritas dan kompetensi personil. Pemantauan dilakukan terhadap antara lain pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam rangka pencegahan korupsi, Ombudsman RI aktif dalam kegiatan penegakan integritas, dan pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi. Sebagai komitmen anti korupsi, Pimpinan Ombudsman RI (Anggota Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI) menandatangani Pakta Integritas. Dalam rangka pendidikan dan budaya anti korupsi dilaksanakan hasil kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melaksanakan pergelaran budaya "Sastra Integritas Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi" sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Ombudsman RI memahami bahwa mewujudkan pelayanan publik berkualitas memerlukan kerja sama dengan institusi lain: "bersama mengawal pelayanan publik". Untuk itu, pada tahun 2013 dilakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan beberapa pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri menghasilkan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan kepatuhan Pemerintah Daerah di 23 provinsi. Guna meningkatkan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan pelayanan publik prima, pada akhir tahun dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional dengan mengundang Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Sebagai bagian masyarakat Ombudsman dunia, Ombudsman RI aktif berpartisipasi dalam forum internasional baik bilateral maupun multilateral. Ombudsman RI aktif dalam konferensi *International Ombudsman Institute* (IOI), dan *Asian Ombudsman Association* (AOA). Ombudsman RI secara bilateral bermitra dengan *Commonwealth Ombudsman Australia*, *United Nation Development Program*, *Anti-Corruption and Civil Rights Commission*, *AusAid*, *USAID*, dan lain-lain.

Sebagai sebuah entitas organisasi, Ombudsman RI didukung manajerial efektif dan efisien. Ombudsman RI didukung sumber daya manusia 322 orang terdiri atas: Anggota Ombudsman RI (8), Kepala Perwakilan Ombudsman RI (29), Asisten (157), Pegawai Negeri Sipil (58), Staf Sekretariat (14), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (56). Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Ombudsman RI tahun 2013 Rp68.857.179.000,00 dengan realisasi Rp65.112.152.287,00 (94,56%). Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan Ombudsman RI untuk mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan inovasi pengawasan pelayanan publik.

VISI DAN MISI OMBUDSMAN RI

Visi

Visi Ombudsman RI adalah :

“Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yang Menyejahterakan dan Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Misi

Untuk mewujudkan visi, Ombudsman RI melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
2. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan.
4. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Wewenang

Ombudsman berwenang:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan.
3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor.
4. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan.
5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.
6. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
8. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.
9. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

PROFIL OMBUDSMAN RI

PROFIL PIMPINAN OMBUDSMAN RI



Danang Girindrawardana

Tempat & Tanggal Lahir :
Yogyakarta, 26 Januari 1969
Pendidikan :
S1 Komunikasi Massa FISIPOL UGM
Yogyakarta



Hj. Azlaini Agus, SH, MH

Tempat & Tanggal Lahir :
Tanjung Pinang, 19 Januari 1952
Pendidikan :
S2 Fakultas Hukum UII Yogyakarta
S1 Fakultas Hukum UIR Pekanbaru



Budi Santoso, SH, LL.M

Tempat & Tanggal Lahir :
Yogyakarta, 21 Juli 1964
Pendidikan :
S2 School of Law, Northwestern
University Chicago, USA
S1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta



Dr. Ibnu Tricahyo, SH, MH (Alm.)

Tempat & Tanggal Lahir :
Malang, 9 Agustus 1958
Pendidikan :
S3 Hukum Tata Negara Universitas
Brawijaya
S2 Hukum Tata Negara Universitas
Padjajaran
S1 Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya



Hendra Nurtjahyo, SH, MHum.

Tempat & Tanggal Lahir :
Padang, 19 Mei 1968
Pendidikan :
S2 Filsafat Universitas Indonesia
S1 Fakultas Hukum Universitas
Indonesia



Drs. Pranowo Dahlan, MM

Tempat & Tanggal Lahir :
Wonosobo, 22 Januari 1953
Pendidikan :
S2 Manajemen STIE Widya Jayakarta
S1 Ilmu Kepolisian PTIK
AKABRI



Drs. Petrus Beda Peduli

Tempat & Tanggal Lahir :
Flores, 17 Agustus 1950
Pendidikan :
S1 Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan
Kemasyarakatan, Jurusan Ilmu
Administrasi Negara (1975-1978)
Sarjana Muda, Akademi Administrasi
Niaga Negeri, Jurusan Perbankan
(1972-1975)



Muhammad Khoiril Anwar, SSos., MSI.

Tempat & Tanggal Lahir :
Surabaya, 6 Januari 1969
Pendidikan :
S2 Program Pasca Sarjana Universitas
Brawijaya Malang
S1 Administrasi Negara Universitas
Airlangga Surabaya



Kartini Istikomah, SE, MM

Tempat & Tanggal Lahir :
Kudus, 11 Oktober 1954
Pendidikan :
S2 Manajemen Pemasaran Jasa,
Universitas Budi Luhur Jakarta
S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pempa-
ngunan, Universitas Surabaya



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

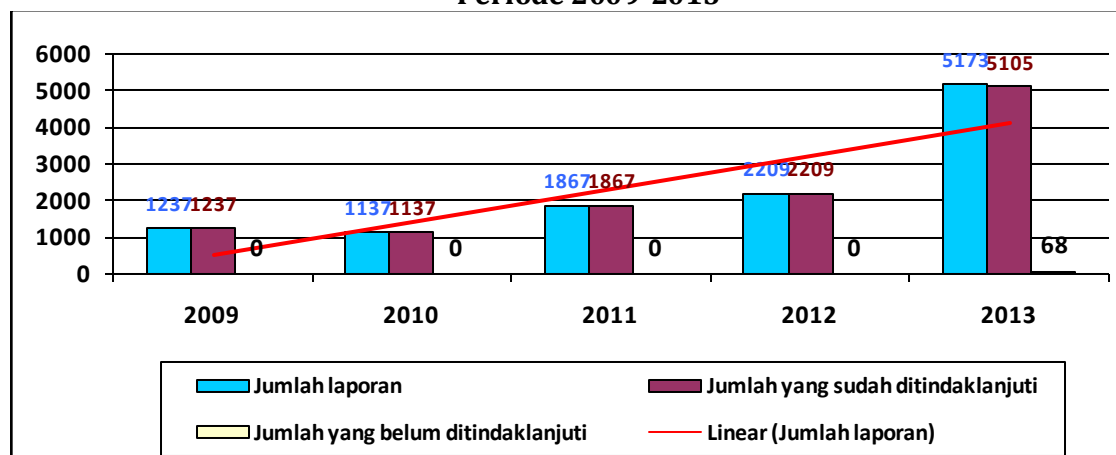
Bagian Pertama
Manajemen Penangan
an Laporan

A. Penanganan Laporan

Aspek pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan. Untuk itu, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu parameter keberhasilan birokrasi. Pelayanan yang berkualitas merupakan harapan masyarakat karena pelayanan merupakan hak yang harus diperolehnya. Kesadaran masyarakat terhadap hak untuk memperoleh pelayanan yang baik salah satunya diwujudkan dalam penyampaian akses ke Ombudsman RI baik ke pusat maupun Perwakilan di 32 Provinsi.

Sejak dibentuk tahun 2000, Ombudsman RI telah menerima lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) laporan masyarakat dan hampir menindaklanjuti seluruh laporan. Laporan yang belum ditindaklanjuti merupakan laporan masyarakat pada akhir tahun 2013 yang masih dalam proses. Gambaran jumlah laporan masyarakat (periode 2009-2013) ditunjukkan dengan garis kecenderungan yang makin meningkat pada grafik berikut:

Grafik 1
Laporan/Pengaduan Masyarakat
Periode 2009-2013

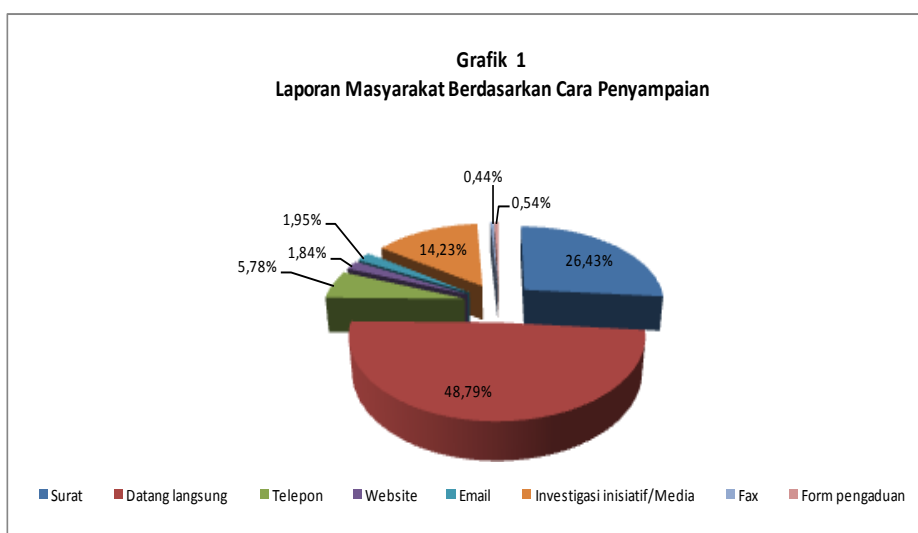


Ombudsman RI pada tahun 2013 telah menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 5173 laporan, yang disampaikan melalui berbagai cara yaitu datang langsung ke Ombudsman RI sebanyak 2524 laporan (48,79%), melalui surat sebanyak 1367 laporan (26,43%), melalui media sebanyak 736 laporan (14,23%), dan selebihnya melalui faksimili, website, email, telepon dan form pengaduan.

Secara rinci, laporan masyarakat dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1
Laporan Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Penyalpan

MEKANISME	JUMLAH	%
Surat	1367	26,43%
Datang Langsung	2524	48,79%
Telepon	299	5,78%
Website	95	1,84%
Email	101	1,95%
Investigasi Inisiatif/Media	736	14,23%
Faksimili	23	0,44%
Form Pengaduan	28	0,54%
JUMLAH	5173	100%



Dari jumlah laporan yang diterima, terdapat laporan/pengaduan masyarakat yang berasal dari publikasi media dan ditindaklanjuti Ombudsman RI sebagai laporan inisiatif dengan pertimbangan mempunyai dampak luas bagi masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Ombudsman RI secara bertahap mengembangkan infrastruktur Aplikasi Sistem Penyelesaian Laporan/Pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja baik di Pusat maupun di kantor Perwakilan di daerah.

Selain berdasarkan cara penyalpan, untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap laporan/pengaduan berikut disajikan klasifikasi berdasarkan Pelapor, Terlapor, asal daerah Pelapor, asal instansi Terlapor, dan jenis maladministrasi yang dilaporkan.

Klasifikasi laporan/pengaduan masyarakat secara rinci sebagai berikut:

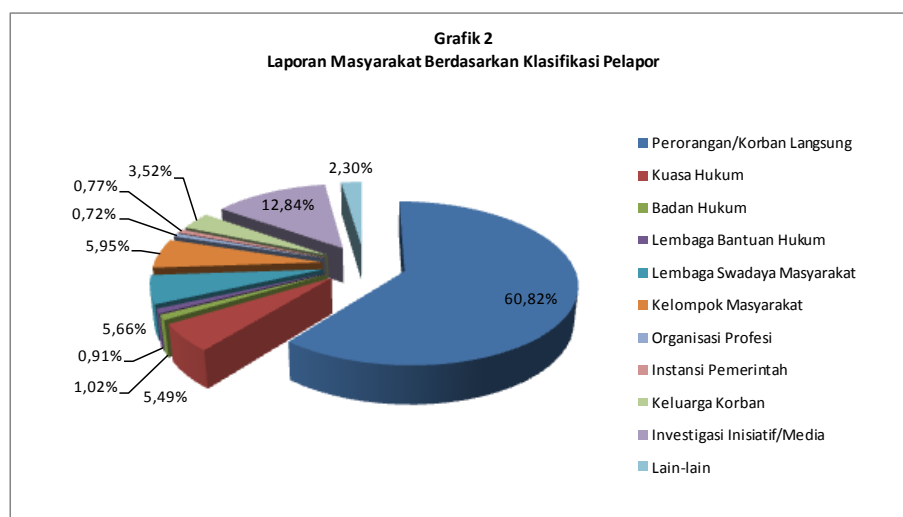
1. Pelapor

Berdasarkan data klasifikasi Pelapor menunjukkan bahwa masyarakat yang paling banyak melaporkan keluhan tentang dugaan maladministrasi relatif masih tetap sebagaimana laporan-laporan sebelumnya yaitu Perorangan/Korban langsung sebanyak 3146 laporan (60,82%). Kondisi ini mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak atas pelayanan yang baik dari penyelenggara pelayanan publik. Selain itu sebanyak 664 laporan (12,84%) berasal dari media. Selanjutnya laporan yang berasal dari Kelompok Masyarakat sebanyak 308 laporan (5,95%) dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 293 laporan (5,66%). Hal ini menunjukkan tingkat kepedulian kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak atas pelayanan publik yang berkualitas.

Data klasifikasi Pelapor dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 2
Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor

KLASIFIKASI PELAPOR	JUMLAH	%
Perorangan/Korban Langsung	3146	60,82%
Kuasa Hukum	284	5,49%
Badan Hukum	53	1,02%
Lembaga Bantuan Hukum	47	0,91%
Lembaga Swadaya Masyarakat	293	5,66%
Kelompok Masyarakat	308	5,95%
Organisasi Profesi	37	0,72%
Instansi Pemerintah	40	0,77%
Keluarga Korban	182	3,52%
Investigasi Inisiatif/Media	664	12,84%
Lain-lain	119	2,30%
Total	5173	100%



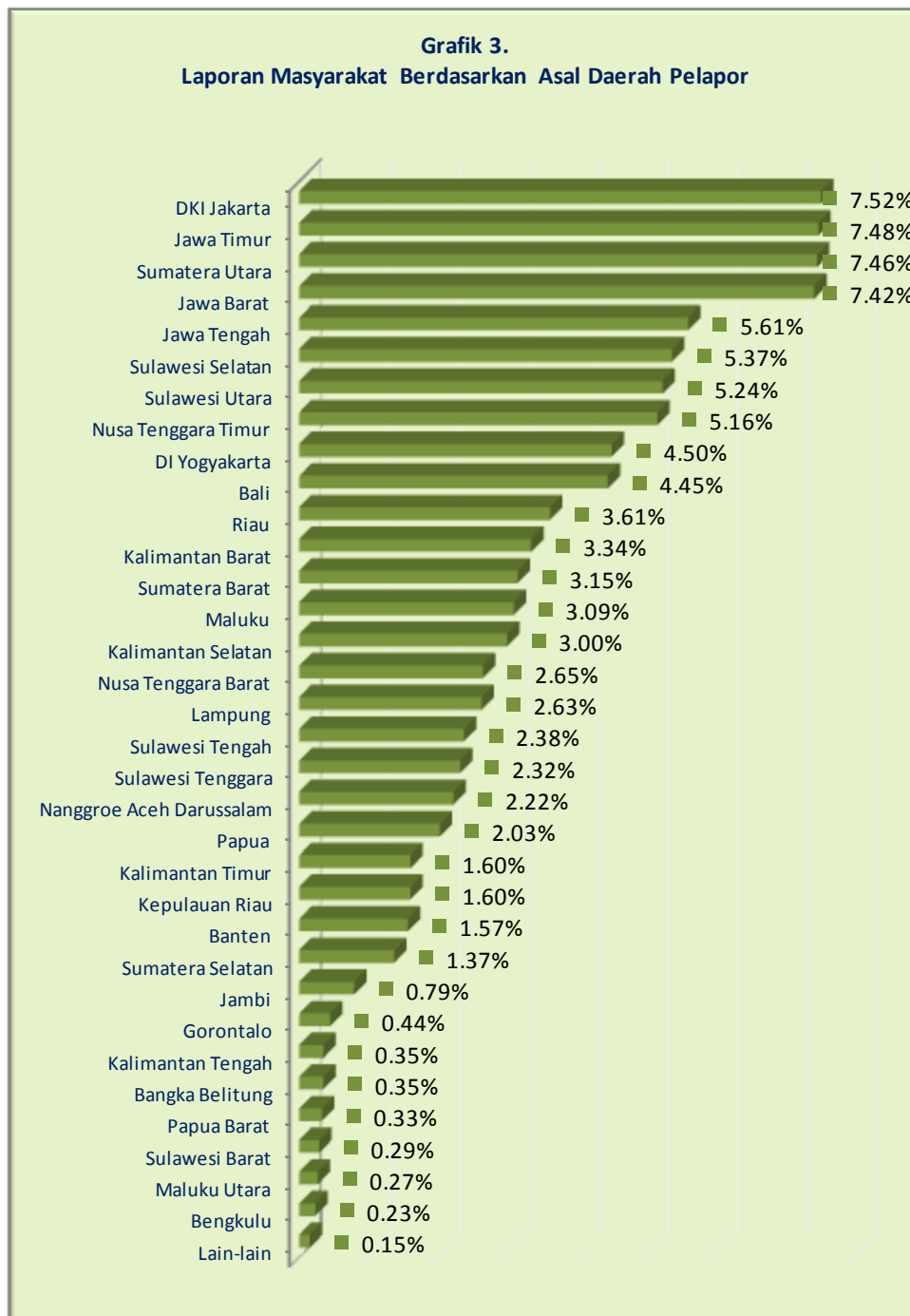
2. Provinsi Asal Pelapor

Berdasarkan data Provinsi asal Pelapor, yang termasuk dalam urutan 3 (tiga) terbanyak berasal dari DKI Jakarta 389 laporan (7,52%), Provinsi Jawa Timur 387 laporan (7,48%), dan Sumatera Utara 386 laporan (7,46%). Kondisi ini menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan yang dialami ketika mendapat pelayanan yang tidak semestinya dan kesadaran untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas. Selain tingkat kepedulian masyarakat, juga menunjukkan kualitas pelayanan yang harus mendapat perhatian untuk dilakukan upaya perbaikan dari segi sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, dan mekanisme atau prosedur pelayanannya.

Data berdasarkan klasifikasi Provinsi asal Pelapor dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 3
Laporan Masyarakat Berdasarkan Provinsi asal Pelapor

PROVINSI	JUMLAH	%	PROVINSI	JUMLAH	%
DKI Jakarta	389	7.52%	Sulawesi Tengah	123	2.38%
Jawa Timur	387	7.48%	Sulawesi Tenggara	120	2.32%
Sumatera Utara	386	7.46%	Nanggroe Aceh Darussalam	115	2.22%
Jawa Barat	384	7.42%	Papua	105	2.03%
Jawa Tengah	290	5.61%	Kepulauan Riau	83	1.60%
Sulawesi Selatan	278	5.37%	Kalimantan Timur	83	1.60%
Sulawesi Utara	271	5.24%	Banten	81	1.57%
Nusa Tenggara Timur	267	5.16%	Sumatera Selatan	71	1.37%
DI Yogyakarta	233	4.50%	Jambi	41	0.79%
Bali	230	4.45%	Gorontalo	23	0.44%
Riau	187	3.61%	Bangka Belitung	18	0.35%
Kalimantan Barat	173	3.34%	Kalimantan Tengah	18	0.35%
Sumatera Barat	163	3.15%	Papua Barat	17	0.33%
Maluku	160	3.09%	Sulawesi Barat	15	0.29%
Kalimantan Selatan	155	3.00%	Maluku Utara	14	0.27%
Nusa Tenggara Barat	137	2.65%	Bengkulu	12	0.23%
Lampung	136	2.63%	Lain-lain	8	0.15%
			JUMLAH	5173	100%



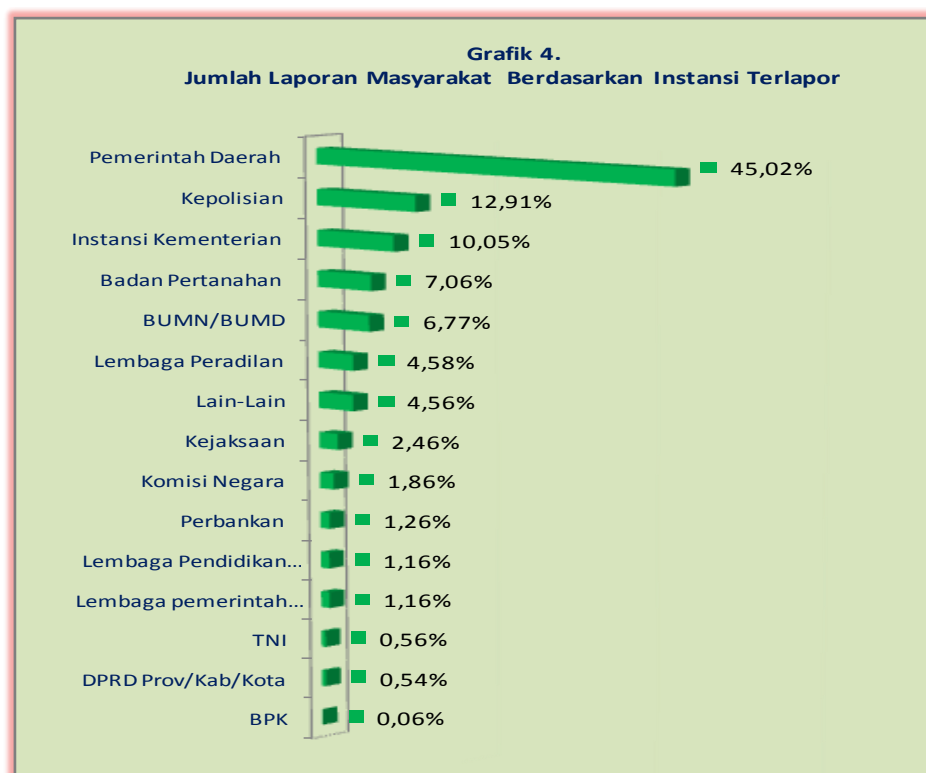
3. Terlapor

Berdasarkan klasifikasi Terlapor, instansi yang menempati urutan 3 (tiga) terbanyak yang dilaporkan atas dugaan maladministrasi adalah Pemerintah Daerah 2329 laporan (45,02%), Kepolisian sebanyak 668 laporan (12,91%), dan Instansi Kementerian sebanyak 520 laporan (10,05%). Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan sebagian besar berada pada penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Secara rinci klasifikasi dan jumlah instansi Terlapor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.
Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor

INSTANSI	JUMLAH	%
Pemerintah Daerah	2329	45,02%
Kepolisian	668	12,91%
Instansi Kementerian	520	10,05%
Badan Pertanahan	365	7,06%
BUMN/BUMD	350	6,77%
Lembaga Peradilan	237	4,58%
Lain-Lain	236	4,56%
Kejaksaan	127	2,46%
Komisi Negara	96	1,86%
Perbankan	65	1,26%
Lembaga Pemerintah Non Kementerian	60	1,16%
Lembaga Pendidikan Negeri	60	1,16%
TNI	29	0,56%
DPRD Prov/Kab/Kota	28	0,54%
BPK	3	0,06%
Total	5173	100%



4. Daerah instansi Terlapor

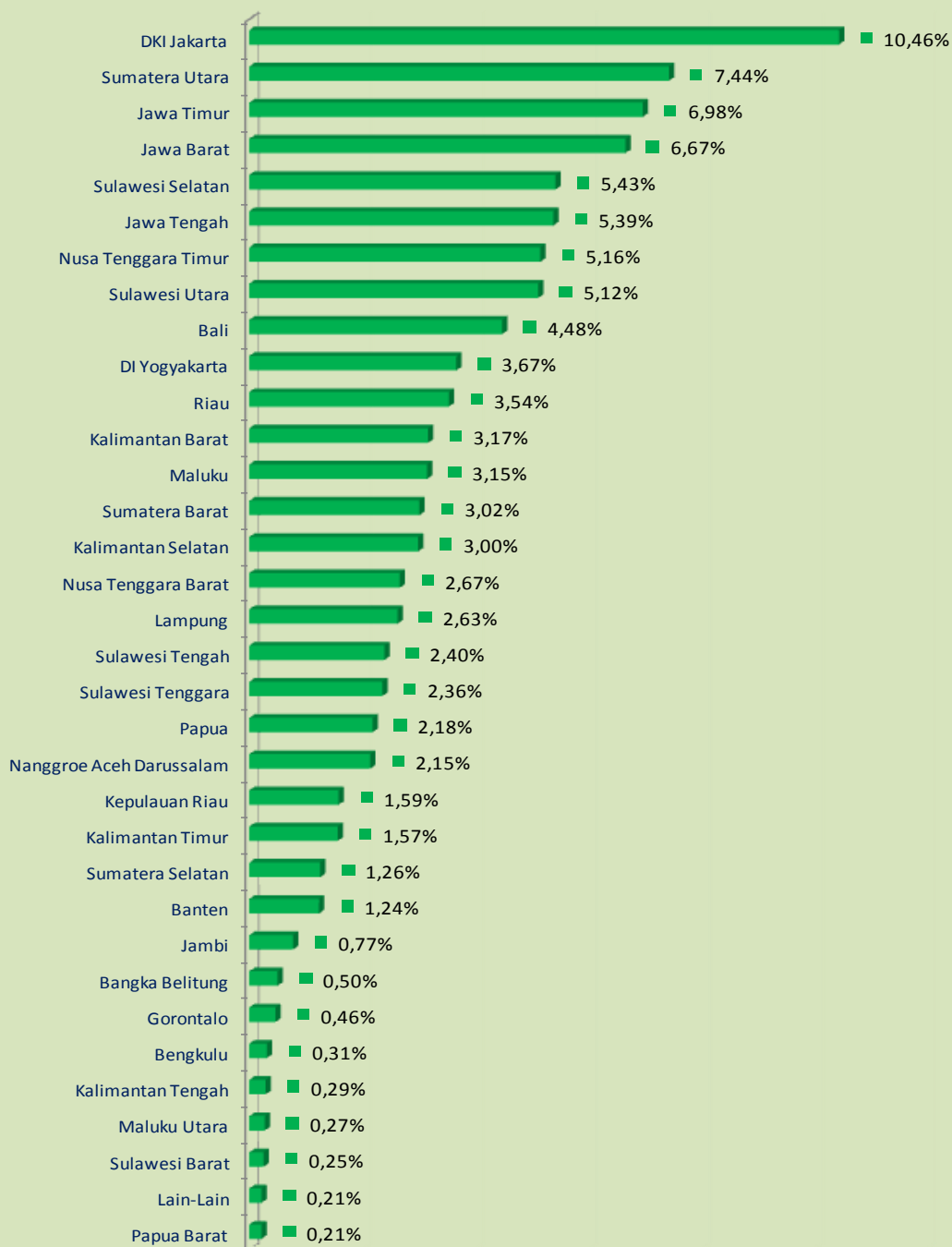
Berdasarkan daerah instansi Terlapor menunjukkan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah instansi penyelenggara pelayanan publik yang berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 541 laporan (10,46%), Sumatera Utara sebanyak 385 laporan (7,44%), dan Jawa Timur 361 laporan (6,98%).

Secara rinci klasifikasi berdasarkan daerah instansi Terlapor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 5.
Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Instansi Terlapor

PROVINSI	JUMLAH	%	PROVINSI	JUMLAH	%
DKI Jakarta	541	10,46%	Sulawesi Tengah	124	2,40%
Sumatera Utara	385	7,44%	Sulawesi Tenggara	122	2,36%
Jawa Timur	361	6,98%	Papua	113	2,18%
Jawa Barat	345	6,67%	Nanggroe Aceh Darussal	111	2,15%
Sulawesi Selatan	281	5,43%	Kepulauan Riau	82	1,59%
Jawa Tengah	279	5,39%	Kalimantan Timur	81	1,57%
Nusa Tenggara Timur	267	5,16%	Sumatera Selatan	65	1,26%
Sulawesi Utara	265	5,12%	Banten	64	1,24%
Bali	232	4,48%	Jambi	40	0,77%
DI Yogyakarta	190	3,67%	Bangka Belitung	26	0,50%
Riau	183	3,54%	Gorontalo	24	0,46%
Kalimantan Barat	164	3,17%	Bengkulu	16	0,31%
Maluku	163	3,15%	Kalimantan Tengah	15	0,29%
Sumatera Barat	156	3,02%	Maluku Utara	14	0,27%
Kalimantan Selatan	155	3,00%	Sulawesi Barat	13	0,25%
Nusa Tenggara Barat	138	2,67%	Papua Barat	11	0,21%
Lampung	136	2,63%	Lain-Lain	11	0,21%
			JUMLAH	5173	100%

Grafik 5.
Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Instansi Terlapor



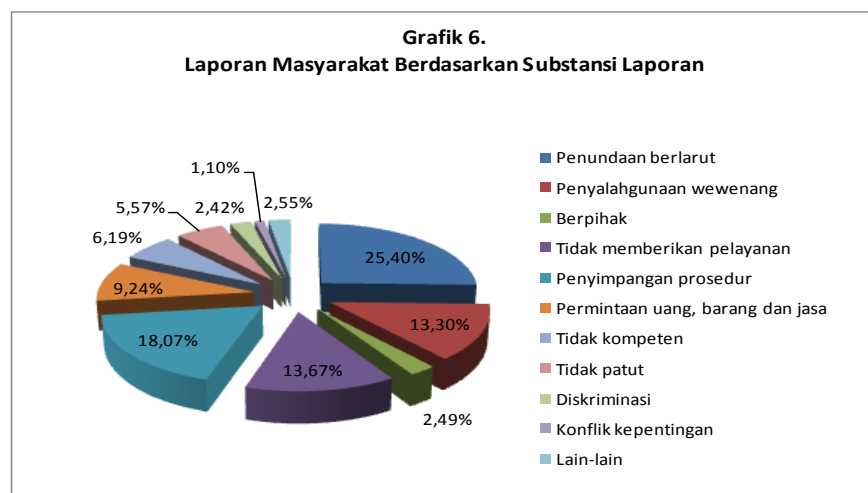
5. Substansi Maladministrasi

Substansi maladministrasi yang banyak dilaporkan masyarakat adalah penundaan pelayanan, misalnya perizinan yang tidak segera diselesaikan, permohonan sertifikat tanah yang tidak segera diselesaikan, eksekusi putusan pengadilan yang tidak segera dilaksanakan, belum adanya lebih lanjut pihak kepolisian, dan sebagainya. Secara berurutan substansi maladministrasi terbanyak adalah Penundaan Berlarut: 1314 laporan (25,40%), Penyimpangan Prosedur: 935 laporan (18,07%), Tidak Memberikan Pelayanan: 707 laporan (13,67%), dan Penyalahgunaan Wewenang: 688 laporan (13,30%).

Secara rinci substansi maladministrasi dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 6.
Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi

SUBSTANSI MALADMINISTRASI	JUMLAH	%
Penundaan Berlarut	1314	25,40%
Penyalahgunaan Wewenang	688	13,30%
Berpihak	129	2,49%
Tidak Memberikan Pelayanan	707	13,67%
Penyimpangan Prosedur	935	18,07%
Permintaan Uang, Barang dan Jasa	478	9,24%
Tidak Kompeten	320	6,19%
Tidak Patut	288	5,57%
Diskriminasi	125	2,42%
Konflik Kepentingan	57	1,10%
Lain-lain	132	2,55%
Total	5173	100%



Dengan kondisi tersebut, perlu upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan antara lain melalui evaluasi dan penyempurnaan penerapan standar operasional prosedur, menegakkan integritas, menjaga komitmen, dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

6. Tindak Lanjut Ombudsman RI

Proses penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik secara administratif maupun substantif. Dalam proses penanganan laporan/pengaduan, sebelum disimpulkan terhadap permasalahan yang diadukan, diperlukan data yang diperoleh melalui kegiatan investigasi maupun pengamatan langsung terhadap instansi yang diduga melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Tindak lanjut atas laporan/pengaduan masyarakat berupa: permintaan klarifikasi kepada Terlapor, pemberitahuan kepada Pelapor, investigasi, monitoring, mediasi, dan penyampaian Rekomendasi kepada Terlapor dan atasannya. Pada tahun 2013, tindak lanjut yang dilakukan sebanyak 7459. Tindak lanjut tersebut, merupakan tindak lanjut terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman RI tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penanganan laporan, bahwa laporan masyarakat dapat dinyatakan selesai pada setiap tahapan. Sering terjadi laporan masyarakat dapat selesai pada tahap klarifikasi.

Dalam hal laporan/pengaduan masyarakat yang sudah dinyatakan selesai ditangani, dilakukan penutupan laporan dengan mekanisme berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 36/ORI-SK/XII/2011 tertanggal 2 Desember 2011 tentang Tata Cara Penutupan Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan Ombudsman di Daerah.

Lampiran I Keputusan tersebut mengatur Penutupan Laporan/Pengaduan Masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap status laporan. Penutupan laporan/pengaduan dalam pemeriksaan/penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dapat dilakukan pada setiap klasifikasi penanganan/ penyelesaian terdiri atas:

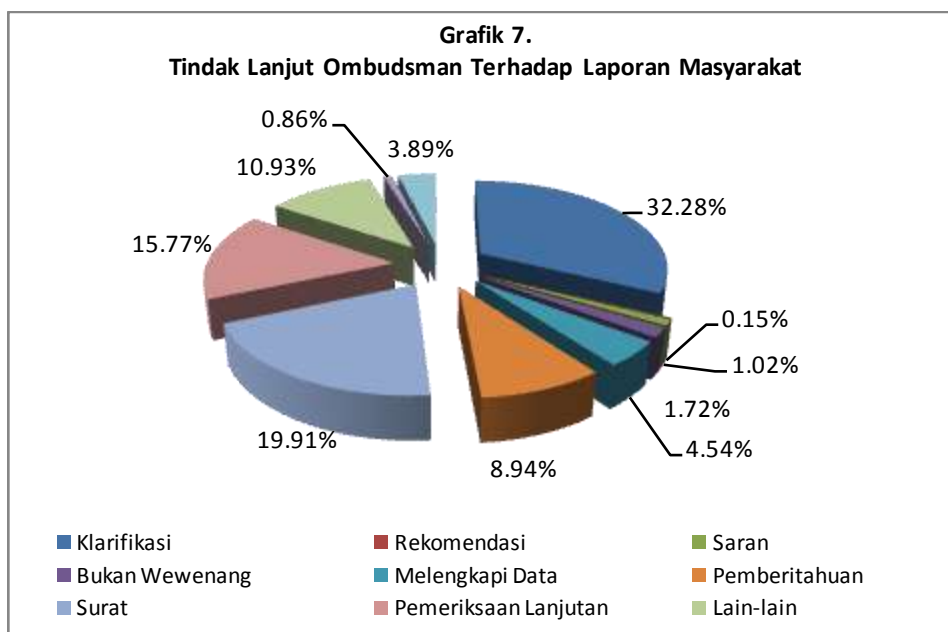
- i. Klasifikasi tidak memenuhi syarat formil.
- ii. Klasifikasi Pelapor mencabut laporan.
- iii. Klasifikasi tidak berwenang.
- iv. Klasifikasi Klarifikasi.
- v. Klasifikasi Investigasi.
- vi. Klasifikasi Konsiliasi atau Mediasi.
- vii. Klasifikasi Ajudikasi Khusus.
- viii. Klasifikasi Saran.
- ix. Klasifikasi Rekomendasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 2013, laporan/pengaduan yang dinyatakan selesai/ditutup sebanyak 290 laporan, terdiri atas laporan yang diterima tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya.

Secara rinci tindak lanjut Ombudsman RI dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 7.
Tindak Lanjut Ombudsman Terhadap Laporan Masyarakat

TINDAK LANJUT	JUMLAH	%
Klarifikasi	2408	32,28%
Rekomendasi	11	0,15%
Saran	76	1,02%
Bukan Wewenang	128	1,72%
Melengkapi Data	339	4,54%
Pemberitahuan	667	8,94%
Surat	1485	19,91%
Pemeriksaan Lanjutan	1176	15,77%
Lain-lain	815	10,93%
Pelimpahan	64	0,86%
Selesai	290	3,89%
JUMLAH	7459	100%



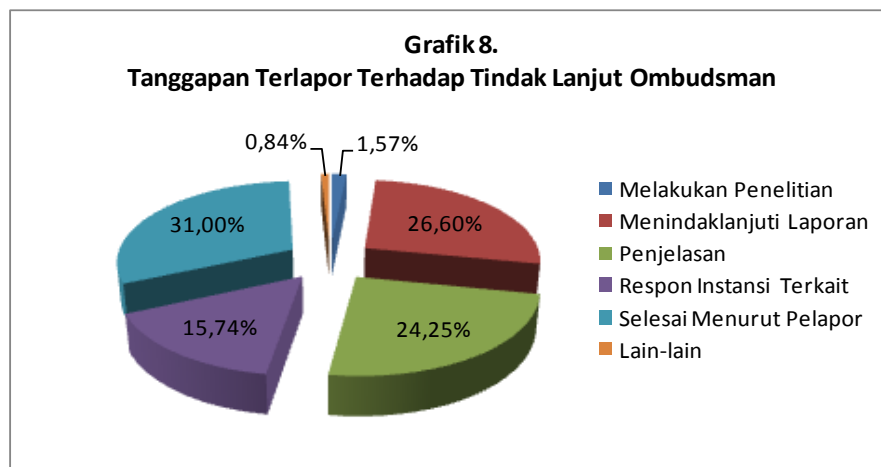
7. Tanggapan Terlapor

Untuk mengetahui kebenaran laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi, Ombudsman RI menyampaikan permintaan klarifikasi kepada instansi Terlapor. Selanjutnya instansi Terlapor menyampaikan tanggapan. Pada tahun 2013, instansi Terlapor dan instansi terkait telah menyampaikan 4391 tanggapan. Substansi tanggapan meliputi selesai menurut pelapor: 1361(31,00%); menindaklanjuti laporan: 1168 (26,60%); memberikan penjelasan atas permasalahan: 1065 (24,25%); dan respon instansi terkait: 691 (15,74%).

Secara rinci tanggapan terlapor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 8.
Tanggapan Terlapor Terhadap Tindak Lanjut Ombudsman

SUBSTANSI TANGGAPAN	JUMLAH	%
Melakukan Penelitian	69	1,57%
Menindaklanjuti Laporan	1168	26,60%
Penjelasan	1065	24,25%
Respon Instansi Terkait	691	15,74%
Selesai Menurut Pelapor	1361	31,00%
Lain-lain	37	0,84%
TOTAL	4391	100%



B. Investigasi, Monitoring, Mediasi, dan Ajudikasi

Dalam rangka menindaklanjuti dugaan maladministrasi oleh penyelenggara layanan, Ombudsman RI melaksanakan berbagai upaya, antara lain melaksanakan investigasi, monitoring, mediasi, dan ajudikasi. Seluruh kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan prioritas, urgensi, dan efektivitas dan efisiensi anggaran.

1. Investigasi

Investigasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan untuk melengkapi data pendukung dan mendalami kebenaran permasalahan yang disampaikan kepada Ombudsman RI. Hasil investigasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penanganan/penyelesaian lebih lanjut.

Pada tahun 2013, Ombudsman RI melakukan investigasi sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) kali, antara lain mengenai laporan/pengaduan sebagai berikut:

- a. Pertanahan, seperti penundaan berlaut dalam pengurusan sertifikat, penyimpangan prosedur proses pembebasan lahan.
- b. Penerimaan CPNS.
- c. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatutan dalam validasi dan verifikasi honorer kategori satu (K-1).
- d. Maladministrasi dalam proses mutasi guru.
- e. Pungutan tidak resmi dalam pengurusan administrasi kependudukan.
- f. Permasalahan perburuhan.

Data lengkap kegiatan investigasi, sebagaimana terlampir pada lampiran I.

2. Monitoring

Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui respon dan ketaatan instansi Terlapor terhadap tindak lanjut Ombudsman RI atau mengetahui perkembangan permasalahan yang sedang ditangani. Monitoring juga dilakukan untuk melakukan pemantauan pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pada tahun 2013 dilakukan monitoring sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) kali, antara lain :

- a. Monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan hasil mediasi antara PT PLN (Persero) dengan warga Desa Nglegi, Desa Beji, Desa Bander, dan Desa Salam Kec. Pathuk Kab Gunung Kidul.
- b. Monitoring tindak lanjut proses ganti rugi pembangunan Jalan Tol Cijago bagi warga Kukusan Depok, Jawa Barat.
- c. Monitoring terhadap penanganan laporan masyarakat terkait HGU yang dimiliki PT Unggul Lestari yang diduga telah mengambil sebagian tanah garapan masyarakat yang tidak termasuk lokasi HGU.
- d. Monitoring tindak lanjut permasalahan penerimaan CPNS.
- g. Monitoring mengenai belum ditindaklanjutnya penertiban bangunan pemotongan ayam tanpa izin di Kabupaten Pontianak.
- h. Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat atas meningkatnya biaya pembayaran rekening listrik di Provinsi Papua.

Data lengkap kegiatan monitoring, sebagaimana terlampir pada lampiran II.

3. Mediasi

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan seringkali diperlukan pihak yang dapat membantu untuk mempertemukan antara Pelapor dengan Terlapor. Salah satu wewenang Ombudsman RI adalah melaksanakan mediasi kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan.

Pada tahun 2013 telah dilakukan mediasi sebanyak 44 (empat puluh empat) kali, antara lain:

- a. Permasalahan pertanahan di Kalimantan Selatan.
- b. Permasalahan pungutan biaya berobat bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
- c. Permasalahan *fly over* Jombor Yogyakarta.
- d. Permasalahan Pasar Gotong Royong Magelang.
- e. Permasalahan pelayanan pada RSUD Ulin.
- f. Permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- g. Permasalahan antara PDAM Tirta Moedal Semarang dan PT. Pos Indonesia terkait kesalahan prosedur pembayaran PDAM.
- h. Permasalahan sengketa lahan di kompleks Pasar Laino Raha Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Data lengkap kegiatan mediasi, sebagaimana terlampir pada lampiran III.

4. Ajudikasi khusus

Ajudikasi khusus merupakan proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh Ombudsman RI. Ajudikasi khusus dilaksanakan Ombudsman RI untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi oleh pelapor/pengadu. Ajudikasi khusus dilaksanakan Ombudsman RI paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diundangkan yaitu 18 Juli 2014.

Namun demikian, pelaksanaan ajudikasi memerlukan dua instrumen peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus; dan
- b. Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam tahap harmonisasi. Rancangan Perpres masih perlu diperbaiki.

Sebagai persiapan pelaksanaan ajudikasi khusus, Ombudsman RI telah menyiapkan sarana berupa ruang sidang ajudikasi khusus yang terletak di lantai 6 Gedung Ombudsman RI Jl. HR Rasuna Said Kav.C-19 Kuningan Jakarta Selatan.

C. Putusan Penting

Putusan penting Ombudsman RI, adalah rekomendasi dan ajudikasi. Proses Ajudikasi Khusus belum dilaksanakan, sehingga putusan penting saat ini adalah rekomendasi. Pada tahun 2013, disampaikan kepada instansi terlapor, sebagai berikut:

1. Rekomendasi Nomor 02/REK/0682.2009/ITC-02/II/2013 kepada: (1) Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, agar melaksanakan putusan pengadilan yakni mengembalikan/membayarkan uang hasil penjualan aset perusahaan PT. PGNI yang tersimpan kepada Pelapor. (2) Menteri BUMN, agar mengawasi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.
2. Rekomendasi Nomor 03/REK/0140.2010/PBP-06.08/III/2013 kepada: (1) Menteri BUMN, agar memberikan peringatan tertulis kepada PT. Telkom atas kelalaiannya tidak membuat payung hukum (aturan) untuk memberikan kepastian hak bagi karyawan ketika memasuki pensiun. (2) Direksi PT. Telkom, agar segera membayarkan sisa hak para Pelapor berupa bantuan manfaat pensiun dengan asas uniformula.
3. Rekomendasi Nomor 04/REK/060.2012/PB-11/IV/2013 kepada Direktur Utama PT. Askes (Persero), agar menghormati proses hukum dengan menunggu putusan kasasi perkara Nomor 197/PHI.G/2011/PN.Jkt Pst mengenai tunjangan jabatan Sekretaris KORPRI unit PT. Askes (Persero) dan mutasi ke Kantor Regional XI Bali; meninjau kembali pemutusan hubungan kerja (PHK) Nomor 3129/Peg-06/1211.
4. Rekomendasi Nomor 005/RK/2013 kepada Jaksa Agung, perlu: (1) merevisi SE Nomor SE-001/A/JA/02/2008. (2) memerintahkan jajarannya agar melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/C9/2011 (3) pengurangan manajemen SDM. Kepada KAPOLRI: (1) perlu membuat peraturan internal guna mengantisipasi pengembalian berkas perkara yang berulang-ulang. (2) perlu mengarahkan penyidik agar segera mengirim SPDP kepada JPU sejak awal dimulainya penyidikan. (3) perlu pengaturan manajemen SDM.
5. Rekomendasi Nomor 006/REK.0070.2010/PBP-09/IV/2013 kepada Menteri BUMN agar (1) melaksanakan putusan Nomor 96/PK/TUN/2010, putusan Nomor 127/B/2007/PT.TUN.JKT, putusan Nomor 149/G/2006/PTUN-JKT. (2) memerintahkan Direksi Perum Perumnas untuk menghitung/membayar hak-hak Pelapor sesuai putusan butir (1).
6. Rekomendasi Nomor 007/REK/0554.2012/HN-19/V/2013 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk (1) mencabut surat pelimpahan penanganan perselisihan hubungan industrial antara SP BCA Bersatu dengan manajemen PT. Bank BCA sebagai surat Nomor 3801/-1.835.3 tanggal 25 Juni 2012. (2) memerintahkan Mediator Hubungan Industrial pada Disnakertrans DKI Jakarta yang menangani perselisihan antara SP BCA Bersatu dengan PT. Bank BCA untuk mengeluarkan surat anjuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) memberi sanksi kepada Mediator Hubungan Industrial pada Disnakertrans DKI Jakarta yang menangani perselisihan antara SP BCA Bersatu dengan PT. Bank BCA.

7. Rekomendasi Nomor 008/Rek/0682-2009/BS-02/Tim 2/V/2013 kepada Menteri BUMN meminta segera memberikan laporan atas pelaksanaan Rekomendasi dimaksud sebagai wujud kerja sama pelayanan masyarakat.
8. Rekomendasi Nomor 009/REK/0084.2012/PBP.02/VII/2013 kepada Walikota Semarang untuk (1) mengambil langkah tegas melakukan pembongkaran tower BTS milik PT Linggajati Al Manshurin yang dibangun tanpa memiliki izin. (2) memberitahukan jajaran terkait (Satpol PP) untuk memantau dan mengkoordinasi pelaksanaan pembongkaran tower. (3) mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap Kepala Satpol PP Kota Semarang yang melakukan tindakan maladministrasi.
9. Rekomendasi Nomor 010/REK/0001.2013/PBP.02/IX/2013 kepada (1) PT. Bank Sulawesi Tengah: wajib bertanggung jawab memberika ganti rugi yang layak atas hilangnya surat ukur/gambar situasi pada dokumen SHM Nomor 34/1978. (2) Kantor Pertanahan Kota Palu: wajib bertanggung jawab menerbitkan surat ukur/gambar situasi kepada Pelapor. (3) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah: melakukan pengawasan terhadap PT. Bank Sulawesi Tengah agar bertanggung jawab atas dokumen milik nasabah. (4) Gubernur Sulawesi Tengah: melakukan pengawasan terhadap PT. Bank Sulawesi Tengah agar secara sungguh-sungguh melakukan proses penyelesaian ganti rugi kepada ahli waris Pelapor. (5) Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah: melakukan pengawasan terhadap Kantor Pertanahan Kota Palu dalam menerbitkan surat ukur/gambar situasi dalam rangka pelaksanaan rekomendasi nomor 2.
10. Rekomendasi Nomor 011/REK/0121.2013/PBP-24/TIM.4/X/2013 kepada Walikota Batu agar (1) mencabut IMB Nomor 180/550/IMB/422.208/2012, revisi IMB Nomor 180/75/IMB/422.208/2012. (2) menghentikan proses pembangunan Rumah Peristirahatan The Rayja sampai dengan diperoleh perizinan. (3) memberikan sanksi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu atas kelalaian kewajiban hukum dalam proses penerbitan IMB.

Salah satu rekomendasi yang mempunyai dampak luas dan memengaruhi proses hukum adalah rekomendasi yang ditujukan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang dugaan maladministrasi dalam proses pengembalian dan penyerahan berkas perkara berulang-ulang. Berikut disampaikan naskah rekomendasi dimaksud.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 005 /REK/V/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 3 Mei 2013

Kepada Yth.
1. Jaksa Agung RI
2. Kepala Kepolisian Negara RI
Di Jakarta

Perihal : Penyampaian Rekomendasi Mengenai Dugaan Maladministrasi Dalam Proses Pengembalian Dan Penyerahan Berkas Perkara Dari Kejaksaan Ke Kepolisian Yang Berulang-Ulang

Dengan hormat,

Sesuai amanat Pasal 7 huruf d jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan memiliki kewenangan untuk menyampaikan saran kepada Pimpinan Penyelenggara Negara guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau pelayanan publik. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, maka Ombudsman telah melakukan serangkaian kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri mengenai dugaan maladministrasi dalam proses pengembalian dan penyerahan berkas perkara dari kejaksaan ke kepolisian yang berulang – ulang.

Investigasi atas prakarsa sendiri tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya laporan/pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia terkait permasalahan dalam proses pengembalian dan penyerahan berkas perkara dari kejaksaan ke kepolisian yang berulang – ulang atau yang dikenal dengan bolak – balik berkas perkara. Dalam pelaksanaan kegiatan Investigasi atas prakarsa sendiri tersebut Ombudsman telah melakukan penelitian dokumen, pemeriksaan lapangan, permintaan keterangan dari pihak terkait termasuk dari institusi kejaksaan FI dan Kepolisian Negara RI.

Berdasarkan hasil investigasi atas prakarsa sendiri tersebut, Ombudsman RI perlu untuk menyampaikan Rekomendasi kepada :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia

- a. Perlu segera merevisi SE No: SE-001/A/JA/02/2008 tentang Pelaksanaan Gelar Perkara Tahap Penyidikan oleh Penyidik.
- b. Perlu untuk memerintahkan jajarannya agar melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-036/A/JA/C9/2011.
- c. Perlu pengaturan Manajemen SDM (penempatan, kualitas dan kuantitas) sehingga dapat memperbaiki proses penanganan perkara,

Jl. Rasuna Said Kav. C – 19, Lt. 5 & 7 Jakarta Selatan 12920 Telepon : (021) 52960894-95 , Fax : (021) 52960907-1
website: www.ombudsman.go.id

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Perlu membuat peraturan internal guna mengantisipasi pengembalian berkas perkara yang berulang - ulang.
- b. Perlu mengarahkan penyidik agar segera mengirim SPDP kepada JPU sejak awal dimulainya penyidikan.
- c. Perlu pengaturan Manajemen SDM (penempatan, kualitas dan kuantitas) sehingga berakibat padakelancaran proses penanganan perkara.

3. Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Mengadakan pertemuan berkala antara Penyidik dan JPU untuk membahas pengembalian berkas perkara yang berulang - ulang sehingga proses percepatan penanganan perkara dapat tercapai tanpa mengurangi independensi.
- b. Mengefektifkan fungsi Pengawasan internal untuk mengawasi tindakan JPU dan Penyidik dalam proses penanganan perkara.
- c. Membuat mekanisme sistematis antara kejaksaan dan kepolisian dalam rangka mengatasi persoalan pengembalian berkas perkara yang berulang - ulang dari JPU kepada penyidik.
- d. Membangun rasa kepercayaan dan menghilangkan ego sektoral antara penyidik dan JPU dalam penanganan perkara.
- e. Perlu pengaturan Manajemen SDM (penempatan, kualitas dan kuantitas) sehingga berakibat pada kelancaran-proses penanganan perkara,

Sesuai Pasal 38 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Terlapor wajib melaksanakan Saran dan Rekomendasi Ombudsman dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi:

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Yth. Ketua Komisi II DPR RI, di Jakarta.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan
Maladministrasi
i

A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi pembentukan perwakilan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2013 direncanakan membentuk 10 (sepuluh) perwakilan, namun demikian pembentukan dilaksanakan di 9 (sembilan) Provinsi, disebabkan pembentukan Perwakilan Ombudsman RI di Kalimantan Utara ditunda dengan pertimbangan struktur kelembagaan Provinsi Kalimantan Utara belum definitif. Ke-9 Perwakilan yang dibentuk pada tahun 2013, sebagai berikut:

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi.
3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu.
4. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten.
5. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo.
7. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat.
8. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara.
9. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat.

Dengan pembentukan tersebut, maka sampai dengan akhir tahun 2013 Perwakilan Ombudsman RI di Provinsi telah dibentuk 32 Perwakilan. Pembentukan perwakilan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan Ombudsman RI, sehingga masyarakat mendapatkan layanan sesuai harapannya.

Kegiatan kedua adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan bagi Insan Ombudsman di Pusat maupun Perwakilan baik terhadap Anggota Ombudsman, Asisten Ombudsman, maupun Sekretariat Jenderal. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan biaya APBN atau pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain.

Data lengkap kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, sebagaimana terlampir pada lampiran IV dan lampiran V.

B. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dalam rangka pencegahan maladministrasi serta memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai hak atas pelayanan publik yang berkualitas, Ombudsman RI melakukan berbagai kegiatan penyebarluasan informasi mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sasaran kegiatan tersebut adalah para penyelenggara pelayanan publik, masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak mendapatkan pelayanan publik. Selain itu sosialisasi juga ditujukan kepada LSM dan media massa sebagai pilar-pilar partisipasi masyarakat yang membantu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Ombudsman RI melakukan penyebarluasan informasi dalam berbagai bentuk antara lain: sosialisasi dan klinik pengaduan, iklan layanan masyarakat, diskusi, seminar, *talk show*, dialog interaktif, sarasehan, kuliah umum, ceramah dan lainnya.

Tujuan kegiatan sosialisasi adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kedudukan, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat atas hak mendapatkan layanan pemerintah dan instansi penyelenggara publik lainnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Mendorong institusi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan kesadaran sebagai pelayan masyarakat.
- d. Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik.

Pada tahun 2013 Ombudsman RI (Pusat) dan Perwakilan di Daerah, melaksanakan sosialisasi sebagai upaya pencegahan terjadinya maladministrasi, antara lain:

- a. Sosialisasi dan klinik pengaduan masyarakat secara langsung.
- b. Sosialisasi untuk jajaran Pemerintah Kota/Kabupaten.
- c. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Sosialisasi tentang tugas, fungsi, dan wewenang untuk jajaran instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kerja Ombudsman RI.
- e. Sosialisasi melalui radio/tv dalam bentuk dialog interaktif.
- f. Narasumber pada diskusi tentang transparansi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- g. Sosialisasi dan pengawasan melalui pembukaan Posko Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh Perwakilan Ombudsman RI sebagai salah satu bentuk pencegahan maladministrasi.
- h. Pengawasan seleksi CPNS/CPNSD oleh seluruh Ombudsman Perwakilan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.

Data lengkap kegiatan sosialisasi dan pengembangan jaringan, sebagaimana terlampir pada lampiran VI.

C. Kerja Sama

1. Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga

a. Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.



Gambar 1 Kerja Sama dengan Kementerian Luar Negeri

b. Kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Gambar 2 Kerja Sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- c. Kerja sama dengan UKP4 melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyediaan aplikasi LAPOR.
- d. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penandatanganan Nota Kesepahaman.
- e. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam bidang kehumasan telah dibentuk tim pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pemerintah (BAKOHUMAS) di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 26/ORI-SK/tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013.
- f. Kerja sama dengan Komisi Yudisial dan LPSK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman untuk memudahkan koordinasi penyelesaian pengaduan layanan publik.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Yudisial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013 di Auditorium Komisi Yudisial. Penandatanganan MoU ini dilakukan untuk kerja sama di bidang pengawasan hakim, pelayanan publik, serta perlindungan saksi dan korban. Ketua Ombudsman dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini sangat penting bagi terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Lembaga peradilan menempati urutan ke-3 pengaduan masyarakat terbanyak.



Gambar 3 Penandatanganan Nota Kesepahaman Ombudsman RI, Komisi Yudisial, dan LPSK

- g. Kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI.
- h. Kerja sama dengan YAPPIKA/MP3.
- i. Penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

- j. Kerja sama dengan KPK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman untuk memudahkan koordinasi pengawasan layanan publik.



Gambar 4 Kerja Sama dengan KPK

- k. Kerja sama dengan Kontras terkait permohonan data untuk riset “Penguatan Badan Publik dalam Pemenuhan Hak atas Informasi bagi Publik”.
- l. Kerja sama dengan Universitas Kristen Wijaya Kusuma Surabaya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman.
- m. Kerja sama dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan KPK melalui pagelaran sastra integritas “Pentas Budaya Anti Korupsi Dan Anti Maladministrasi”.
Kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi. Salah satu tujuan kerja sama adalah melaksanakan sosialisasi fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI dengan sasaran mahasiswa. Mahasiswa sangat penting bagi perbaikan kualitas pelayanan publik karena sebagai masyarakat berpendidikan dapat menyuarakan (*voice*) keluhan apabila mengalami pelayanan publik yang buruk. Sedangkan pada saat menjadi pegawai pemerintah telah memahami kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
- n. Kerja sama dengan TIRI tentang *Integrity Tools Kits*.
- o. Kerja sama dengan DPRD Pasuruan dalam rangka konsultasi mengenai unit pengawas layanan publik yang akan dibangun oleh Pemda.
- p. Kerja sama dengan POLRI dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan membentuk tim bersama antara Ombudsman RI dengan POLRI untuk merumuskan kesepakatan hasil dan rencana tindak lanjut rapat koordinasi.
- q. Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.



Gambar 5 Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

- r. Peran serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien



Gambar 6 Peran Serta Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Efisien

2. Kerja sama Luar Negeri

a. Kerja sama dengan AusAid dan *Commonwealth Ombudsman Australia*

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Ombudsman RI melakukan kerja sama dengan AusAid dan *Commonwealth Ombudsman Australia* dalam bentuk:

1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Investigasi bagi Calon Asisten Ombudsman RI di Jakarta, yang dilaksanakan tanggal 8–9 Januari 2013.
2. Pelatihan Kepemimpinan Asisten Madya, Asisten Muda Ombudsman RI, dan Pejabat Eselon IV Kesekjenan Ombudsman RI di Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013.
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Investigasi Bagi Kantor Perwakilan yang dilaksanakan pada tanggal 13-18 Januari 2013 di Denpasar, 16-21 Januari 2013 di Makasar, dan 20-25 Januari 2013 di Padang.
4. Pelatihan Kepemimpinan bagi Kepala Perwakilan dan Asisten dilaksanakan di Jakarta.

Hasil yang diharapkan dari kerja sama dengan AusAid dan *Commonwealth Ombudsman Australia* antara lain:

1. Peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan dan keahlian dasar bagaimana menangani penyelesaian laporan di Ombudsman RI.
2. Peserta pelatihan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pelayanan publik dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan kemampuan manajerial.
4. Meningkatkan motivasi peserta pelatihan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



Gambar 7 Kerja Sama dengan AusAid dan *Commonwealth Ombudsman Australia*

b. Kerja sama dengan SAJI Project UNDP

Ombudsman RI menjalin kerja sama dengan *United Nation Development Program* yang dikelola oleh *Strengthening Access to Justice in Indonesia* berkaitan dengan penerimaan pengaduan mengenai pelayanan publik di 3 (tiga) kota sebagai *pilot project*, yaitu:

1. Kabupaten Bener Meriah di Aceh, tanggal 5 – 8 Maret 2013.
2. Kota Palu di Sulawesi Tengah, tanggal 5 – 8 Maret 2013.
3. Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, tanggal 17 – 20 Maret 2013.

Di setiap daerah tersebut dibentuk posko pengelolaan pengaduan internal pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat yang hak pelayanan publiknya dicerai oleh penyelenggara layanan.



Gambar 8 Kerja Sama dengan SAJI Project UNDP

3. Kerja sama dengan Media

Ombudsman RI (pusat) dan Perwakilan di daerah telah menjalin kerja sama dengan media cetak dan elektronik dalam rangka mendukung upaya penanganan laporan/pengaduan masyarakat dan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kerja sama dengan media massa antara lain :

- a. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pos Kupang, Victory News dan Timor Expres.
- b. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung dengan Metro Lampung, Radar Lampung dan Lampung Pos.

- c. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Berau Pos.
- d. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat dengan Padang Ekspres.
- e. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Tribun Manado dan Manado Post.
- f. Dialog interaktif di radio antara Perwakilan Ombudsman RI dengan penyiar radio, antara lain: Radio Suara Jombang, Suara Madiun, Painan Radio FM di Kabupaten Pesisir Selatan, Radio Top FM di Padang Panjang dan Bukittinggi, Radio Lukan Nantuo di Tanah Datar, Radio Jejaka di Pasaman Barat, Harau FM di Payakumbuh, Radio Suara Perwira di Purbalingga, Radio Rakosa FM di Yogyakarta, RRI Purwokerto, Radio In dan Radio RSPD Kebumen di Kebumen.
- g. Kerja sama dalam kegiatan pameran.



Gambar 9 Aktif sebagai Peserta Pameran

D. Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik

Ombudsman RI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 dan Bab V, memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajiban menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu. Dengan terpenuhinya seluruh kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, keamanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses layanan, profesionalitas, dan kenyamanan pelayanan sehingga prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi.

Dalam penelitian kepatuhan, Ombudsman RI memosisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya dalam pelayanan publik, seperti ada atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll. Untuk itu, metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian kepatuhan adalah melalui metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang menjadi obyek penelitian.

Ombudsman RI tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan, sebagaimana dilakukan oleh instansi lain. Penelitian ini juga tidak untuk menilai efektivitas dan kualitas pelayanan, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, namun sebatas pada implementasi Standar Pelayanan.

Pada tahun 2013, penilaian kepatuhan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga. Hasil lengkap penelitian kepatuhan sebagai berikut:

1. Penelitian Kepatuhan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah yang menjadi obyek penelitian meliputi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten, sebagai berikut:

Tabel 9

Pemerintah Daerah yang Dilakukan Penelitian Kepatuhan

NO	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN
1)	Aceh.	Banda Aceh.
2)	Sumatera Utara.	Medan.
3)	Sumatera Barat.	Padang.
4)	Sumatera Selatan.	Palembang.
5)	Riau.	Pekanbaru.
6)	Kepulauan Riau.	Batam.
7)	Lampung.	Lampung.
8)	Jawa Barat.	Bandung.
9)	Jawa Tengah.	Semarang.

NO	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN
10)	Jawa Timur.	Surabaya.
11)	Kalimantan Barat.	Pontianak.
12)	Kalimantan Selatan.	Banjarmasin.
13)	Kalimantan Timur.	Balikpapan.
14)	Bali.	Denpasar.
15)	Nusa Tenggara Barat.	Mataram.
16)	Nusa Tenggara Timur.	Kupang.
17)	Sulawesi Utara.	Manado.
18)	Sulawesi Tengah.	Parigi Moutong.
19)	Sulawesi Tenggara.	Kendari.
20)	Sulawesi Selatan.	Makasar.
21)	Maluku.	Ambon.
22)	Papua.	Jayapura.

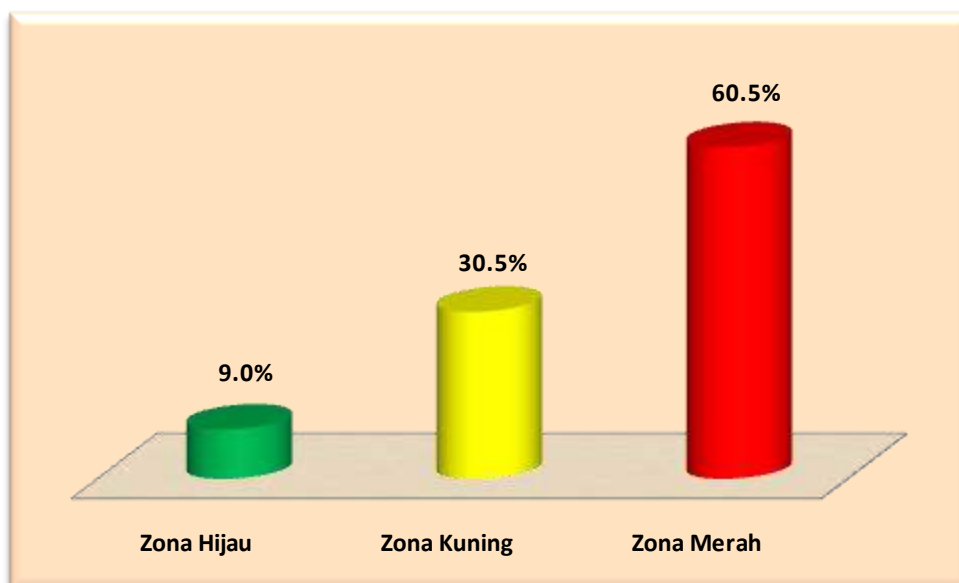
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pemerintah Daerah, ditemukan:

- a. Unit pelayanan pada tingkat Dinas Provinsi 60,5% masih dalam kategori zona merah, sedangkan Unit pelayanan pada tingkat instansi Pemerintah Kota/Kabupaten 55,9% masih dalam kategori zona merah. Unit pelayanan pada tingkat instansi Pemerintah Kota/Kabupaten lebih sedikit yang masuk ke dalam kategori merah jika dibandingkan dengan Unit pelayanan pada tingkat Dinas Provinsi, hal ini dikarenakan di Unit pelayanan publik pada tingkat instansi di Pemerintah Kota/Kabupaten sudah banyak yang digabungkan dalam unit atau kantor pelayanan terpadu. Hal ini berdampak pada pemenuhan komponen standar pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Terdapat 4 dinas yang 70% unit pelayanan publik pada tingkat Provinsi masuk ke dalam kategori zona merah, antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas PU/Cipta Karya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Sedangkan pada Unit Pelayanan Publik di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 6 dinas yang 70% unit pelayanan publiknya masuk ke dalam zona merah, antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas PU/Cipta Karya, Dinas Sosial, Dinas/Badan Lingkungan hidup dan Kesbangpolinmas.
- c. Sebagian besar unit pelayanan publik baik di tingkat SKPD Provinsi Jawa Timur maupun di Tingkat SKPD Kota Surabaya sudah memenuhi unit pelayanan publiknya dengan komponen standar pelayanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Hasil penelitian disajikan pada grafik berikut:

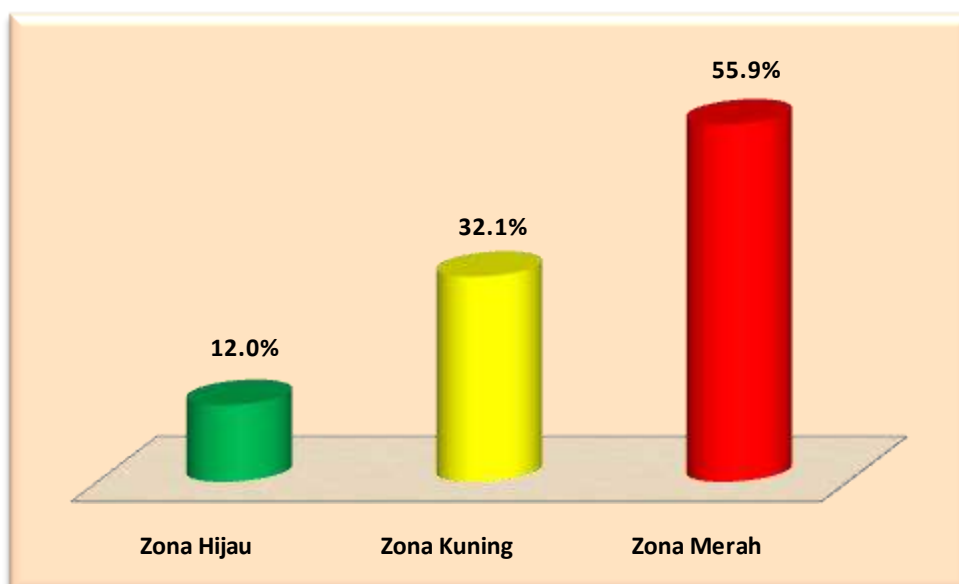
a. Potret Kepatuhan Pemerintah Provinsi

Grafik 9
Potret Kepatuhan Pemerintah Provinsi



b. Potret Kepatuhan Pemerintah Kota/Kabupaten

Grafik 10
Potret Kepatuhan Pemerintah Kota/Kabupaten



2. Penelitian Kepatuhan Kementerian.

Penilaian kepatuhan terhadap Kementerian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2013 dengan obyek penelitian adalah Unit Pelayanan Publik yang menjadi sampel di 18 Kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya unit pelayanan perizinan langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi khususnya penyelenggaraan perizinan di tingkat Kementerian yang berada di Jakarta, yaitu:

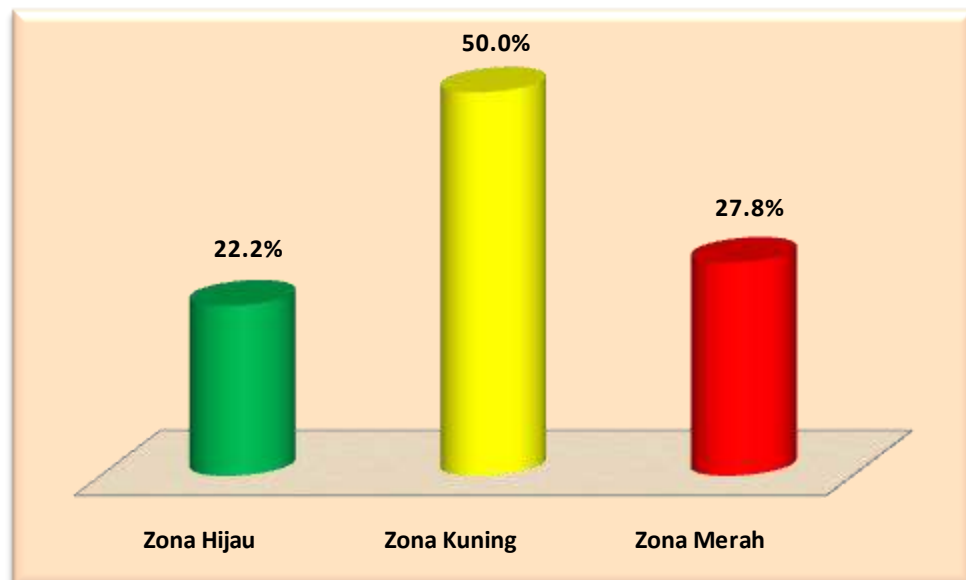
- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Kementerian Keuangan.
- 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4) Kementerian Perindustrian.
- 5) Kementerian Perdagangan.
- 6) Kementerian Pertanian.
- 7) Kementerian Kehutanan.
- 8) Kementerian Perhubungan.
- 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 11) Kementerian Pekerjaan Umum.
- 12) Kementerian Kesehatan.
- 13) Kementerian Sosial.
- 14) Kementerian Agama.
- 15) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 16) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 17) Kementerian Riset dan Teknologi.
- 18) Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kementerian, ditemukan:

- a. Sebanyak 22,2% atau 4 Kementerian masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Sebanyak 50% atau 9 Kementerian masuk dalam zona kuning atau zona tengah, yang berarti sedang tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Sebanyak 27,8% atau 5 Kementerian masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil penelitian disajikan pada grafik berikut:

Grafik 11
Penelitian Terhadap Kementerian



Hasil penelitian kepatuhan Kementerian telah disampaikan kepada pimpinan Unit Pelayanan Publik yang menjadi sampel pada tanggal 30 Juni 2013.

Dari hasil penilaian Observasi I diperoleh komitmen yang tinggi para penyelenggara pelayanan publik untuk segera memperbaiki tingkat kepatuhannya terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Beberapa Kementerian yang pada saat itu memiliki nilai kepatuhan rendah, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial secara aktif berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk menyusun rencana tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan publik. Hasil koordinasi terhadap kedua Kementerian menunjukkan bahwa pada Observasi II ini memperoleh nilai yang meningkat secara signifikan sehingga dapat masuk ke dalam zona hijau. Hasil lengkap pemantauan terhadap kepatuhan Kementerian, disajikan berikut.

Pemantauan terhadap Kepatuhan Kementerian.

Dalam rangka memantau pelaksanaan komitmen Kementerian untuk segera memperbaiki pelayanan publik, Ombudsman RI melakukan monitoring (pemantauan) terhadap 18 Kementerian yang telah diobservasi tersebut. Hasil monitoring kepatuhan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang tingkat kemajuan kepatuhan Kementerian dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Monitoring dilakukan terhadap Unit Pelayanan Publik yang menjadi sampel di 18 (delapan belas) Kementerian telah dinilai pada periode Maret-Mei 2013.

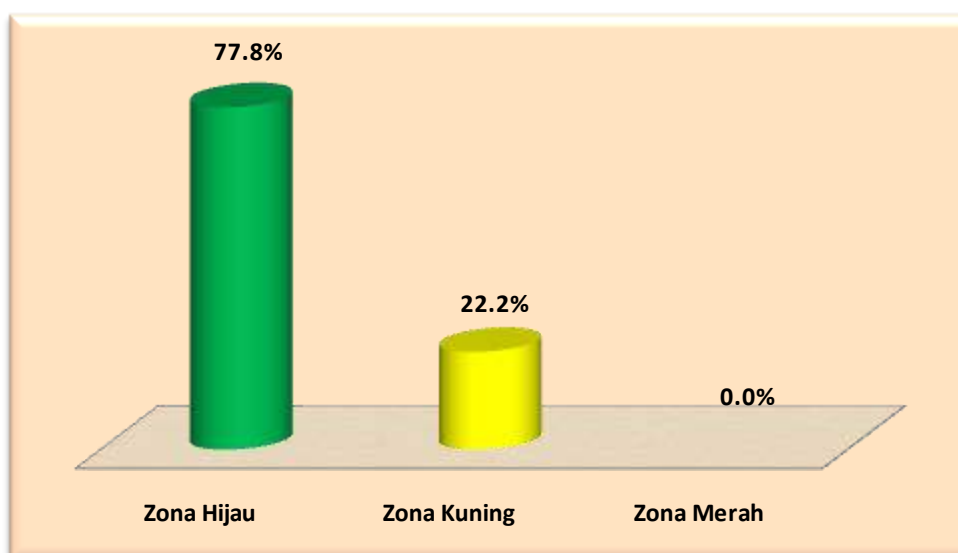
Berdasarkan hasil monitoring terhadap Kementerian ditemukan:

1. Pada observasi ke-2, terlihat bahwa 77,8% atau sebanyak 14 Unit Pelayanan Publik yang menjadi sampel dalam observasi berada dalam zona hijau. Sisanya sebesar 22,2% atau 4 Unit Pelayanan Publik masih dalam kategori zona kuning. Tidak ada kementerian yang berada di zona merah.
2. Sebagian besar Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel sudah memenuhi komponen standar pelayanan publik yang berupa: SOP, Alur Pelayanan, Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan, Persyaratan Pelayanan dan Biaya/Tarif.
3. Semua Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel sudah menyelenggarakan sistem informasi pelayanan publik baik yang berbentuk manual maupun elektronik.
4. Baru 50% Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel yang sudah mengumumkan maklumat pelayanan.
5. Sebagian besar Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel sudah menyediakan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan untuk mendapatkan kenyamanan dalam mengakses tempat penyelenggara pelayanan.
6. Belum seluruh Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel dalam penelitian ini menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Masih terdapat 32,1% Unit pelayanan publik yang belum menyediakan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.
7. Sebagian besar Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel telah menyediakan Sistem Pengelolaan Pengaduan untuk menangani keluhan masyarakat pengguna pelayanan terhadap kinerja pelayanan publik yang berada dalam wilayahnya. Hal ini terlihat dari ketersediaan informasi mengenai cara/prosedur pengaduan yang telah disediakan oleh Unit Pelayanan Publik yang disurvei, 75% terlihat menyediakan cara/prosedur pengaduan. Namun untuk informasi hasil pengelolaan pengaduan sebagian besar Unit Pelayanan Publik belum menyediakannya (92,8%). Selain itu, di Unit Pelayanan Publik disediakan sarana pengaduan dalam berbagai bentuk. Sarana email pengaduan merupakan fasilitas terbanyak yang tersedia dalam menangani pengaduan, disusul melalui *hotline* telepon, dan melalui kotak saran dan pengaduan.
8. Sebagian besar Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel telah menginformasikan Visi, Misi, dan Motto.
9. Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel, 53,6% yang sudah memiliki sertikat ISO 9001:2008 sedangkan 46,4% belum mempunyai sertifikat ISO. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kementerian telah menaruh perhatian pada standar kualitas pelayanan publik.
10. Unit Pelayanan pada Kementerian yang menjadi sampel, 96,4% merupakan unit pelayanan yang termasuk dalam unit pelayanan terpadu, meskipun keterpaduan ini hanya pada tingkat direktorat maupun direktorat jenderal masing-masing bukan pada satu Kementerian.

11. Sebagian besar petugas di Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel sudah menggunakan atribut berupa *IDCard* (kartu identitas) dan berpakaian seragam sebagai tanda suatu bagian di dalam entitas Unit Pelayanan Publik tertentu.
12. Sebagian besar Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel yang diobservasi sebelumnya, saat ini sudah nampak memperbaiki dan melengkapi komponen standar pelayanan publik serta menginformasikan komponen standar pelayanan tersebut pada unit pelayanan publiknya baik secara cetak maupun elektronik.
13. Unit Pelayanan Publik di 5 kementerian yang pada saat observasi I masih berada di zona merah (Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Nakertrans, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sudah melengkapi unit pelayanan publiknya dengan komponen standar pelayanan sehingga pada saat observasi II, 3 unit pelayanan publik sudah masuk ke dalam zona hijau (Kementerian Sosial, Kementerian PU, Kementerian Pertanian) sedangkan unit pelayanan publik di Kementerian Nakertrans dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masuk ke dalam zona kuning.
14. Dari hasil penilaian Observasi I diperoleh komitmen yang tinggi para penyelenggara pelayanan publik untuk segera memperbaiki tingkat kepatuhannya terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Beberapa Kementerian yang pada saat itu memiliki nilai kepatuhan rendah, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial secara aktif berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk menyusun rencana tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan publik. Hasil koordinasi terhadap kedua kementerian menunjukkan bahwa pada Observasi II ini memperoleh nilai yang meningkat secara signifikan sehingga dapat masuk ke dalam zona hijau.

Potret Hasil Pemantauan terhadap Kementerian

Grafik 12
Penelitian Terhadap Kementerian



Berdasarkan hasil monitoring tersebut, Ombudsman RI memberikan saran:

1. Bagi Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel yang belum mengumumkan Maklumat Pelayanan agar segera mengumumkan sebagai janji penyelenggara kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, yang terdiri atas: SOP, Alur Pelayanan, Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan, Persyaratan Pelayanan dan Biaya/Tarif (termasuk pelayanan gratis) sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelayanan publik guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan.
2. Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel yang masuk zona hijau agar mempertahankan dan terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Unit Pelayanan Publik di Kementerian yang menjadi sampel yang masuk zona kuning agar terus berupaya melengkapi kekurangan untuk mencapai standar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Penelitian Kepatuhan Lembaga.

Penelitian kepatuhan terhadap Lembaga dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terhadap 36 (tiga puluh enam) LPNK dan LNS yang menjadi obyek penelitian, sebagai berikut:

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 2) Konsil Kedokteran Indonesia.
- 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 4) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5) Komisi Banding Merek.
- 6) Komisi Banding Paten.
- 7) Badan Standarisasi Nasional.
- 8) Badan Pusat Statistik.
- 9) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- 10) Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- 11) Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 12) Badan Informasi dan Geospasial.
- 13) Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 14) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- 15) Komisi Kejaksaan.
- 16) Komisi Nasional HAM.
- 17) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- 18) Perpustakaan Nasional.
- 19) Komisi Informasi Pusat.
- 20) Komisi Akreditasi Nasional.
- 21) Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- 22) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
- 23) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

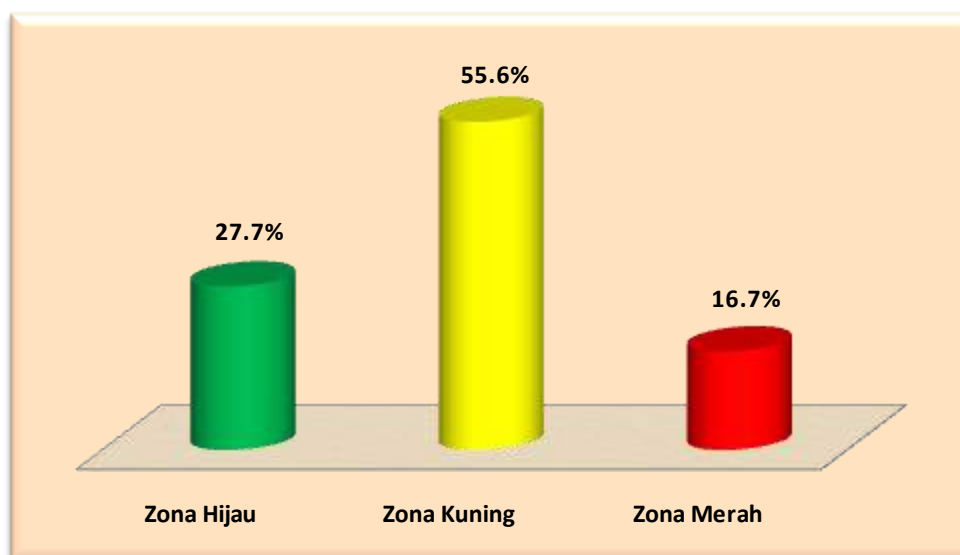
- 24) Badan Amil Zakat Nasional.
- 25) Badan Pertanahan Nasional.
- 26) Dewan Pers.
- 27) Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
- 28) Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- 29) Komite Anti Dumping.
- 30) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
- 31) Komisi Kepolisian Nasional.
- 32) Komisi Penyiaran Indonesia.
- 33) Komisi Nasional Perempuan.
- 34) Badan Olahraga Profesional Indonesia.
- 35) Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- 36) Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Lembaga, ditemukan:

- a. Sebanyak 27,7% atau 10 Lembaga masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Sebanyak 55,6% atau 20 Lembaga masuk kedalam zona kuning atau zona tengah, yang berarti sedang tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Sebanyak 16,7% atau 6 Lembaga masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil penelitian disajikan pada grafik berikut:

Grafik 13
Penelitian Terhadap Kementerian



Saran

- a. Lembaga yang masuk ke dalam zona hijau agar mempertahankan dan terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b. Lembaga yang masuk ke dalam zona kuning agar segera melengkapi kekurangan untuk mencapai standar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Lembaga yang masuk ke dalam zona merah agar segera mengubah tatalaksana pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mensosialisasikan kembali mengenai peran penting Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada seluruh Lembaga Pemerintah khususnya kepada unit penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi dan menginformasikannya kepada masyarakat/pengguna layanan mengenai komponen standar pelayanan publiknya.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Pengawasan Pelayanan
Publik

A. Supervisi Pelayanan Publik

Ombudsman RI melakukan kegiatan supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui penerapan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kegiatan supervisi publik dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Sarana Prasarana

Supervisi dilaksanakan dengan memperhatikan adanya:

- visi, misi, motto pelayanan;
- sarana pengelolaan pengaduan;
- alur pelayanan; dan
- tarif dan lamanya waktu pelayanan.

b. Sumber Daya Manusia

- keterampilan dan kesopansantunan dalam pemberian pelayanan; dan
- kerapihan dan kelengkapan berseragam (tanda pengenal).

c. Temuan Khusus

Temuan khusus ini terkait praktik pungutan liar ataupun calo.

Pada tahun 2013 dilaksanakan supervisi terhadap instansi penyedia layanan publik di 23 (dua puluh tiga) Provinsi, yaitu: Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Lampung.

Instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai sasaran supervisi, meliputi:

1. Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Kantor UPT Samsat.
5. Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
6. Pelayanan di Kantor Urusan Agama.
7. Pelayanan di Kantor Pertanahan.
8. Pelayanan Pelabuhan.
9. Pelayanan di Kantor Imigrasi.
10. Kantor Penerbitan SIM Kepolisian Resor.

Data dan informasi yang diperoleh pada kegiatan Supervisi, digunakan sebagai bahan seminar untuk memberikan masukan dan mendapatkan komitmen instansi penyelenggara pelayanan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan supervisi terhadap instansi penyedia layanan publik, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka perbaikan pelayanan :

- 1) Tenaga medis (dokter dan perawat) dalam memberikan pelayanan belum sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditentukan.
- 2) Keterbatasan jumlah tenaga medis (dokter dan perawat) yang tersedia.
- 3) Keterbatasan ruang inap yang tersedia sehingga masih didapati pasien dirawat di lorong dan teras.
- 4) Kebersihan di lingkungan rumah sakit belum diperhatikan.
- 5) Masih ada pungutan biaya bagi pasien peserta Jamkesmas/Jamkesda.
- 6) Keberadaan ruang tunggu yang belum memadai.
- 7) Masih ada oknum dokter yang meminta uang kepada pasien.
- 8) Peserta Jamkesmas/Jamkesda sering mendapatkan resep yang obatnya tidak tersedia di rumah sakit sehingga harus membeli di luar.
- 9) Penegakan aturan mengenai jam kunjungan bagi keluarga pasien.

b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan :

- 1) Permohonan perijinan masih memerlukan rekomendasi dari SKPD terkait seperti IMB dari Dinas PU dan Cipta Karya.
- 2) Masih terdapat peluang untuk pengenaan biaya di luar yang ditentukan (resmi).
- 3) Belum terpenuhi fasilitas untuk masyarakat berkebutuhan khusus seperti orang cacat, lanjut usia, dan lain-lain.
- 4) Adanya peluang biro jasa dan calo untuk menawarkan pengurusan layanan.
- 5) Adanya jalur di luar prosedur (yang kenal dengan petugas) untuk mempercepat penyelesaian pelayanan.
- 6) Proses penyelesaian pelayanan tidak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, disebabkan harus berkoordinasi dengan SKPD teknis. Selain itu masih terdapat SKPD yang belum masuk dalam layanan perizinan terpadu.
- 7) Map dan formulir permohonan perizinan dibeli di Koperasi KPPT dengan membayar uang tanpa kuitansi.

c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan :

- 1) Masih ada peluang bagi calo dalam pembuatan KTP dan akte kelahiran.
- 2) Adanya pembayaran yang tidak resmi dalam pengurusan/pembuatan KTP dengan waktu penyelesaian lebih cepat dari yang ditetapkan.
- 3) Belum ada jaminan ketepatan waktu penyelesaian dalam pemberian pelayanan.
- 4) Kurangnya informasi mengenai alur pelayanan.
- 5) Tarif pembuatan KTP, masih dirasa memberat warga sehingga perlu dikaji ulang.
- 6) Tidak terdapat layanan untuk masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang cacat, ibu hamil, dan lansia).
- 7) Adanya peluang pungutan biaya melebihi yang ditentukan.
- 8) Adanya calo yang menawarkan jasa pengurusan Akte Kelahiran secara cepat.
- 9) Adanya kerusakan server e-KTP, sehingga masih terdapat warga belum melakukan perekaman data kependudukan.
- 10) Penyelesaian akta kelahiran memerlukan waktu 4 bulan. Selain itu pengurusan surat pindah memerlukan waktu sampai 2 minggu.

d. Kantor UPT Samsat.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan :

- 1) Pembuatan SIM tanpa melalui ujian tertulis dan praktik dengan dipungut biaya tidak resmi.
- 2) Peluang adanya calo dalam pembuatan SIM dan STNK.
- 3) Pembuatan SIM dikenakan biaya melebihi biaya yang resmi.
- 4) Untuk cek fisik kendaraan dikenakan biaya tidak resmi.
- 5) Adanya petugas yang bertindak sebagai calo.
- 6) Terdapat pungutan pengesahan berkas karena identitas pada STNK berbeda dengan KTP.

e. Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan:

- 1) Ada pungutan biaya dalam pengurusan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bebas Bersyarat.
- 2) Petugas tidak melakukan pemeriksaan administratif secara ketat kepada pengunjung.
- 3) Warga Binaan sulit mendapatkan informasi dan akses untuk memperoleh hak Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.
- 4) Petugas meminta uang sewa peralatan kamar dan pembayaran yang ingin keluar kamar di luar jam yang telah ditentukan bagi warga binaan.
- 5) Adanya fasilitas kamar /ruangan bagi suami isteri dengan dikenakan biaya.

- 6) Ekstra vonis diterima terlambat sehingga bebasnya warga binaan tertunda (merugikan hak warga binaan).
 - 7) Adanya pungutan kepada keluarga yang mengunjungi warga binaan oleh Tahanan Pendamping (Tamping).
- f. Pelayanan di Kantor Urusan Agama.
- Hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan adalah bagi masyarakat yang menikah di luar KUA dikenakan biaya tidak resmi baik secara sukarela maupun ditentukan oleh petugas. Hasil konfirmasi kepada petugas diperoleh penjelasan bahwa sampai saat ini untuk perjalanan dinas di luar jam kerja tidak ada anggarannya.
- g. Pelayanan di Kantor Pertanahan.
- Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan:
- 1) Adanya kecenderungan penundaan berlarut dalam pengukuran tanah dan pengurusan sertifikat.
 - 2) Formulir untuk pemecahan dan pengukuran tanah tidak tersedia, namun harus membeli di koperasi yang tidak ada dasar pengaturannya.
 - 3) Adanya peluang pengenaan biaya tidak resmi dalam mengurus sertifikat dalam waktu lebih cepat dari ketentuan yang ada.
 - 4) Terdapat biaya sertifikat yang harus dibayar melebihi ketentuan biaya yang resmi.
 - 5) Ditemui belum tersedia maklumat pelayanan, visi, dan misi.
- h. Pelayanan Pelabuhan
- Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan:
- 1) Menertibkan calon penumpang diwajibkan untuk membeli tiket dan kepada petugas untuk bertindak tegas serta tidak menerima uang sebagai pengganti tiket ketika penumpang sudah berada di atas kapal.
 - 2) Pemeriksaan terhadap muatan truk dan penumpang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.
- i. Pelayanan di Kantor Imigrasi.
- Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan:
- 1) Terdapat sejumlah Biro Jasa dalam hal pelayanan dapat dipercepat.
 - 2) Pengurusan KITAS belum sesuai standar waktu.
 - 3) Masih terdapat pengurusan Paspor dengan biaya melebihi biaya resmi.
 - 4) Kesidiplinan petugas dalam memberikan pelayanan belum maksimal.
 - 5) Ditemui belum tersedia maklumat pelayanan, visi, dan misi.
 - 6) Ruang dan loket untuk masyarakat berkebutuhan khusus belum tersedia.
 - 7) Belum berfungsinya kotak pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan yang diperoleh.

- j. Kantor Penerbitan SIM di Kepolisian Resor
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan:
- 1) Adanya oknum petugas yang menawarkan jasa.
 - 2) Adanya pembuatan sertifikat pelatihan mengemudi tanpa praktik.

Tindak lanjut supervisi:

Sebagai hasil supervisi, dilaksanakan seminar untuk membahas dengan instansi yang menjadi obyek supervisi. Dalam seminar dicapai komitmen instansi penyelenggara pelayanan yaitu:

- a. Semangat untuk meningkatkan pelayanan publik.
- b. Akan memperbaiki kekurangan sesegera mungkin.
- c. Meningkatkan komunikasi dengan penerima layanan.
- d. Melengkapi maklumat dan standar pelayanan agar kualitas pelayanan dapat terjaga dengan baik.
- e. Memperbaiki sarana prasarana layanan.
- f. Memperbaiki hasil supervisi.
- g. Membentuk unit yang menangani pengaduan masyarakat.
- h. Menghentikan pungutan yang tidak mempunyai dasar/aturan.
- i. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan.

Data lengkap kegiatan Penegakan Integritas dan Supervisi Pelayanan Publik, sebagaimana terlampir pada lampiran VI.

B. Investigasi Sistemik

Kegiatan investigasi sistemik yang dilakukan pada tahun 2013 adalah :

- a. Manajemen waktu arus kontainer barang (*Dwelling Time*) di pelabuhan ekspor-impor.
- b. Distribusi Bahan Bakar Solar Bersubsidi untuk Nelayan.
- c. Distribusi pupuk bersubsidi.
- a. Pelayanan rumah sakit dan Puskesmas khususnya pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- c. Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).
- d. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Pelayanan Ibadah Haji.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat
Kegiatan dan Forum
Internasional

A. Forum *International Ombudsman Institute*(IOI *Anti Corruption Training 2013*)

Tiga puluh peserta dari 21 negara termasuk Austria, Swedia, Hungaria, Polandia, Rumania, Norwegia, Swiss, Italia, Nigeria, Thailand, dan Afrika Selatan menghadiri pelatihan pada tanggal 14-19 September 2013 di Laxenburg, Austria. Program ini berfokus pada karya lembaga Ombudsman di seluruh dunia, dan menawarkan inovasi untuk mengembangkan strategi anti-korupsi. Keragaman budaya dan kekayaan pengetahuan di antara lembaga-lembaga yang diwakili, diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kompetensi, dan mengevaluasi prosedur dan langkah-langkah anti-korupsi.



Gambar 10 Forum International Ombudsman Institute (IOI Anti Corruption Training 2013)

B. Konferensi Tahunan *Asian Ombudsman Association*

Bersama delegasi dari 20 negara anggota lainnya, Ombudsman RI dipimpin Hj. Azlaini Agus Wakil Ketua Ombudsman dengan anggota Hendra Nurtjahjo, Ombudsman bidang Pencegahan hadir dan aktif dalam Konferensi ke-13 *Asian Ombudsman Association* (AOA) yang berlangsung tanggal 7-10 Oktober 2013 di Teheran.



Gambar 11 Konferensi Tahunan *Asian Ombudsman Association* di Teheran Iran

Konferensi membahas beberapa topik utama antara lain mengenai upaya bersama menjadikan Ombudsman sebagai lembaga yang profesional dan efisien, memperkuat Ombudsman sebagai lembaga yang terpercaya serta merumuskan visi Ombudsman 2020.

Ombudsman RI menekankan perlunya Ombudsman memperhatikan dampak dari berbagai praktik maladministrasi yang tidak hanya merugikan warga secara finansial, namun juga dapat berakibat fatal seperti hilangnya nyawa akibat tidak dilaksanakannya pengawasan yang baik atas penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparaturnegara.

C. Seminar dan Workshop Internasional (oleh IOI dan AOA)

Seminar Internasional dan Workshop dilaksanakan di Bangkok dari tanggal 2-7 April 2013 dalam rangka memperingati 13 (tiga belas) tahun berdirinya Ombudsman Thai yang diselenggarakan oleh *International Ombudsman Institute* (IOI) dan *Asian Ombudsman Association* (AOA) dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Asisten Ombudsman RI, dan staf pada Setjen Ombudsman RI.

Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan pelatihan penanganan laporan, investigasi dan komunikasi yang efektif.
2. Menambah pengetahuan dengan diskusi terkait penanganan laporan, dan penyusunan laporan sesuai standar Internasional.

D. Kerja Sama dengan *Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)*

Kerja sama ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013 berhubungan dengan perlindungan di bidang ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja Indonesia yang berada di Korea Selatan dan tenaga kerja Korea Selatan yang bekerja di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan jaringan sekaligus memberikan kemudahan dalam menyampaikan aduan apabila tenaga kerja yang berasal dari dua negara itu mengalami perlakuan buruk dalam hal pelayanan publik.



Gambar 12 Pengaduan Warga Korea

E. Studi Banding Persiapan Ajudikasi Khusus kerja sama dengan *AusAid-Commonwealth Ombudsman*

Studi Banding dilaksanakan di Melbourne dan Sydney Australia pada tanggal 28 Agustus – 7 September 2013 dengan peserta 3 (tiga) Asisten Ombudsman.

Hasil yang didapat:

Memperoleh informasi dan masukan persiapan Ajudikasi Khusus Ombudsman RI dengan melakukan kunjungan di Melbourne: *Telecommunications Industry Ombudsman, Electricity and Water Ombudsman Victoria, Financial Ombudsman Service, Victorian Civil and Administrative Appeals Tribunal*; di Sydney: *Meeting with the Administrative Appeals Tribunal, Consumer, Trader, and Tenancy Tribunal*.

F. Penandatanganan Kerja Sama dengan Ombudsman Belanda

Untuk menjalin kerja sama dalam mendorong pelayanan administrasi publik yang baik, dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama pada tanggal 28 November 2013. Jangka waktu kerja sama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2016.



Gambar 13 Penandatanganan Kerja Sama dengan Ombudsman Belanda



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima
Pengawasan Internal

A. Peningkatan Program Anti Korupsi

Pada 2013 telah dilaksanakan peningkatan program anti korupsi dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan program Reformasi Birokrasi. Program anti korupsi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Pakta Integritas.

Penandatanganan Pakta Integritas Anggota Ombudsman dan Kepala Perwakilan, diikuti 7 (tujuh) Anggota Ombudsman, 21 (dua puluh satu) Kepala Perwakilan, dan 2 (dua) Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan dilaksanakan tanggal 26 Februari 2013.

Penandatanganan Pakta Integritas dimaksudkan sebagai perjanjian tidak akan bertindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh; melaporkan kepada pihak terkait apabila mengetahui indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Gambar 14 Penandatanganan Pakta Integritas

2. Penegakan Integritas di Perwakilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Perwakilan Ombudsman RI telah dilakukan penegakan integritas di 23 (dua puluh tiga) Perwakilan di Provinsi, sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| a. Jawa Barat. | m. Kalimantan Timur. |
| b. Daerah Istimewa Yogyakarta. | n. Nusa Tenggara Timur. |
| c. Sumatera Utara. | o. Jawa Barat. |
| d. Sulawesi Selatan. | p. Jawa Tengah. |
| e. Papua. | q. Riau. |
| f. Jawa Timur. | r. Sumatera Barat. |
| g. Bali. | s. Nusa Tenggara Barat. |
| h. Sulawesi Tenggara. | t. Aceh. |
| i. Maluku. | u. Sulawesi Tengah. |
| j. Sulawesi Utara. | v. Sumatera Selatan. |
| k. Kepulauan Riau. | w. Lampung. |
| l. Kalimantan Barat. | |

Secara umum kegiatan sudah terlaksana dan performa kelembagaan mulai meningkat seiring dengan sosialisasi mengenai keberadaan, fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI dan pemberitaan di media massa. Namun demikian, secara teknis dan strategi penanganan laporan perlu ditingkatkan dan lebih mendalam dalam mengkaji dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Pengawasan internal dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian, yaitu:

- a. Kedisiplinan;
- b. Ketertiban dan kerapian kantor;
- c. Ketertiban dalam pengelolaan administrasi pelaporan;
- d. Performa kelembagaan; dan
- e. Penggunaan sarana prasarana kantor.

B. Zona Integritas

Sebagai upaya turut mendorong pencegahan dan pemberantasan di lingkungan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah, Ombudsman RI berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas pada acara Penganjuran dan Penandatanganan Piagam Zona Integritas diselenggarakan antara lain oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Pahlawani, Kabupaten Lampung, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BPK.



Gambar 15 Penganjuran Zona Integritas Provinsi Jawa Timur



Gambar 16 Penandatanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KKN di Lingkungan Kejaksaan RI



Gambar 17 Penandatanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KKN di Lingkungan Kepolisian RI



Gambar 18 Penandatanganan Zona Integritas Pemerintah Kota Manado



Gambar19 Penganangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih, dan Melayani Provinsi Lampung

C. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dilaksanakan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) sebagai bagian strategi komunikasi.

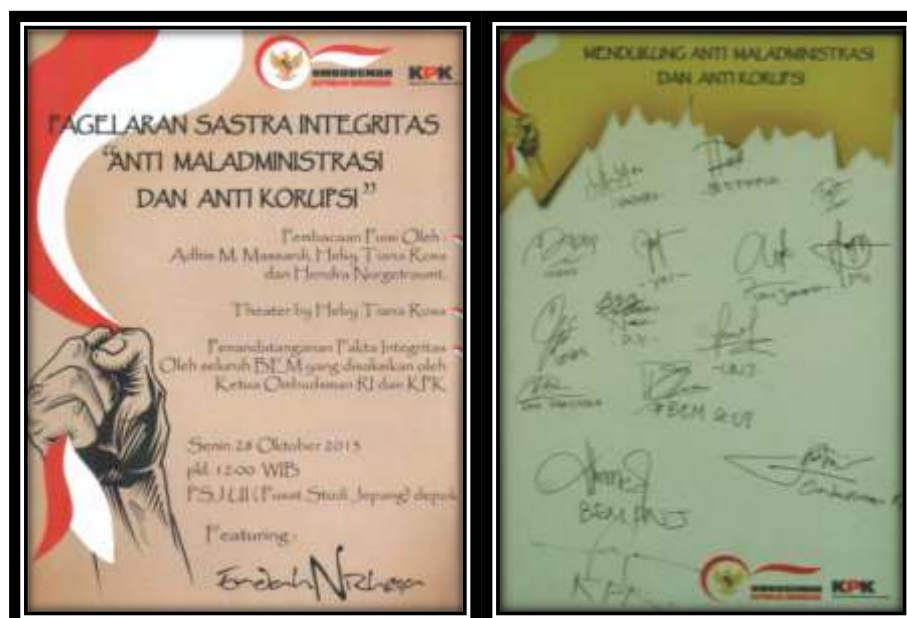
1. Pada tanggal 5 Juli 2013 dilaksanakan pembekalan PBAK dengan peserta Anggota Ombudsman, Kepala Perwakilan Ombudsman seluruh Indonesia, dan Asisten Ombudsman, dengan narasumber dari Sekretariat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Nasional dan Direktorat Komunikasi Publik Kominfo. PBAK bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi bagi Insan Ombudsman sekaligus sebagai pembekalan memberikan pendidikan dan budaya anti korupsi bagi instansi lain.



Gambar 20 Pembekalan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)

2. **Pergelaran Sastra Integritas Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi.**

Dalam rangka diversifikasi kegiatan anti maladministrasi dan anti korupsi, pada hari Senin 28 Oktober 2013 dilaksanakan pentas sastra integritas di Universitas Indonesia dengan peserta berbagai BEM Mahasiswa se-Jabodetabek. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerja sama antara Ombudsman RI dengan KPK. Pada kesempatan tersebut ditandatangani pakta integritas mahasiswa untuk “anti maladministrasi dan anti korupsi”.



Gambar 21 Pagelaran Sastra Integritas Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi

D. Majelis Kehormatan Ombudsman RI

Guna menjunjung tinggi integritas, kejujuran, kesetiaan, kepatuhan, kebenaran, dan keadilan pada tahun 2011 ditetapkan Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman. Sebagai pelaksanaan Peraturan tersebut, pada tahun 2013 dibentuk Majelis Kehormatan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Insan Ombudsman, dengan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 102/ORI-SK/X/2013 tentang Pembentukan dan Penetapan Majelis Kehormatan Ombudsman Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Insan Ombudsman.

Hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Presiden dan Ketua DPR RI dengan surat Ketua Ombudsman Nomor 1412/ORI-SRT/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keenam

Dukungan Fasilitatif

A. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman RI dibantu oleh Asisten. Dalam rangka mendekatkan masyarakat mengakses pelayanan Ombudsman RI, diberi mandat untuk membentuk Perwakilan Ombudsman RI di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 diundangkan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa Ombudsman RI dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010. Mengacu pada ketentuan tersebut, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Manajemen SDM merupakan proses pembinaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemensiunan/pemberhentian sebagai berikut:

1. Rekrutmen SDM

Pada Tahun 2013, Ombudsman RI melaksanakan rekrutmen SDM yang terdiri atas Kepala Perwakilan, Asisten di perwakilan, dan CPNS. Rekrutmen Kepala Perwakilan dan Asisten di perwakilan untuk mengisi perwakilan di 9 provinsi yaitu: Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Kesembilan perwakilan tersebut masing-masing direkrut satu orang Kepala Perwakilan dan 3 orang Asisten.

Pada tahun 2013 untuk pertama kali Ombudsman RI melaksanakan penerimaan CPNS, dengan resume sebagai berikut:

Tabel 10
Rekrutmen CPNS

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Usul Formasi	156
2.	Formasi	17
3.	Jumlah Pendaftar	91
4.	Lulus Seleksi Administrasi	67
5.	Lulus Seleksi TKD/CAT	13
6.	Formasi Tidak Terisi	4

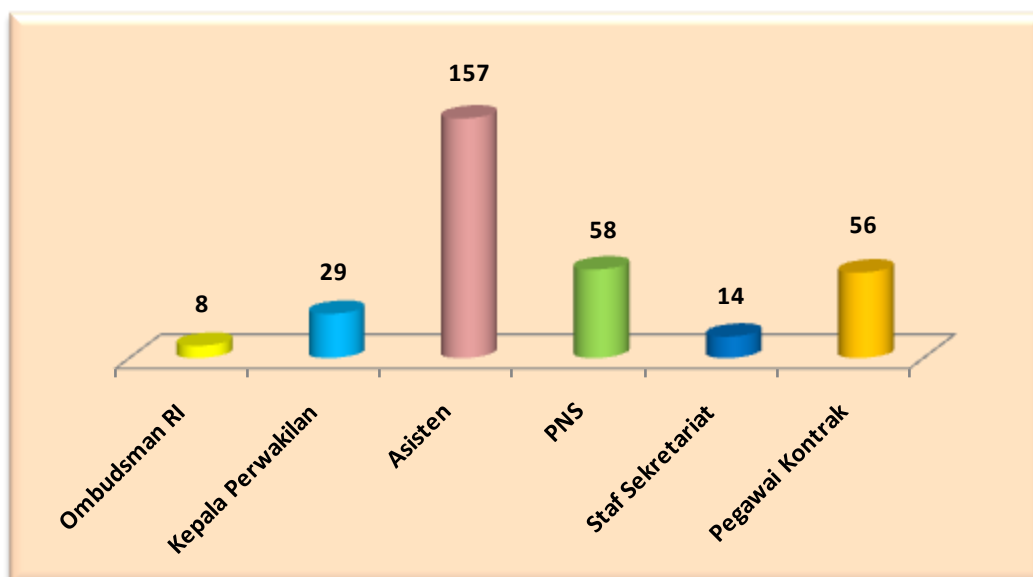
2. Komposisi SDM Ombudsman RI

Ombudsman RI pada akhir tahun 2013 didukung sumber daya manusia sejumlah 322 orang yang terdiri atas Anggota Ombudsman, Asisten, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai kontrak. Komposisi SDM Ombudsman RI disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 11
Komposisi Pegawai Ombudsman RI

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman	8
2	Kepala Perwakilan	29
3	Asisten	157
4	PNS	58
5	Staf Sekretariat	14
6	Pegawai Kontrak	56
Jumlah		322

Grafik 14
Komposisi Pegawai Ombudsman RI



3. Pemberhentian

Pada tahun 2013, salah seorang anggota Ombudsman RI yaitu Dr. Ibnu Tricahyo wafat, sehingga anggota Ombudsman RI periode 2013-2016 berjumlah 8 orang. Selain itu, terdapat satu orang PNS yang memasuki masa purnabakti dan 8 Asisten berhenti.

B. Keuangan

Pada tahun 2013, Ombudsman RI mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp67.676.739.000,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI. Pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Ombudsman RI mendapatkan tambahan berupa penghargaan hasil optimalisasi anggaran tahun 2012 sebesar Rp117.856.000,00. Pada bulan Desember 2013 mendapatkan tambahan alokasi anggaran tunjangan kinerja PNS dari BA BUN sebesar Rp1.062.584.000,00, sehingga anggaran Ombudsman RI pada akhir tahun 2013 menjadi Rp68.857.179.000,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Sampai akhir tahun, realisasi anggaran sebesar Rp65.112.152.287,00 (enam puluh lima miliar seratus dua belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 94,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
	OMBUDSMAN RI	68.857.179.000	65.112.153.381	94,56
I.	Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama	18.603.951.000	17.910.395.090	96,27
	A. Perencanaan dan Pelaporan	3.690.973.000	3.511.941.620	95,15
	B. Pencegahan	8.760.855.000	8.595.285.691	98,11
	C. Kerja Sama	2.326.286.000	2.219.593.439	95,41
	D. Pengawasan	3.825.837.000	3.583.574.340	93,67
II.	Pengelolaan Administrasi Laporan	11.176.808.000	10.796.690.639	96,60
	A. Informasi dan Humas	5.195.928.000	4.919.154.140	94,67
	B. Penyelesaian Laporan	5.980.880.000	5.877.536.499	98,27
III.	Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan	39.076.420.000	36.405.067.652	93,16
	A. Pengembangan SDM	459.320.000	444.157.000	96,70
	B. Layanan Perkantoran	32.160.920.000	29.626.165.847	92,12
	C. Kendaraan Bermotor	859.020.000	846.570.405	98,55
	D. Perangkat pengolah data dan komunikasi	300.000.000	298.500.000	99,50
	E. Peralatan dan fasilitas perkantoran	5.057.849.000	4.967.186.400	98,21
	F. Gedung/bangunan	239.311.000	222.488.000	92,97

C. Manajemen Aset

Peningkatan pengelolaan BMN terus dilaksanakan Ombudsman RI dengan menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi temuan pemeriksaan BPK. Selain langkah tersebut, juga dilaksanakan langkah preventif dengan melakukan evaluasi data laporan BMN guna menghindari dan memperbaiki permasalahan yang berpotensi menjadi temuan berulang BPK. Peningkatan kualitas laporan BMN merupakan hasil tindak lanjut terhadap kebijakan pengelolaan aset yang telah dilaksanakan Ombudsman RI dalam rangka mempertahankan opini BPK yakni “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” sejak tahun 2012, yaitu:

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi perbedaan data koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN.
2. Mengajukan permintaan Aset BMN yang tidak terpakai pada Kementerian/ Lembaga, antara lain:
 - a. Tanah milik BPKP Provinsi Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Mengajukan permohonan atas aset yang tidak terpakai pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Nilai Aset Ombudsman RI:

Tabel 13
Nilai Aset Ombudsman RI

NO	JENIS	TA 2012	TA 2013	TAMBAH/ KURANG
1	Peralatan dan Mesin	12.501.585.010	22.205.743.170	9.704.158.160
2	Aset Tetap Lainnya	377.142.800	1.037.727.925	660.585.125
Jumlah		12.878.727.810	23.243.471.095	10.364.743.285
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			(8.980.130.844)	(8.980.130.844)
Nilai Buku Aset Tetap		12.878.727.810	14.263.340.251	1.384.612.441



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketujuh

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman RI dimulai sejak tahun 2012 yang dikelola Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh unit organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

A. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran dan capaian Reformasi Birokrasi Ombudsman RI tahun 2013 meliputi peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik, kinerja birokrasi, dan pelayanan publik.

1) Visi, Misi, dan Nilai-nilai

Visi Reformasi Birokrasi yang hendak dicapai oleh Ombudsman RI (Sekretariat Jenderal) adalah mewujudkan dukungan administratif prima kepada Ombudsman RI. Upaya untuk mencapai visi ini dituangkan ke dalam misi berikut ini.

- a) Penyelenggaraan perencanaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan, dan kerja sama.
- b) Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan hukum, hubungan masyarakat, pelayanan laporan, dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi.
- c) Penyelenggaraan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan dukungan tersebut ditetapkan nilai-nilai SOLUSI yaitu Sopan, Lugas, dan Sigap. Ketiga nilai tersebut mewakili unsur kompetensi yaitu sikap (*attitude*), pengetahuan/profesional (*knowlegde*), terampil (*skill*).

2) Peningkatan Kinerja Birokrasi

Peningkatan kinerja birokrasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI berorientasi kepada hasil dilakukan melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi. Langkah aktual yang ditempuh adalah dengan meningkatkan profesionalitas dan integritas birokrasi melalui:

- a) penguatan peraturan perundang-undangan;
- b) perubahan perilaku;
- c) penataan organisasi dan tatalaksana;
- d) penerapan budaya organisasi;
- e) penataan manajemen SDM;
- f) penguatan akuntabilitas;
- g) peningkatan kualitas pelayanan publik, dan
- h) penerapan sistem monitoring, evaluasi, dan pengawasan kinerja birokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat.

3) Peningkatan Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar birokrasi di lingkungan Ombudsman RI dapat melayani *stakeholders* yang heterogen sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh proses pelayanan publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan rasional. Untuk mengadaptasi dinamika masyarakat, maka konsep dan sistem yang digunakan dievaluasi dan disempurnakan secara terus-menerus.

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI dalam bidang pelayanan publik termasuk pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), PPID untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

4) Penataan Organisasi

Penataan organisasi dilakukan untuk membangun organisasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan. Tujuan penataan organisasi adalah mewujudkan organisasi yang lebih efektif, efisien, responsif, transparan, akuntabel, *check and balances*, dan *right sizing*, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi *stakeholders*.

Upaya yang telah ditempuh dalam penataan organisasi, meliputi:

- a) pengumpulan data dan analisis;
- b) pembahasan internal Sekretariat Jenderal Ombudsman RI;
- c) Usulan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI; dan
- d) Pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penataan organisasi secara prinsip belum disetujui oleh Kementerian PAN dan RB, namun secara bertahap akan diusulkan kembali. Penataan organisasi yang diusulkan meliputi:

- a) Pembentukan Sekretariat pada Perwakilan Ombudsman RI;
- b) Penempatan Unit Inspektorat yang Mandiri; dan
- c) Penyebaran Beban Kerja secara Proporsional.

B. Capaian Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014, Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi gelombang kedua. Proses reformasi birokrasi dilakukan penilaian oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim *Quality Assurance* yang meliputi antara lain :

- a) Dokumen usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi.
- b) Sembilan Program Reformasi Birokrasi, yaitu:
 - i. Manajemen Perubahan.
 - ii. Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - iii. Penataan dan Penguatan Organisasi.
 - iv. Penataan Tata Laksana.
 - v. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
 - vi. Penguatan Pengawasan.
 - vii. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
 - viii. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - ix. Monitoring dan Evaluasi.

Pada saat dilakukan penilaian baik administrasi maupun pada verifikasi lapangan, diperoleh nilai sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan	=	43
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan	=	51
c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi	=	35
d. Penataan Tatalaksana	=	33
e. Penataan system SDM Aparatur	=	36
f. Penguatan Pengawasan	=	42
g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	=	35
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	=	42
i. Monitoring dan Evaluasi	=	<u>32</u>
Skor rata-rata	=	39



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedelapan

Penghargaan

Salah satu keberhasilan Ombudsman RI adalah dalam pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 2013, BPK memberi opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan Ombudsman RI. Opini WTP ini diperoleh Ombudsman RI dua tahun berturut-turut. Hal tersebut merupakan dukungan bagi perbaikan pengelolaan keuangan tahun berikutnya.



Gambar 22 Penghargaan Ombudsman RI



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan disusun sebagai gambaran secara umum pelaksanaan, fungsi, tugas, wewenang Ombudsman RI. Pengembangan kelembagaan Ombudsman RI harus terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk itu Ombudsman RI memerlukan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan publik, instansi penyelenggara pelayanan publik dalam merespon tindak lanjut Ombudsman RI, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat mitra kerja Ombudsman RI dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KEGIATAN INVESTIGASI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
1.	Investigasi atas inisiatif.	4,7,23 Januari	1. Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju di Kabupaten Lombok Barat. 2. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Rumah Sakit Daerah Kota Mataram. 4. Rumah Sakit Umum Praya Lombok Tengah. 5. Rumah Sakit Umum dr R Soedjono, Lombok Timur.
2.	Investigasi laporan mengenai belum dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 67/Pdt.G/1997/PN. Jakarta Selatan.	8 Januari	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3.	Investigasi atas prakarsa sendiri mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung.	9 Januari	Pemerintah Kota Bandung.
4.	Investigasi laporan Guru PAUD Kec.Koto Tangah Padang yang mengeluhkan mengenai aturan yang disampaikan penilik Koto Tangah terkait izin yang harus digunakan tanpa ada menunjukkan aturan yang jelas.	9 Januari	Dinas Pendidikan Kota Padang.
5.	Investigasi laporan warga kelurahan Kukusan Depok mengenai dugaan penyimpangan prosedur pembebasan lahan yang terkena proyek tol Cijago.	11 Januari	1. Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kota Depok. 2. Tim Pengadaan Tanah Kota Depok.
6.	Investigasi ke Sekolah SD Negeri 060926.	14 Januari	Dinas Pendidikan Kota Medan.
7.	Investigasi laporan mengenai penundaan berlarut penerbitan sertifikat tanah di BPN Kota Padang.	16 Januari	Badan Pertanahan Kota Padang.
8.	Investigasi dampak kebijakan pelarangan terhadap truk melintas di jalan umum berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 540/354/dishubkominfo 2012.	16, 17, 18 Januari	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9.	Investigasi laporan permasalahan transaksi di Bank Mandiri.	18 Januari	Bank Mandiri Kantor Cabang Lap.Imam Bonjol Padang.
10.	Investigasi pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan pungutan liar TPP.	20-23 Januari	Dinas Pendidikan Kab Trenggalek.
11.	Investigasi laporan masyarakat.	20-23 Januari	1. KPP Pratama Mojokerto. 2. Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Jombang. 3. Kantor Kecamatan pulung Kab Ponorogo.
12.	Investigasi laporan masyarakat terkait ganti rugi tanah atas tanah Partikelor.	20-23 Februari	1. Kantor Pelayanan Perijinan Kab Banyuwangi. 2. Kantor Pertanahan Kab Banyuwangi. 3. Polres Banyuwangi.
13.	Investigasi Ke Kantor PD Pasar Kota Medan.	28,29 Januari	PD Pasar Kota Medan.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
14.	Investigasi laporan dugaan penundaan berlarut terkait bantuan kecelakaan kerja oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kab Tuban.	28-31 Januari	1. Dinas pendidikan Kab Tuban. 2. Dinas Sosial dan Ketenakerjaan Kab Tuban. 3. Polres Gresik.
15.	Investigasi Ke kantor Dinas Pendidikan Kota Medan.	29 Januari	Dinas Pendidikan Kota Medan.
16.	Investigasi laporan masyarakat.	28-31 Januari	1. Polres Gresik. 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Tuban. 3. Dinas Pendidikan Kab Tuban.
17.	Investigasi laporan dugaan penyimpangan prosedur terkait saksi pada akta kelahiran.	30 Januari	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.
18.	Investigasi guna mendapatkan tambahan informasi serta fakta di lapangan mengenai kondisi rumah pelapor dan kegiatan proyek gedung yang diduga menyalahi izin terkait proyek pembangunan tanpa papan IMB.	31 Januari	Dinas Perijinan.
19.	Investigasi ke Kantor Balai Besar Jalan Nasional-I Kementerian Pekerjaan Umum.	31 Januari	Balai Besar Jalan Nasional-I Kementerian Pekerjaan Umum.
20.	Investigasi ke Jembatan Timbang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.	4-7 Februari	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
21.	Investigasi adanya pungutan liar untuk pembangunan pagar sekolah, uang buku dan uang les pada SMU Negeri 6 Kendari.	5-8 Februari	SMU Negeri 6 Kendari, Sulawesi Tenggara.
22.	Investigasi laporan pengadaan seragam peserta didik baru SLTP Kab Klaten.	5-8 Februari	Dinas Pendidikan Kab Klaten.
23.	Kunjungan dalam rangka investigasi ke Kantor Wilayah BPN Jakarta mengenai belum terealisasinya permasalahan tanah sertifikat HGB 1187 a.n PT. Angkasa Interland dan belum dibayar ganti kerugian atas tanah pelapor.	7 Februari	Kantor Wilayah BPN Jakarta
24.	Investigasi Ke Kantor Walikota Medan.	8 Februari	Pemerintah Kota Medan.
25.	Investigasi laporan dugaan penyelewengan pengadaan laptop di SD se Kabupaten Boyolali.	11-12 Februari	Dinas Pendidikan Kab Boyolali.
26.	Investigasi laporan masyarakat atas permohonan IMB yang belum dikeluarkan BP2TPM.	11-14 Februari	BP2TPM Kota Baru, Kalimantan Selatan.
27.	Investigasi laporan masyarakat mengenai : - Pungutan biaya administrasi SMA N I Wonogiri. - Pungutan biaya les SD Krajan Solo. - Penundaan eksekusi. - Penyimpangan penjualan kas desa Blulukan .	11-14 Februari	1. Dinas Pendidikan Kab Boyolali. 2. Pemerintah Kabupaten Boyolali. 3. PN Surakarta.
28.	Investigasi laporan masyarakat berkenaan dengan pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun sebagai PNS melalui SK Gubernur No.880/440/bkd/-2004.	13 Februari	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
29.	Investigasi laporan : - Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka. - Permasalahan status tanah Blok Baligo Desa Pagandon Kab Majalengka.	12-15 Februari	1. Kantor Pertanahan Kab Majalengka. 2. DPKAD Kab Majalengka. 3. PN Majalengka. 4. Polres Majalengka.
30.	Investigasi adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan program transmigrasi.	19-21 Februari	Disnakertrans Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
31.	Investigasi laporan mengenai : 1. Keputusan Kuwu perihal pemberhentian Kep Dusun I Desa Bakung Lor tanpa alasan jelas.	19-22 Februari	1. Pemerintah Kabupaten Indramayu. 2. Polres Indramayu.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	2. Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Kuwu Desa Kreyo Kab Cirebon terhadap Kaur Pemerintah Desa Kreyo. 3. Belum dikeluarkannya ijin pemeriksaan terhadap Kuwu Desa Parean Girang, Kab Indramayu yang dikirim oleh Polres Indramayu. 4. Pembiaran parkir yang dikuasai oleh preman di Kota Cirebon.		3. Pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Dinas Perhubungan , Informatika dan Komunikasi Pemerintah Kota Cirebon.
32.	Investigasi laporan dugaan adanya maladministrasi.	19-22 Februari	1. Pemerintah Kab Jeneponto. 2. Pemerintah Kab Bantaeng. 3. Polres Bulukumba. 4. Pertanahan Bulukumba. 5. Lapas Bulukumba. 6. Dinas Dukcapil Kab Sinjai.
33.	Investigasi laporan mengenai pelayanan Kepolisian Polsek Godong.	20 Februari	Polsek Godong.
34.	Investigasi laporan : 1. Terkait intimidasi oknum anggota Polsek Kalibaru terhadap Pelapor 2. Terkait permohonan IMB, HO, SIUP, TDP di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kab Banyuwangi.	20-23 Februari	1. Polsek Kalibaru. 2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab Banyuwangi.
35.	Investigasi laporan mengenai Koperasi karyawan Divre II PT. Pos Indonesia dan laporan mengenai keputusan mutasi dan surat peringatan pertama dari Kepala Area SDM Divre II PT. Pos Indonesia.	21 Februari	PT. Pos Indonesia Padang.
36.	Investigasi laporan dugaan penyimpangan prosedur dalam pengangkatan Kepala kantor Kementerian Agama Kab Tabalong.	22 Februari	Kementerian Agama.
37.	Investigasi lap dugaan penyimpangan prosedur oleh Kepala SMKN 01 Barabai terkait pemberhentian sejumlah siswa.	4-7 Maret	Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai
38.	Investigasi laporan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	6-7 Maret	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
39.	Investigasi laporan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagai guru di Madrasah Aliyah 2 Kota Padang dan pemindahan ke pengadministrasi Umum Seksi Panamas Kantor Kemenag Kota Padang.	11 Maret	Sekolah MAN 2 Padang.
40.	Investigasi laporan terkait penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.	13 Maret	Kementerian Hukum dan HAM.
41.	Investigasi laporan mengenai pelayanan PT Indosat Jawa Tengah.	14 Maret	PT Indosat Jawa Tengah.
42.	Investigasi laporan dugaan penyimpangan prosedur mutasi seorang dokter bedah yang bernama yakob M oleh BKD Tanah Bumbu dan Dinkes Tanah Bumbu.	18-21 Maret	1. BKD Tanah Bumbu. 2. Dinas Kesehatan Tanah Bumbu.
43.	Investigasi laporan mengenai dugaan penundaan berlarut dan sikap keberpihakan dalam pemilihan Kepala Desa Kopah Kec Kuantan Tengah Kab Kuantan Sengingi yang belum ada pengesahan dan pelantikan.	18-21 Maret	Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi.
44.	Investigasi laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penangkapan dan penahanan yang tidak patut yang dilakukan oleh Polres Bengkalis terhadap Pelapor.	18-21 Maret	Polres Bengkalis
45.	Investigasi laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatutan dalam validasi dan verifikasi honorer kategori satu (K-1) di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.	18-22 Maret	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
46.	Investigasi laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatutan dalam validasi dan verifikasi honorer kategori satu (K-1) di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.	19 Maret	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
47.	Investigasi laporan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Disnakertrans DKI Jakarta terkait tidak diprosesnya pencatatan perselisihan kerja dan anjuran serta pelimpahan wewenang ke pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.	20 Maret	Disnakertrans DKI Jakarta.
48.	Investigasi laporan mengenai kinerja penyidik Polresta Medan dalam penanganan laporan Polisi Nomor Pol: TBL/937/XI/2011/SPKT III tanggal 22 November 2011 dan Laporan Polisi Nomor Pol 2483/K/IX/2012 SPKT RESTA MEDAN tanggal 14 September 2012.	21-22 Maret	Polresta Medan.
49.	Investigasi laporan mengenai pelayanan di Polres Grobogan.	25 Maret	Polres Grobogan.
50.	Investigasi laporan mengenai kinerja penyidik Polresta Medan dalam penanganan laporan Polisi Nomor Pol: TBL/937/XI/2011/SPKT III tanggal 22 November 2011 dan Laporan Polisi Nomor Pol : 2483/K/IX/2012 SPKT RESTA MEDAN tanggal 14 September 2012.	25-27 Maret	Polresta Medan.
51.	Investigasi laporan mengenai permintaan uang dalam proses penerbitan/pembuatan buku nikah di KUA Bolaang Uki.	26-28 Maret	Kantor Urusan Agama Bolaang Uki.
52.	Investigasi laporan mengenai dugaan penundaan berlarut dan sikap keberpihakan dalam pemilihan Kepala Desa Kopah Kec Kuantan Tengah Kab Kuantan Sengingi yang belum ada pengesahan dan pelantikan.	26-28 Maret	Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi
53.	Investigasi laporan terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Pencairan beasiswa mahasiswa UT lewat BNI Jombang di Lingkungan Dinas Pendidikan yang dipending • Pungutan liar TPP guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kab Trenggalek. 	26-29 Maret	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
54.	Investigasi laporan masyarakat.	27 Maret	Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang.
55.	Investigasi laporan Penerbitan sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik lahan.	1-4 April	BPN Kab Poso
56.	Investigasi laporan mengenai belum adanya ganti rugi atas tanah di atas bangunan SDN 3 dan SDN 5 kasiguncu Poso	1-4 April	1. BPN Kab Poso. 2. Pemerintah kabupaten Poso.
57.	Investigasi laporan mengenai belum adanya tindak lanjut Perjanjian Penyelesaian Sengketa Nomor PPS/05/XII/2008/PPSK tanggal 29 Desember 2008 yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan masyarakat penggarap tanah eks PT Kemenyan berkenaan dengan pemberian status atas tanah warga.	2-5 April	1. Pemerintah Provinsi Jambi. 2. Kanwil badan Pertanahan Provinsi Jambi. 3. Kantor Pertanahan Kab Muaro Jambi.
58.	Investigasi laporan mengenai 8 (delapan) orang yang dinyatakan lulus CPNSD namun belum menerima Surat Keputusan sebagai CPNSD.	2-5 April	Setda Tanjung Jabung.
59.	Investigasi terkait tidak adanya tindak lanjut atas penyelesaian konflik lahan antara warga desa dengan satu perusahaan kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	2-5 April	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung.
60.	Investigasi laporan dugaan tidak diberikannya pelayanan oleh Polres Purwakarta dan BLHD Kab Purwakarta perihal pencemaran lingkungan oleh PT Indo Bharat Rayon.	2-5 April	1. Polres Purwakarta 2. BLHD Kab Purwakarta

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
61.	Investigasi laporan mengenai pengurusan akte jual beli tanah yang dipersulit wali nagari Sumpur dan dugaan Camat dan Bupati yang tidak memberikan penjelasan kepada Pelapor.	2-5 April	1. Wali Nagari Sumpur. 2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
62.	Investigasi laporan masyarakat.	3 April	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
63.	Melakukan investigasi laporan terkait pengangkatan pejabat struktural di Kab. Purbalingga.	4 April	Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
64.	Investigasi laporan mengenai dugaan penundaan berlarut penyelesaian ganti rugi pada proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTO Mataloko Daratei).	8 April	PT PLN
65.	Investigasi terkait penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelayanan BPN kanwil Jateng.	8 April	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
66.	Investigasi laporan mengenai pelayanan pada Badan Pertanahan nasional Provinsi Jawa Tengah	8-10 April	Badan Pertanahan nasional Provinsi Jawa Tengah.
67.	Investigasi atas inisiatif sendiri (<i>Own Motion Investigation</i>) terkait dugaan banyaknya penerbitan KTP asli tapi palsu di Kabupaten Blora.	8-10 April	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Blora.
68.	Investigasi terkait laporan masyarakat di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun.	9-12 April	1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Pematang Siantar. 2. Kantor Kelurahan Tiga balata. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
69.	Investigasi laporan penundaan berlarut atas laporan ke Polres Bolaang Mongondow.	9-12 April	Kepolisian Resor Bolaang Mongondow.
70.	Investigasi laporan Persatuan Wartawan Indonesia cabang Yogyakarta tentang kasus pembunuhan Alm Udin.	10-13 April	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
71.	Investigasi laporan penundaan berlarut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait penyalahgunaan trayek Bus Koantas Bima jurusan Kampung Rambutan-Ciputat.	10-11 April	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
72.	Investigasi laporan terkait penetapan kuota dan pendistribusian minyak tanah bersubsidi tahun 2011 dan 2012 di wilayah Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.	11 April	Pertamina UPMS I Medan.
73.	Investigasi laporan terkait pengajuan pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan oleh Koperasi Nelayan 45 wilayah Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2006.	11 April	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
74.	Investigasi laporan tindakan sewenang-wenang terkait surat Walikota Depok yang menyatakan ayah Pelapor tercantum dalam catatan eks tahanan G.30.S/PKI Golongan C2.	15 April	Pemerintah Kota Depok.
75.	Investigasi laporan dugaan adanya pungutan liar di SMPN I Bitung.	15-17 April	Dinas Pendidikan Kota Bandung SMPN I Bitung.
76.	Investigasi atas inisiatif sendiri terhadap layanan Puskesmas di Kabupaten Baritio Kuala.	15-18 April	Puskesmas di Kabupaten Barito Kuala.
77.	Investigasi laporan mengenai mutasi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	15-18 April	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
78.	Investigasi laporan dugaan penundaan berlarut oleh BPN Pasaman Barat dalam penerbitan sertifikat tanah.	15-18 April	Badan Pertanahan Kota Padang.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
79.	Investigasi laporan dugaan tidak diberikan pelayanan oleh Polres Cimahi perihal pencemaran lingkungan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.	16 April	Polres Cimahi.
80.	Investigasi laporan Lembaga Pengkajian Percepatan Pembangunan Daerah NTB (LP3D) berkenaan dengan dugaan penyimpangan prosedur dalam penerbitan HGB No. 35 Tahun 1996 yang diberikan kepada PT Wanawisata Alam Hayati.	17 April	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
81.	Investigasi laporan dugaan tindakan sewenang-wenang aparat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengenai prakarsa dan usulan perubahan status Desa Gerung Utara menjadi Kelurahan.	17 April	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
82.	Investigasi laporan dugaan penyimpangan prosedur dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202 di Orong Karang Atas, Dusun Prawira, Kec tanjung Kab Lombok Utara.	18 April	1. Kantor Pertanahan Lombok Utara 2. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
83.	Investigasi laporan terkait penerbitan sertifikat pronas.	18-20 April	BPN Kabupaten Minahasa.
84.	Investigasi laporan mengenai penyimpangan prosedur oleh jajaran Pengadilan Negeri Ketapang dalam proses pengiriman berkas permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI	24 April	Pengadilan Negeri Ketapang.
85.	Investigasi laporan dugaan adanya penundaan berlarut oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap laporan polisi no. LP/224-B/III/2009, LP/227-B/III/2009 dan LP/228-B/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Direksi Benua Indah Grup (BIG).	24 April	Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
86.	Investigasi laporan mengenai ijin pengelolaan lahan stren kali di Kabupaten Sumenep.	24-27 April	1. Pemerintah Kabupaten Sumenep. 2. Dinas Perhubungan kabupten Sumenep 3. Kantor Pertanahan kabupaten Sumenep.
87.	Investigasi laporan mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan di RSJ Banda Aceh.	25 April	RSJ Banda Aceh
88.	Investigasi laporan terkait pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang terkena proyek pengendalian Banjir Kanal Timur (BKT) sesuai data inventarisasi peta 1 s.d 6 seluas 24.131 m2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur diberikan kepada pihak yang diduga tidak berhak.	25 April	Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
89.	Investigasi laporan mengenai belum adanya kepastian penyelesaian dari Mahkamah Agung terkait laporan mengenai bukti-bukti novum yang diajukan dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor: 253PK/Pdt/2005 yang telah diputus pada tanggal 30 Juni 2006 namun tidak dipertimbangkan dan tidak terlampir dalam berkas.	25 April	Mahkamah Agung.
90.	Investigasi laporan mengenai penggusuran sepihak lahan seluas 20.000 Ha di Desa Beramas, Kec Subah Kab Sambas.	26 April	Pemerintah Kabupaten Sambas.
91.	Investigasi laporan mengenai proses penerbitan akte nikah	29 April-1 Mei	Kantor Catatan Sipil Minahasa.
92.	Investigasi terkait penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelayanan Polsek Godong.	1 Mei	Kepolisian Sektor Godong.
93.	Investigasi terkait laporan masyarakat terhadap pelayanan Jampersal di RS. Permata Bunda Kab. Grobogan.	1 Mei	RS. Permata Bunda Kab. Grobogan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
94.	Investigasi laporan mengenai pelayanan di Pelabuhan Gresik yang dikelola oleh PT Pelindo 3 Cabang Gresik.	1-4 Mei	1. PT Pelindo III Cabang Gresik. 2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 3. Satpol PP Kabupaten Gresik. 4. Pemerintah Desa Banjarsari Cerme Gresik.
95.	Investigasi laporan mengenai pembangunan SPBU di Kota Pekanbaru.	7 Mei	1. Pemerintah Kota Pekanbaru. 2. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. 3. PT Pertamina (Persero).
96.	Investigasi laporan pelayanan di Bagian IMB Kota Tangerang terkait tidak diberikannya fotocopy IMB duster aurora PT Alam Sutera Reality.	10 Mei	Pemerintah Kota Tangerang.
97.	Investigasi laporan terkait pelayanan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau.	10 Mei	1. Kepolisian Daerah Riau. 2. Kepolisian Resor Kampar. 3. Kepolisian Resor Pelalawan. 4. Kepolisian Sektor Kampar Kiri. 5. Kepolisian Sektor Uku.
98.	Investigasi laporan dugaan penyimpangan prosedur oleh BKD Kota Tangerang terkait keluarnya surat izin cerai karena tuduhan KDRT.	10 Mei	BKD Kota Tangerang.
99.	Investigasi laporan dugaan penundaan berlaut Laporan Polisi Nomor LP/4212/K/X/2011/Resta Tangerang.	10 Mei	Polres Tangerang.
100.	Investigasi laporan dugaan penyimpangan prosedur pembebasan lahan yang terkena proyek jalan Tol Cijago.	13 Mei	Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kota Depok.
101.	Investigasi laporan dugaan adanya pungutan liar terhadap Honorer K2.	13-16 Mei	BKD Bolaang Mongondow.
102.	Investigasi laporan mengenai sengketa pengelolaan obyek wisata Gua Pindul.	14 Mei	Pemerintah Desa Bejiharjo, Gunung Kidul.
103.	Investigasi terkait standar pelayanan dan penetapan tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2007 pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.	15 Mei	Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
104.	Investigasi laporan mengenai penyelesaian permasalahan tanah garapan warga yang diambil perusahaan.	15-18 Mei	Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur.
105.	Investigasi laporan mengenai pembangunan gereja diatas tanah yang dihibahkab kepada Pelapor.	15-18 Mei	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
106.	Investigasi laporan mengenai pencemaran kebun akibat aktivitas penambangan batu bara.	15-18 Mei	Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
107.	Investigasi laporan mengenai pembayaran biaya praktikum setiap bulan dan kurang maksimal pelayanan perpustakaan pada STAIN Palangkaraya.	15-18 Mei	STAIN Palangkaraya.
108.	Investigasi laporan tindak lanjut penyelesaian laporan Polisi No. Pol : LP/04/VII/2006 dan No Pol : 32/VIII/2009/SPK tanggal 7 Agustus 2009 yang ditangani Polres Kolaka Utara yang tidak mendapat kepastian penyelesaiannya.	15-18 Mei	Polres Kolaka Utara.
109.	Investigasi laporan kasus kriminalitas Serikat Tani Nasional a.n Agus Pranata dan Saharudin diduga Polisi bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan sebagai tersangka.	15-18 Mei	Polres Kolaka Utara.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
110.	Investigasi laporan kasus peredaran video asusila dengan pasal pencabulan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan ke Polsek Parigi Kab Muna belum mendapat penanganan atas laporan tersebut.	15-18 Mei	Polsek Parigi Kab Muna.
111.	Investigasi laporan kasus asusila yang dilakukan oknum Anggota Polisi dengan lap No Pol : LP/02/I/2011 Propam tanggal 3 Januari 2011.	15-18 Mei	Polda Sulawesi Tenggara.
112.	Investigasi laporan No Pol: LP/399/X/2011/Sultra/Res Muna, yang belum ada tindak lanjut.	15-18 Mei	Polres Muna.
113.	Investigasi laporan dugaan tindak pidana pemalsuan sidik jari oleh Amirudin Massa dengan Lap Polisi :STTL/53/II/2010/Dit. Reskrim tanggal 25 Februari 2010.	15-18 Mei	Polda Sulawesi Tenggara.
114.	Investigasi laporan Polisi: LP/601/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai a.n Tri Nugroho, Ansarudin, taslim dan Arif Pelu, dilaporkan oleh Sdr Medy Marsela.	15-18 Mei	Polda Sulawesi Tenggara.
115.	Investigasi laporan pengangkatan dr. I Made Christian Binekade sebagai PNS diduga ada pemalsuan tahun kelahiran dan pengangkatan Prof Dr Nur Nasry Noor MPH sebagai Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Halueleo yang melanggar Statuta Unhalu.	15-18 Mei	1. Universitas Halueleo 2. Universitas Hasanudin
116.	Investigasi laporan penundaan berlarut proses pengajuan perpanjangan/pengangkatan dokter PTT Pusat di Kabupaten Yahokimo, Papua oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pelapor: Ingri Dariaty Simamora (0343/LM/IV/2013/JKT).	16 Mei	Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
117.	Investigasi laporan mengenai dugaan adanya pungutan liar terkait proses pembuatan KTP dan KK di Kel Tanjung Barat Jakarta Selatan.	16 Mei	Kelurahan Tanjung Barat.
118.	Investigasi laporan dugaan maladministrasi dalam penyelesaian masalah kepegawaian.	17 Mei	PT Askes (Persero).
119.	Investigasi mengenai risalah lelang Nomor: 147/2005 tanggal 27 April 2005 atas sebidang tanah di Jl Gunung Sahari Raya No.64 A Kel Gunung Sahari Selatan Kec Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, SHGB No. 1267 luas tanah 2.750 M2.	17 Mei	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.
120.	Investigasi atas prakarsa sendiri (Own motion investigation) terkait kelangkaan BBG dan BBM.	17 Mei	Kantor Pemasaran Pertamina Region II.
121.	Investigasi laporan mengenai sengketa pengelolaan obyek wisata Gua Pindul.	20 Mei	Pemerintah Desa Bejiharjo, Gn. Kidul.
122.	Investigasi laporan persatuan mahasiswa D3 Poltekkes Jurusan Kebidanan dan Keperawatan dari Kab Mempawah mengenai dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan dari Pemerintah Kab Mempawah.	21 Mei	
123.	Investigasi laporan mengenai dugaan maladministrasi dalam menertibkan bangunan yang melanggar IMB dan pengukuran atas permohonan SHM.	21 Mei	1. Pemerintah Kabupaten Pontianak 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak
124.	Investigasi laporan mengenai dugaan maladministrasi terkait rusaknya beberapa ruas jalan di Kota Banda Aceh.	22 Mei	Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh
125.	Investigasi laporan dari LSM Sitas Desa Blitar mengenai penyelesaian permasalahan pertanahan di Kabupaten Blitar.	22-24 Mei	1. Pemerintah Kabupaten Jombang. 2. BRI Cabang Jombang. 3. Pemerintah Desa Sukorejo Kabupaten Kediri. 4. Pemerintah Kabupaten Blitar.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
126.	Investigasi laporan terkait proses penertiban rumah Pelapor yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan Satpol PP Kota Depok.	24 Mei	Pemerintah Kota Depok.
127.	Investigasi mengenai penyelenggaraan pelayanan RSUD Kabupaten Bombana.	25-28 Juni	RSUD Kabupaten Bombana.
128.	Investigasi atas prakarsa sendiri pada sekolah SD Simpang Haru Padang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).	25 Mei	SD Simpang Haru Padang, Sumatera Barat.
129.	Investigasi atas prakarsa sendiri pada sekolah SMP N 1 Padang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).	26 Mei	SMP N 1 Padang, Sumatera Barat.
130.	Investigasi atas prakarsa sendiri pada sekolah SMA Negeri 1 Padang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).	27 Mei	SMA Negeri 1 Padang Sumatera Barat.
131.	Investigasi laporan PT Karya Taufik Lestari tentang belum bisa dilaksanakannya akad kredit kepemilikan rumah dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura belum menyelesaikan pengukuran tanah serta proses pemecahan/pemisahan hak atas tanah.	27-30 Mei	Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.
132.	Investigasi laporan mengenai kinerja aparat Kepolisian Daerah Papua yang belum menindak lanjuti laporan Nomor: STPL/94/VI/2012/Subbag Yanduan, tanggal 22 Juni 2012.	27-30 Mei	Kepolisian Daerah Papua.
133.	Investigasi laporan forum masyarakat peduli pembangunan Kab Mamberamo Tengah terkait penerimaan suap oleh oknum Jaksa Penuntut Umum Kejari Jayapura dalam perkara pidana kasus pemalsuan berkas kenaikan pangkat.	27-30 Mei	Kejaksaan Negeri Jayapura.
134.	Investigasi laporan tentang adanya 2 (dua) putusan Pengadilan diatas tanah Pelapor dan keberatan atas penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jayapura.	27-30 Mei	1. Kantor Pertanahan Jayapura. 2. Pengadilan Negeri Jayapura.
135.	Investigasi laporan Kontras mengenai penembakan karyawan PT Freeport Timika Papua yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan penembakan 5 warga sipil yang diduga dilakukan oleh anggota Brimob BKO Kab Paniai Papua.	27-30 Mei	Brimob BKO Kab Paniai Papua.
136.	Investigasi Sistemik mengenai Pelayanan Haji di Provinsi Jawa Timur.	28-30 Mei	1. Kementerian Agama Kota Surabaya. 2. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
137.	Investigasi lapangan ke objek tanah yang dimohonkan haknya ke BPN, terkait keluhan Pelapor mengenai tidak dilanjutkannya proses pemsertifikatan.	29 Mei	BPN Kota Padang.
138.	Investigasi laporan warga komplek Perumahan Taman Mahkota mengenai penyimpangan prosedur perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam pembangunan Sekolah Dasar Ekklesia.	29-30 Mei	Pemerintah Kota Tangerang.
139.	Investigasi laporan dugaan adanya pungutan liar terhadap penerbitan IMB.	29 Mei -1 Juni	Kantor Perijinan Minahasa Utara
140.	Investigasi laporan mengenai dugaan penundaan berlarut pelayanan di Kelurahan Jatimulyo Lowokwaru Kota Malang.	29 Mei-1 Juni	1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. 2. Satpol PP Kota Malang. 3. Universitas Brawijaya Malang. 4. Kelurahan Jatimulyo Lowokwaru Malang.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
			5. SDN 1 Candiwates Prigen Pasuruan.
141.	Investigasi atas prakarsa sendiri ke SMP N.8 Padang mengenai dugaan adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru berdasarkan pemberitaan media pos metro tanggal 29 Mei 2013.	30 Mei	SMP N.8 Padang.
142.	Investigasi laporan dugaan penundaan berlarut oleh Polda Metro Jaya terkait Laporan Polisi No: LP/2602/VII/2011/PMJ/Dit Reskrim.	31 Mei	1. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Polda Metro Jaya.
143.	Investigasi laporan terkait permasalahan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.	31 Mei	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
144.	Investigasi laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Pemerintah Kabupaten Bogor terkait memperjualbelikan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Bumi Cibirong Indah.	5 Juni	Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
145.	Investigasi laporan terkait munculnya SHGB No 67/Singajaya a.n PT Mitra Kusuma Erasemesta yang sebagian tanahnya merupakan tanah milik Pelapor dengan SHM No. 908/Singajaya.	5 Juni	Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
146.	Investigasi laporan mengenai penerbitan izin pembangunan rumah peristirahatan The Rayja Kota Batu Jawa Timur.	6-8 Juni	Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur.
147.	Investigasi laporan dugaan penundaan berlarut oleh BPN RI atas permohonan pertimbangan untuk dapat dilakukan proses pengukuran dan penerbitan SHM atas bidang tanah di Pulau Pemungutan, Desa Sungai Padang Kab Belitung Provinsi Bangka Belitung.	10-13 Juni	BPN RI.
148.	Investigasi Sistemik mengenai Pelayanan Haji di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	10-14 Juni	1. Kementerian Agama Kab. Lombok Timur. 2. Kementerian Agama Kab. Lombok Barat. 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Nusa Tenggara Barat.
149.	Investigasi sistemik mengenai pelayanan haji di Provinsi Sulawesi Selatan.	11-14 Juni	1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. 4. KUA Kecamatan Makassar.
150.	Investigasi atas inisiatif sendiri terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan.	12 Juni	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
151.	Investigasi laporan Tim Advokasi dan Litigasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Tambun Bekasi mengenai dugaan tidak profesional dalam penyidikan penetapan sebagai Tersangka Pdt Palti Panjaitan, STH atas Laporan Polisi No: LP/1395/K/XII/2012/SPK/Resta Bekasi tanggal 24 Desember 2012 dalam perkara tuduhan tindak pidana.	12-13 Juni	Kepolisian Resor Kota Bekasi.
152.	Investigasi laporan dugaan penundaan berlarut oleh Kepolisian Sektor Muara Bangja Hulu dalam penanganan Laporan Polisi No: STPL/138-B/V/2012 terkait pencurian.	12-15 Juni	Kepolisian Sektor Muara Bangja Hulu.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
153.	Investigasi laporan penyimpangan prosedur dalam pengajuan permohonan penghentian dengan tidak hormat terhadap Pelapor	12-15 Juni	Universitas Bengkulu.
154.	Investigasi tindak lanjut laporan Polisi Nomor:LP/1395/K/XII/2012/SPK/Restra Bekasi tanggal 24 Desember 2012 mengenai tuduhan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Pdt Palti Panjaitan.	13 Juni	Polresta Bekasi.
155.	Investigasi terkait standar pelayanan dan penetapan tarif pembuatan surat riwayat tanah.	13-14 Juni	Pemerintah Kabupaten Bogor.
156.	Investigasi atas inisiatif sendiri terhadap pelayanan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.	13-14 Juni	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.
157.	Investigasi laporan mengenai penahanan SKHUN di SMP Maria Asumpta Klaten atas nama Alexader Dewa Prayoga.	17 Juni	Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Klaten.
158.	Investigasi inisiatif sendiri terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2013-2014 di Kota Balikpapan.	18 Juni-5 Juli	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
159.	Investigasi laporan terkait permasalahan <i>Car Wash</i> Kota Pekanbaru.	20 Juni	1. Badan Pelayanan Terpadu (BPT) 2. Satpol PP Kota Pekanbaru.
160.	Investigasi laporan masyarakat mengenai keberadaan tower tidak berizin.	21 Juni	Satpol PP Kota Semarang.
161.	Investigasi laporan Forum Silaturahmi Warga untuk Tol JORR II mengenai dugaan penyimpangan prosedur dalam pengadaan tanah untuk jalan Tol JORR II Kunciran – Serpong.	21-22 Juni	1. Setda Provinsi Banten. 2. Setda Pemerintah Kota Tangerang Selatan. 3. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tangerang Selatan. 4. Kementerian PU.
162.	Investigasi laporan dugaan penyimpangan prosedur dalam pembangunan jalan Tol Cinere-Serpong.	21-22 Juni	1. Setda Provinsi Banten. 2. Setda Pemerintah Kota Tangerang Selatan. 3. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tangerang Selatan. 4. Kementerian PU.
163.	Investigasi laporan mengenai penerbitan izin pembangunan rumah peristirahatan The Rayja Kota Batu Jawa Timur	23-26 Juni	Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur.
164.	Investigasi atas prakarsa sendiri mengenai dugaan pungutan dalam pelaksanaan ujian calon pengawas sekolah dasar di Kabupaten Karanganyar.	25-28 Juni	1. SD N 4 Bejen, Karanganyar. 2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar.
165.	Investigasi laporan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.	25-28 Juni	1. BKD Kab Indragiri Hilir. 2. Dinas Pendidikan Kab Indragiri Hilir. 3. Dinas PU Kab Indragiri Hilir. 4. Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir.
166.	Investigasi laporan dugaan pungutan dalam ujian untuk calon pengawas sekolah Dasar di Kab. Karanganyar.	26-28 Juni	Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar.
167.	Investigasi laporan mengenai tidak kompetennya Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) Kab Aceh Besar dalam penanganan kasus Dayah Miftahussa'adah	28 Juni	Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) Kab Aceh Besar.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	hamzah Fansuri Alfarisi MS.		
168.	Investigasi laporan dugaan maladministrasi mengenai keluhan masyarakat atas kutipan biaya masuk pada proses penerimaan siswa baru di jajaran Pendidikan Kota Banda Aceh.	28 Juni	Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh.
169.	Investigasi laporan dugaan maladministrasi kutipan biaya masuk MTsN Rukoh yang memberatkan para orang tua murid	28 Juni	MTsN Rukoh.
170.	Investigasi laporan dugaan maladministrasi terkait kutipan biaya masuk MTsN Sigli yang memberatkan para orang tua murid.	28 Juni	MTsN Sigli Kab Pidie.
171.	Investigasi atas prakarsa sendiri terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD 6 Alang Lawas Padang	1 Juli	SD 6 Alang Lawas Padang
172.	Investigasi atas prakarsa sendiri pada SMAN 03 Padang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	3 Juli	SMAN 3 Padang
173.	Investigasi atas prakarsa sendiri pada SMA Negeri 12 Padang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	4 Juli	SMAN 12 Padang
174.	Investigasi atas prakarsa sendiri pada SMA Negeri 10 Padang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	5 Juli	SMAN 10 Padang
175.	Investigasi kasus penetapan dan/atau kebijakan tarif tinggi logistik akibat tinggal waktu (<i>dwelling time</i>) jalur merah dan hijau	5 - 10 Juli	Ditjen Bea dan Cukai
176.	Investigasi atas prakarsa sendiri pada SD Percobaan Alai Padang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	8 Juli	SD 3 Alai Padang
177.	Investigasi atas prakarsa sendiri pada SD Ujung Gurun Padang terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	9 Juli	SD Percobaan Ujung Gurun Padang
178.	Investigasi dan pengumpulan data di SMUN 1, SMUN 2 dan SMUN Kota Mojokerto terkait pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2013	9 Juli	1. SMUN 1 Mojokerto, 2. SMUN 2 Mojokerto 3. SMUN Kota Mojokerto
179.	Investigasi kasus pengukuran tanah	9 - 10 Juli	BPN Prov. DKI Jakarta
180.	Investigasi laporan masyarakat penanganan kasus Dayah Miftahussa'adah Hamzah Fansuri Alfarisi MS, pimpinan Abu Alimin yang dianggap sesat	16 Juli	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kab. Aceh Besar
181.	Investigasi terkait keluhan warga penyandang Jamkesda terhadap layanan RSUD. AW. Syahrani Kota Samarinda	17 - 18 Juli	RSUD AW. Sjahrani Kota Samarinda
182.	Investigasi laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan	18-19 Juli	Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan
183.	Investigasi dugaan maladministrasi terkait tenaga honorer K-2 di jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	19 Juli	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
184.	Investigasi laporan masyarakat	22-23 Juli	BRI Unit Batanghari Lampung Timur
185.	Investigasi terkait penggunaan aset Mobil Dinas dari Pemerintah Daerah	23 - 26 Juli	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang dan Kota Samarinda
186.	Investigasi terkait pelayanan PDAM Kota Samarinda	23 - 26 Juli	PDAM Kota Samarinda
187.	Investigasi laporan mengenai adanya biaya tinggi di SMPN 2 Kota Samarinda	23 - 26 Juli	SMPN 2 Kota Samarinda
188.	Investigasi terkait pelayanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda	23 - 26 Juli	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda
189.	Investigasi lapangan laporan masyarakat mengenai tidak diberikannya permintaan salinan dokumen dan informasi mengenai Erpacht Verponding Afdelling No. 330	23-26 Juli	1. Pemerintah Kabupaten Agam 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
190.	Investigasi kasus penetapan dan/atau kebijakan tarif	28 - 30 Juli	Otoritas Pelabuhan Surabaya

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	tinggi logistik akibat tinggal waktu (<i>Dwelling Time</i>)		
191.	Investigasi layanan pada SMU Negeri 6 Kendari	29 Juli s/d 2 Agustus	SMU Negeri 6 Kendari
192.	Investigasi laporan terkait tidak dibayarkannya tunjangan fungsional non sertifikasi sebanyak 96 guru SD dan TK oleh UPT Dinas Pendidikan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar tahun 2010.	29 Juli - 1 Agustus	1. Bupati Tanah Datar, 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, dan 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar
193.	Pembahasan laporan bersama BPS Kubu Raya mengenai pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran	1 Agustus	BPS Kab. Kubu Raya
194.	Investigasi dugaan maladministrasi dalam proses mutasi guru lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe	18-21 Agustus	Dinas Pendidikan Kab. Konawe
195.	Investigasi laporan penyaluran BLSM, di Kabupaten Kubu Raya	21 Agustus	BPS Kab. Kubu Raya
196.	Investigasi mengenai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Singkawang	21 Agustus	1. SMK 02 Singkawang 2. SDN 13 Singkawang Barat
197.	Investigasi laporan dari Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAM) mengenai dugaan keberpihakan jajaran pemerintah Kota Singkawang terkait pembangunan hotel di Jl. Pangeran Diponegoro, Kota Singkawang yang tidak memiliki IMB	22 Agustus	Pemerintah Kota Singkawang
198.	Investigasi lanjut laporan masyarakat mengenai keluhan dalam pelayanan RSUD Abdul Aziz Singkawang	23 Agustus	RSUD Singkawang
199.	Investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyerahan tanah yang digunakan untuk pelebaran jalan di Jalan Bagindo Azis Chan tanpa diberikan ganti rugi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang cq Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang	28 - 30 Agustus	1. Pemerintah Kota Padang Panjang 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang cq bidang tata ruang dan tata bangunan (TRTB).
200.	Investigasi laporan terkait permasalahan program transmigrasi di UPT Arongo Kab. Konawe Selatan	31 Agustus - 4 September	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan
201.	Investigasi laporan masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	29-30 Agustus	PT. KAI Tanjung Karang
202.	<i>Own motion</i> investigasi kasus dugaan penyimpangan prosedur penerbitan SHM	27- 31 Agustus	BPN Prov. Sumatera Selatan dan Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ilir
203.	Investigasi Laporan Masyarakat terkait pencemaran sungai Pampain akibat adanya perusahaan tambang batubara	1- 4 September	Dinas BLHD Kabupaten Tapin
204.	Investigasi terkait adanya dugaan pemotongan dana insentif peternak sapi potong	1- 4 September	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
205.	Investigasi laporan masyarakat	2- 7 September	1. Kapolresta Medan 2. Kapolres Tapanuli Tengah 3. Kapolres Sibolga Kota 4. Kapolres Nias Selatan 5. Kapolsek Sambas 6. Kapolsek Lahusa
206.	Investigasi laporan Masyarakat di Lumajang, Jawa Timur	3- 6 September	1. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo 2. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
			Kabupaten Pasuruan 3. Camat Gondangwetan Kabupaten Pasuruan 4. Kepala Desa Selok Awar-awar Kec Pasirian Kab Lumajang
207.	Melakukan investigasi laporan masyarakat	11-12 September	1. Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi dan 2. Dinas Tenaga Kerja Lampung Tengah di Gunung Sugih
208.	Investigasi lapangan terkait laporan masyarakat terkait permasalahan pertanahan	16 September	Pemerintah Kota Banda Aceh
209.	Investigasi laporan masyarakat	17 September	BPN RI
210.	Investigasi laporan masyarakat terkait permasalahan pertanahan	17-19 September	Kantor Pertanahan Lampung Barat
211.	Investigasi Laporan Masyarakat terkait tidak dilaksanakannya Keputusan Bupati Barito Kuala dan Keluhan Masyarakat di Desa Tamban Kecil yang menolak relokasi SDN Tamban Kecil	17-19 September	Pemerintah Kabupaten Barito
212.	Investigasi laporan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan dugaan pungutan tidak resmi di Kab. Pesisir Selatan	17-20 September	1. Pemerintah Kabupaten Bupati Pesisir Selatan, 2. Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan dan 3. Kepala Sekolah SMAN 1 Painan
213.	Investigasi laporan pengaduan dari kelompok warga masyarakat NTT mengenai konflik tapal batas antara Kab. Manggarai Timur dengan Kab. Ngada di Prov. Nusa Tenggara Timur	18 - 21 September	Kantor Gubernur Prov. Nusa Tenggara Timur
214.	laporan pengaduan dari Padma Indonesia selaku kuasa pelapor mengenai tuntutan ganti rugi atas tanah pelapor yang digunakan untuk proyek pembangunan PLTP Maloko di Kab. Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur	18 - 21 September	Kantor Gubernur Prov. Nusa Tenggara Timur
215.	Investigasi atas prakarsa sendiri dengan meminta penjelasan/keterangan secara langsung kepada Kepala BKD Prov. Sumbar terkait Penerimaan CPNS Pemprov Sumatera Barat	23 September	Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Sumatera Barat
216.	Investigasi laporan dari LSM "Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Madiun", LBH Swadek dan LSM KPPR Nganjuk	25-28 September	1. Pemerintah Kabupaten Nganjuk 2. BPPT Nganjuk 3. Kecamatan Rejoso Nganjuk 4. KPUD Kab. Madiun
217.	Investigasi laporan masyarakat	25-26 September	1. UPT Jati Agung Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan
218.	Investigasi laporan masyarakat mengenai pembuatan SKCK di Mapolres Kabupaten Bireun	23 - 25 September	Mapolres Kabupaten Bireun
219.	Investigasi permasalahan dimana Ibu Aminah tidak diikutsertakan dalam sertifikasi.	24 s.d 27 September	Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
220.	Investigasi terkait laporan Masyarakat di lingkungan	25 September	Kejaksaaan Tinggi Aceh

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh		
221.	Investigasi Sistemik Manajemen Waktu Arus Kontainer Barang (<i>Dwelling Time</i>)		1. Kantor Pelabuhan Ekspor-Impor Medan, Sumatera Utara 2. Kantor Pelabuhan Ekspor-Impor Makassar, Sulawesi Selatan 3. Kantor Pelabuhan Ekspor-Impor Surabaya, Jawa Timur
222.	Investigasi Sistemik Solar Bersubsidi		
223.	Investigasi lapangan terkait laporan masyarakat berkenaan tes CPNS di Kab. Aceh Jaya	30 September-1 Oktober	Kab. Aceh Jaya
224.	Investigasi laporan masyarakat terkait pembebasan tanah di Gampong Ulee Lheu Banda Aceh	30 September-1 Oktober	Kota Banda Aceh
225.	Investigasi proses dwelling time di pelabuhan Belawan, Sumatera Utara	30 September-2 Oktober	Kantor KPP Bea dan Cukai, Balai Besar Karantina Pertanian, Otoritas Pelabuhan, Depalindo dan Pelindo
226.	Investigasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara	30 September – 3 Oktober	Bupati Kab. Serdang Bedagai, Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai, Kantor Timsel Anggota KPU Kota Pematang Siantar, Kantor Timsel Anggota KPU Kab. Simalungun
227.	Investigasi ke Ditreskrimsus Polda Jateng untuk meminta salinan dokumen terkait laporan masyarakat tentang dugaan korupsi Raskin di Kab. Grobogan	1 Oktober	Polres Grobogan Ditreskrimsus Polda Jateng
228.	Investigasi penundaan berlarut Program Larasita 2011	1 Oktober	Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat
229.	Melakukan investigasi dugaan maladministrasi tidak memberi pelayanan oleh Kapolres	1 Oktober	Polres Indragiri Hulu
230.	Melakukan investigasi laporan masyarakat	1 Oktober	Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai
231.	Klarifikasi laporan masyarakat dan FGD di Pemerintahan Kabupaten Bangli	1-3 Oktober	Pemerintahan Kabupaten Bangli
232.	Investigasi ke Kepala Desa Gubugsari Kab. Kendal terkait dugaan tidak memberikan pelayanan untuk memberikan tanda tangan blanko permohonan sertifikat tanah kepada pelapor	2 Oktober	Kepala Desa Gubugsari
233.	Investigasi ke Inspektorat Kab. Kendal terkait dugaan tidak memberikan pelayanan atas kasus yang dilaporkan oleh pelapor kepada inspektorat kab. Kendal	2 Oktober	Inspektorat Kab. Kendal
234.	Melakukan investigasi laporan masyarakat	2 Oktober	Kantor Timsel Calon Anggota KPU Kota Pematang Siantar dan Kab. Simalungun
235.	Melakukan klarifikasi laporan	2 Oktober	Badan Pertanahan Negara (BPN) Batam
236.	Investigasi mengenai dugaan intimidasi dan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Anggota Polsekta Ujung Berung	2 Oktober	Kantor Polsekta Ujung Berung
237.	Klarifikasi untuk tindak lanjut laporan masyarakat	2-4 Oktober	PT. Bank Sulawesi Tengah, Kantor Pertanahan Kota Palu, Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, Kanwil BPN Prov. Sulawesi

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
			Tengah
238.	Investigasi tindak lanjut laporan masyarakat	2-6 Oktober	Pemkab Seram Bagian Timur, BPN Kab. Seram Bagian Timur
239.	Melakukan klarifikasi laporan	3 Oktober	Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungpinang
240.	Investigasi dalam rangka hilangnya berkas permohonan pembuatan sertipikat	3 Oktober	Kantor Kelurahan Cimencrang, Kantor Kelurahan Rancanumpang
241.	Investigasi ke Bekasi, Jawa Barat	3 Oktober	PDAM Bekasi, Walikota Jakarta Pusat, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
242.	Meminta Keterangan dan data sehubungan Laporan Masyarakat	4 Oktober	Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan
243.	Investigasi dugaan penyimpangan prosedur dalam penerbitan SHM Pengganti No. 741 oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung	4 Oktober	Kantor Pertanahan Kota Bandung
244.	Melakukan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin	6 Oktober	Kantor BPN Kab. Banyuasin
245.	Investigasi ke Kejaksaan Negeri Purwodadi terkait dugaan pelepasan 7 terdakwa kasus penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi	7 Oktober	Kejaksaan Negeri Purwodadi
246.	Peninjauan Lokasi Pembongkaran Bangunan yang dilakukan oleh Dinas TRTB Kota Medan	7 Oktober	Dinas TRTB Kota Medan
247.	Investigasi proses dwelling time di pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan	7-11 Oktober	Kantor KPP Bea dan Cukai, Balai Besar Karantina Pertanian, Otoritas Pelabuhan, Depalindo, PT. Pelindo IV (Persero) Sulawesi Selatan, PT. Kawasan Industri Makassar (Persero)
248.	Investigasi atas prakarsa sendiri tentang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu khususnya minyak solar bersubsidi kepada nelayan	7-11 Oktober	Instansi terkait di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar
249.	Investigasi ke Kejaksaan Negeri Semarang terkait penanganan kasus di Polres Semarang dengan Laporan Polisi No LP/562/X/2008/SPK tentang dugaan pemalsuan surat	8 Oktober	Polres Semarang
250.	Klarifikasi terkait laporan kejanggalan tagihan PDAM Tirtamusi Palembang	8 Oktober	PDAM Tirtamusi Palembang
251.	Investigasi dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Perum Bulog Divre Jabar	8 Oktober	Lapas Sukamiskin Bandung
252.	Investigasi tentang Keberatan terhadap pemberlakuan Peraturan Dirjen Pemasaryakatan secara Retroaktif	8 Oktober	Lapas Sukamiskin Bandung
253.	Kunjungan lapangan ke Polres Magelang terkait laporan penipuan berkedok CPNS	8-9 Oktober	Polres Magelang
254.	Investigasi layanan RSUD Kabupaten Kolaka	8-11 Oktober	Direktur RSUD Kab. Kolaka
255.	Melakukan pertemuan terkait laporan masyarakat	9 Oktober	Kepala Satpol PP Pemkab. Gresik
256.	Pemeriksaan lapangan terkait penyelesaian laporan masyarakat	9-10 Oktober	DPRD Kab. Tegal dan Dinas Pendidikan Kab. Tegal
257.	Investigasi ke Dinpora Kab. Tegal dan DPRD Kab. Tegal terkait : <ol style="list-style-type: none"> tidak cairnya tunjangan sertifikasi guru SMKN 2 Slawi Proses pemberian jam mengajar kepada guru SMKN 2 Slawi yang tidak sesuai prosedur DPRD Kab Tegal yang lambat dalam 	9-10 Oktober	1. Dinpora Kab. Tegal 2. DPRD Kab. Tegal

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	menjawab surat pelapor		
258.	Melakukan investigasi dalam rangka menindaklanjuti surat tanggapan klarifikasi	9-11 Oktober	Dinas PU dan Perumahan Kota Metro, Dinas Pendidikan Kota Metro, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Lampung Timur
259.	Peninjauan lapangan terkait penyelesaian laporan dari Masyarakat Adat Dayak UUD Danum (perkebunan sawit di Serawai dan Ambalau)	9-11 Oktober	Kab. Sintang
260.	Investigasi pungutan sertifikasi guru di Lombok Timur	10 Oktober	Dikpora Kab. Lombok Timur
261.	Melakukan pertemuan terkait laporan masyarakat	10 Oktober	Ketua Pengadilan Agama Tuban dan Kepala Desa Tasikmadu
262.	Melakukan uji petik terhadap objek laporan milik PDAM Tirtamusi Palembang	10 Oktober	PDAM Tirtamusi Palembang
263.	Investigasi mengenai hilangnya berkas permohonan pembuatan sertipikat	10 Oktober	Kantor Kelurahan Cimencrang, Kantor Kelurahan Rancanumpang
264.	Melakukan pertemuan terkait laporan masyarakat	11 Oktober	Managemen PT. Semen Indonesia
265.	Gelar Kasus Kepolisian	11 Oktober	Itwasda Kepolisian Daerah Sumatera Utara
266.	Investigasi lapangan ke Desa Girikerto Turi Sleman berkenaan laporan dugaan penyimpangan dalam seleksi Calon Kepala Desa Girikerto	16 Oktober	Kepala Desa Girikerto
267.	Kunjungan lapangan ke Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dalam penyelesaian laporan mengenai dugaan indisipliner dokter spesialis di RSUD Rubini	16-18 Oktober	Kantor Pertanahan Kab. Pontianak
268.	Melakukan investigasi untuk mendapatkan data dan keterangan terkait laporan masyarakat	16-18 Oktober	
269.	Mendapatkan penjelasan terkait rekrutmen CPNS Kabupaten Tabanan	17 Oktober	Kantor Sekretaris Daerah Kab. Tabanan
270.	Melakukan investigasi terkait kasus adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek padat karya pengerasan jalan Desa Jemowo	17-18 Oktober	Kejaksaan Negeri Boyolali
271.	Investigasi laporan masyarakat mengenai dugaan diskriminasi dalam seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 untuk Kategori II	18 Oktober	Kantor Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung
272.	Pertemuan dengan Dukung Karangmalang terkait kesiapan Padukuhan Karangmalang sebagai tempat relokasi pedagang Sunmor	21 Oktober	Rektor UGM Yogyakarta
273.	Investigasi ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang terkait belum diterbitkannya sertifikat Basic Safety Training (BST) milik peserta training	22 Oktober	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
274.	Kunjungan lapangan terkait dugaan titipan siswa baru di SMAN 1 Surakarta	22 Oktober	Walikota Surakarta
275.	Gelar Kasus Kepolisian	22 Oktober	Itwasda Kepolisian Daerah Sumatera Utara
276.	Investigasi lapangan pelaksanaan test CPNS di Kabupaten Nagan Raya	22-24 Oktober	Pemkab Nagan Raya
277.	Melakukan pertemuan terkait laporan masyarakat tentang kepemilikan lahan SMPN 1 Ciawi Kab. Tasikmalaya	22-25 Oktober	Kantor Pertanahan Kab. Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya, DPPKAD Kab. Tasikmalaya, dan Bupati Tasikmalaya
278.	Melakukan pertemuan/investigasi terkait laporan masyarakat	22-25 Oktober	Walikota Surakarta, Kepala Dinas Kesehatan se Kota Surakarta, Ketua Ikatan Apoteker Surakarta

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
279.	Melakukan klarifikasi laporan	23 Oktober	Pengadilan Agama Batam
280.	Kunjungan lapangan ke SMAN 1 Surakarta atas laporan Edy Lukito	23 Oktober	Walikota Surakarta
281.	Mendapatkan data dan informasi serta peran IAI dalam menerbitkan rekomendasi	23 Oktober	Apotik Solo
282.	Klarifikasi laporan masyarakat	23 Oktober	Kantor BPKAD Sumatera Selatan
283.	Investigasi ke Dinas Sosial Provinsi Jateng terkait dugaan penolakan permohonan surat izin operasional (SIOP) yang diajukan oleh pelapor	24 Oktober	Dinas Sosial Prov Jateng
284.	Pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta atas laporan Apotik K-24	24 Oktober	Dinas Kesehatan Kota Surakarta
285.	Pemeriksaan lapangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat	24 Oktober	Suku Dinas p2B dan Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Pusat
286.	Investigasi dan pemantauan layanan pada kantor BKD Kab. Bombana dan pertemuan dengan Kepala BKD Kab. Bombana dan Ketua DPRD Kab. Bombana	24-26 Oktober	BKD Kab. Bombana dan DPRD Kab. Bombana
287.	Investigasi ke Prov. Sulawesi Selatan	24-26 Oktober	Kantor Pengadilan Tinggi, Kanwil Ditjen Pajak Prov. Sulawesi Selatan
288.	Pengamatan dan pengumpulan data pedagang Sunmor	27 Oktober	Rektor UGM Yogyakarta
289.	Melakukan pertemuan/klarifikasi laporan	28 Oktober	Pertamina
290.	Investigasi langsung ke RSUD	28 Oktober	RSUD Bangka Belitung
291.	Pertemuan dengan Walikota Yogyakarta terkait progress report proses penataan pedagang pasar Kranggan Yogyakarta	28 Oktober	Walikota Yogyakarta
292.	Melakukan kunjungan lapangan dan pertemuan terkait laporan masyarakat	29 Oktober-1 November	Panwaslu Kebumen, Kepala Desa Tambak Negara, Puwokerto, Bupati Banyumas, Bupati Purbalingga, IAI Cabang Banyumas
293.	Investigasi terkait laporan masyarakat tentang pencurian semen dan besi	29 Oktober-1 November	Kepala Desa Bulontala Timur, Kabupaten Bone Bolango
294.	Investigasi terkait laporan masyarakat tentang pencurian kayu jati	29 Oktober-1 November	Kepala Desa Bulontala Timur, Kabupaten Bone Bolango
295.	Investigasi laporan masyarakat	30 Oktober	SMP Negeri 23 Makassar
296.	Investigasi tentang jual beli LKS/ buku yang juga diharuskan kepada siswa/siswi untuk membeli disertai intimidasi.	30 Oktober	SMP Negeri 23 Makassar
297.	Melakukan investigasi laporan masyarakat terkait keluhan pelayanan peserta Askes, tindak pidana pencurian buah kelapa	30-31 Oktober	Balai Pengobatan Kalianda, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
298.	Melakukan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pungutan di SMA 1 Sumedang, penyelesaian ganti rugi untuk warga Desa Ciherang dalam pembangunan tol Cisumdawu, perubahan trotoar di Kab. Sumedang	31 Oktober	Bupati Sumedang, instansi terkait
299.	Pertemuan dengan PLN terkait permintaan penjelasan terhadap PLN mengenai tingginya intensitas pemadaman listrik di Babel	31 Oktober	PLN Bangka Belitung
300.	Melakukan investigasi terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan SK Honorer Kategori II CPNS	31 Oktober-3 Nopember	Pemerintah Kab. Maluku Tengah
301.	Sertifikasi guru di Kota Jayapura	Oktober	Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
302.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh RSUD Serang dalam		RSUD Serang

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	pembuatan Surat Keterangan Sehat bagi pelamar CPNS		
303.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap buruknyapelayanan transportasi umum (angkutan kota) di Kota Serang		Kota Serang
304.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap pelayanan publik RSUD Banten		RSUD Banten
305.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap pelayanan publik RSUD Serang		RSUD Serang
306.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap pelayanan publik RSUD Berkah Pandeglang		RSU Berkah Pandeglang
307.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap pelayanan publik RSUD Adjidarmo Rangkasbitung		RSUD Adjidarmo Rangkasbitung
308.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap pelayanan publik RSUD Kabupaten Tangerang		RSUD Kabupaten Tangerang
309.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap pelayanan publik RSUD Kota Tangerang Selatan		RSUD Kota Tangerang Selatan
310.	Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap pelayanan publik RSUD Kota Cilegon		RSUD Kota Cilegon
311.	Investigasi menindaklanjuti laporan terkait CPNSD Provinsi NTT	1 November	Biro Kepegawaian Setda Provinsi NTT
312.	Investigasi ujian CPNS di Prov. Kalimantan Tengah	3 November	Pemprov Kalimantan Tengah
313.	Investigasi kisruh tenaga honorer Kab. Bombana	3-5 November	Kepala BKD Kab. Bombana
314.	Investigasi ke SDN 06 Simpang Haru Padang terkait pungutan yang dilakukan kepada siswa	4 November	SDN 06 Simpang Haru Padang
315.	Investigasi oleh Perwakilan Babel ke RSUD	4 November	RSUD Bangka Belitung
316.	Investigasi terhadap pelayanan yang diberikan PPTKIS dan BLK kepada TKI	5-7 November	Balai Latihan Kerja dan Penampungan TKI di Bekasi, Depok, Condet dan Bogor
317.	Meminta keterangan dan penjelasan dari Kapolda Sumatera Utara cq Irwasda Polda Sumatera Utara terkait laporan/pengaduan masyarakat	5-9 November	Polda Sumatera Utara
318.	Investigasi lapangan terkait laporan LBH mengenai penutupan tempat karaoke	6 November	Bupati Bantul
319.	Investigasi ke SDN 03 Padang terkait pungutan yang dilakukan kepada siswa	6 November	SDN 03 Padang
320.	Investigasi ke SD Ujung Gurun Padang terkait pungutan yang dilakukan kepada siswa	6 November	SD Ujung Gurun Padang
321.	Pertemuan dengan Direktur RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau	6-9 November	RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Kanwil BPN Prov. Riau
322.	Pertemuan dengan perwakilan warga desa di Kawasan Hutan Register 40 Gedong Wani, Pemkab Tulang Bawang Barat, Pemkab Tulang Bawang, Disnakertrans Prov. Lampung, Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang	6-9 November	Pemkab Tulang Bawang Barat, Pemkab Tulang Bawang, Disnakertrans Prov. Lampung, Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang
323.	Melakukan pertemuan dalam rangka koordinasi penyelesaian laporan masyarakat a.n Lembaga Mediasi Konflik Indonesia (LMKI)	7 November	Polres Bangkalan
324.	Investigasi ke Satlantas Polres Kupang Kota	7 November	Polres Kupang Kota
325.	Investigasi ke SMA 30 Padang terkait pungutan yang dilakukan kepada siswa	7 November	SMA 30 Padang
326.	Melakukan pertemuan untuk klarifikasi langsung laporan masyarakat a.n Zainal Arifin	8 November	BKD Kab. Pamekasan
327.	Investigasi terkait laporan masyarakat tentang RSUD Aloe Saboe yang tidak memberikan layanan	8 November	RSUD Aloe Saboe, Kota Gorontalo
328.	Investigasi ke SMPN 8 Padang terkait pungutan yang dilakukan kepada siswa	8 November	SMPN 8 Padang
329.	Investigasi di BNN Provinsi Sulawesi Selatan	8 November	BNN Prov. Sulawesi Selatan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
330.	Investigasi terkait dengan kerusakan yang terjadi di BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. Sulawesi Selatan	8 November	BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. Sulawesi Selatan
331.	Melakukan investigasi terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan SK Honorir Kategori II CPNS	10-13 November	Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banda, Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah
332.	Investigasi ke SMP 31 Padang terkait pungutan yang dilakukan kepada siswa	11 November	SMP 31 Padang
333.	Klarifikasi laporan masyarakat terkait reklamasi Teluk Benoa	11 November	Kantor Gubernur Bali
334.	Pertemuan dengan Kapolda Lampung, Kapolresta Bandar Lampung, Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek guna menindaklanjuti laporan masyarakat	11-13 November	Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD dr. H. Abdul Moeloek
335.	Koordinasi dengan KPP Madya Kota Batam terkait laporan masyarakat	11 November	KPP Madya Kota Batam
336.	Investigasi ke SMPN 1 Padang terkait pungutan yang dilakukan kepada siswa	12 November	SMPN 1 Padang
337.	Investigasi ke Dinas Pendidikan Kota Padang	12 November	Dinas Pendidikan Kota Padang
338.	Mecari tahu keberadaan Asosiasi Koperasi Pedagang Pasar Kota Palopo (secara administratif dan faktual),	12 s.d 15 November	Pemerintah Kota Palopo
339.	Meninjau / melihat langsung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LPAUD) " ISLAH"	12 s.d 15 November	Pemerintah Kota Palopo
340.	Melakukan koordinasi terkait laporan masyarakat	12-13 November	Kantor Pajak Madya Kota Batam
341.	Investigasi laporan masyarakat di Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon	12-15 November	Camat Ciamis, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Cirebon
342.	Investigasi laporan masyarakat terkait Pemerintah Kota Palopo	12-15 November	Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan
343.	Investigasi ke PLN Cabang Kupang	13 November	PLN Cabang Kupang
344.	Melakukan investigasi terkait laporan masyarakat	13-15 November	Kantor Inspektorat Kab. Karo, Kantor Badan Kepegawaian Kab. Langkat
345.	Investigasi terkait laporan masyarakat tentang seleksi penerimaan CPNS Kab. Gorontalo Utara yang diduga ada penyimpangan prosedur	14 November	BKD Kab. Gorontalo Utara
346.	Investigasi ke Kabupaten Kaur	14 November	
347.	Mencari tahu tentang aktivitas proses pembangunan apartemen Vida View di malam hari.	14 November	Kantor Pengelola Apartemen Vida View di Citra Land, Sulawesi Selatan
348.	Investigasi laporan masyarakat terkait pembangunan apartemen	14 November	Pemda Sulawesi Selatan
349.	Melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan FGD di Kabupaten Badung dan melakukan sejumlah klarifikasi atas laporan masyarakat	15 November	Kab. Badung
350.	Investigasi dan klarifikasi atas laporan tentang keganjilan penetapan 10 besar komisioner KPUD Kab/Kota se-Sumsel	15 November	KPU Sumatera Selatan
351.	Melakukan FGD di Kabupaten Badung	16 November	Kab. Badung
352.	Mendapatkan penjelasan terkait laporan masyarakat dalam sengketa pertanahan di Kantor BPN Bali	18 November	Kantor BPN Bali
353.	Investigasi terkait adanya dugaan Maladministrasi K II yang dilakukan di SMP Mahia, TK Pembina dan Unpatti.	18-19 November	SMP Mahia, TK Pembina dan Unpatti
354.	Investigasi kasus ganti rugi tanah masyarakat di Desa	18-19	Instansi terkait di Desa

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	Juwangi	November	Juwangi Kab. Boyolali
355.	Meninjau secara langsung di lapangan terkait distribusi air di Kabupaten Badung	19 November	Kab. Badung
356.	Melakukan investigasi terkait 2 (dua) orang petani yang menjadi korban tanah longsor dan pungutan liar pada petani	19-21 November	Bupati Kab. Tanggamus, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
357.	Investigasi ke SD 1 Gaya Baru Kabupaten Lampung Tengah	19-21 November	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
358.	Investigasi di Provinsi Sumatera Utara	19-22 November	Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai, Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi, Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi, Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar dan Kelompok tani Madhani di Kabupaten Simalungun
359.	Investigasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau	19-22 November	BKPP Kab. Kepulauan Meranti, Pemda Kab. Kepulauan Meranti
360.	Investigasi terkait adanya dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh BPN Kota Ambon. Investigasi dilakukan pada Kantor BPN Kota Ambon, Rumah Ibu Suminah dan Bpk. Bob Nusawakan.	20-21 November	Kantor BPN Kota Ambon, Rumah Ibu Suminah dan Bpk. Bob Nusawakan.
361.	Klarifikasi atas laporan masyarakat	20-21 November	Kepala Desa Tebing Suluh, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
362.	Investigasi pungutan di SMAN 1 Sumedang dan penundaan berlanut di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang	20-22 November	Kepala SMAN 1 Sumedang, Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, Kantor Pertanahan Kab. Sumedang
363.	Investigasi sengketa lahan perkebunan di Desa Tetewatu Kab. Konawe	20-23 November	Kades Tetewatu
364.	Melakukan koordinasi terkait laporan masyarakat	21-22 November	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KPUD Tanjungpinang
365.	Investigasi laporan masyarakat di Kabupaten Mojokerto	21-22 November	Kantor BPPTM Kab. Mojokerto, Kantor Inspektorat Kab. Mojokerto
366.	Investigasi ke Disdukcapil Kota Palangkaraya	22 November	Disdukcapil Kota Palangkaraya
367.	Klarifikasi dengan petugas pelabuhan penyeberangan Mamuju terkait pelalaian kewajiban dan pungutan liar di pelabuhan	22 November	Petugas Pelabuhan Mamuju
368.	Pengumpulan data dan menggali informasi dari berbagai narasumber di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	22, 25-27 November	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
369.	Melakukan investigasi terkait dugaan pungutan oleh Oknum	23 November	Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
370.	Pertemuan dan klarifikasi dengan Kepala Mtsn Tinambung, SMK Negeri 1 Tinambung dan SMPN 1 Tinambung	24-26 November	Kepala Mtsn Tinambung, SMK Negeri 1 Tinambung dan SMPN 1 Tinambung
371.	Pertemuan dengan instansi penyelenggara negara di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung	25-28 November	Kejaksanaan Negeri Bandung, Disnaker Kab. Bandung, Pemkot Bandung
372.	Investigasi atas prakarsa sendiri tentang penyediaan dan penyaluran/distribusi pupuk bersubsidi untuk	25-30 November	Dinas Pertanian Prov. Sumut, Dinas Perindustrian dan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	petani		Perdagangan Prov. Sumut, Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang, Puskud Prov. Sumut, HKTI Prov. Sumut, Bupati Toba Samosir, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Toba Samosir, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Toba Samosir, HKTI Kab. Toba Samosir, KUD Kab. Toba Samosir, Kelompok Tani/Petani Kab. Toba Samosir, Bupati Nias Selatan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Nias Selatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Nias Selatan, HKTI Kab. Nias Selatan, KUD Kab. Nias Selatan, Kelompok Tani/Petani Kab. Nias Selatan
373.	Investigasi laporan masyarakat tentang terbitnya Surat Persetujuan Penunjukan Istri TNI	25 November	1. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar 2. Kantor Ajendam VII/WRB
374.	Investigasi Sistemik Pupuk bersubsidi	26 November	Pemerintah Prov. Sumatera Utara
375.	Investigasi sengketa ketenagakerjaan di Asera Kab. Konawe Utara	26-29 November	Kadis Tenaga Kerja Kab. Konut
376.	Investigasi laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Gorontalo masa bakti 2013-2018	27 November	KPU RI
377.	Investigasi Sistemik Pupuk bersubsidi	27 November	Distributor Pupuk bersubsidi di Sumatera Utara
378.	Investigasi laporan masyarakat mengenai dugaan berhentinya aliran air PDAM di Jl. Kembar Mas Utara I Kel. Ancol Kec. Regol Kota Bandung	27 November	Jl. Kembar Mas Utara I Bandung
379.	Investigasi laporan masyarakat terkait seleksi KPUD dan pengelolaan apartemen	27 November	Tim psikotes seleksi KPUD Jeneponto, Kantor pengelola apartemen Vida View di Citra Land Sulawesi Selatan
380.	Melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Kab. Bogor dan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kec. Cibinong, Kab. Bogor membahas laporan/pengaduan atas nama Yuzran Bustamar tentang pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	27 November	Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kab. Bogor, Unit Pelaksana Teknis Kec. Cibinong, Kab. Bogor
381.	Investigasi laporan masyarakat terkait tenaga honorer di kelurahan	28 November	Kelurahan Borong, Sulawesi Selatan
382.	Pengumpulan data terkait pemberitaan tentang PLN di koran	28 November	PLN Kep. Bangka Belitung
383.	Pengumpulan data terkait pemberitaan tentang PLN di koran	29 November	PLN Kep. Bangka Belitung
384.	Klarifikasi terhadap Kepala Desa Ranggung Bangka Selatan terkait kasus kelapa sawit	29 November	Kepala Desa Ranggung Bangka Selatan
385.	Investigasi di Kelurahan Oesapa Barat dan BPN Kota Kupang	29 November	Lurah Oesapa Barat BPN Kota Kupang
386.	Investigasi lapangan ke Pedukuhan Semail	29 November	Kemenko Kesejahteraan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	Bambanglipuro Bantul terkait penyaluran dana BSLM		Rakyat
387.	Investigasi Sistemik Pupuk bersubsidi	29 November	Produsen Pupuk bersubsidi di Sumatera Utara
388.	Penggunaan Dana Bantuan Sosial Provinsi Papua	November	BPKP Provinsi Papua
389.	Memanggil saksi ahli terkait laporan seleksi KPU dan arogansi dosen	29 November	Perwakilan Sumatera Selatan
390.	Meminta Keterangan dan data	2 Desember	Badan Kepegawaian Negara Regional VI
391.	Investigasi laporan masyarakat di SMPN 2 Parigi	2 Desember	SMPN 2 Parigi, Sulawesi Selatan
392.	Investigasi terkait adanya dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi. Investigasi dilakukan pada Kantor Dinas PU Provinsi Maluku, Jalan Kanawa Batu Merah Ambon dan Wartawan Ambon Ekspres.	2-4 Desember	Kantor Dinas PU Provinsi. Investigasi dilakukan pada Kantor Dinas PU Provinsi Maluku, Jalan Kanawa Batu Merah Ambon dan Wartawan Ambon Ekspres
393.	Investigasi terkait adanya dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi. Investigasi dilakukan pada Kantor Dinas PU Provinsi Maluku, Jalan Kanawa Batu Merah Ambon dan Wartawan Ambon Ekspres.	2-4 Desember	Kantor Dinas PU Provinsi. Investigasi dilakukan pada Kantor Dinas PU Provinsi Maluku, Jalan Kanawa Batu Merah Ambon dan Wartawan Ambon Ekspres..
394.	Investigasi ke Polres Grobogan terkait tindak lanjut penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi distribusi raskin	3 Desember	Polres Grobogan
395.	Investigasi laporan masyarakat terkait seleksi calon anggota KPUD Provinsi dan Kab/Kota	3 Desember	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
396.	Melakukan investigasi terkait dugaan pungutan di sekolah negeri	3-5 Desember	Dinas Pendidikan Kab. Subang
397.	Investigasi ke Polresta Palangka Raya	3-5 Desember	Polresta Palangka Raya
398.	Investigasi Kepala Desa Tegorejo terkait dugaan tidak memberikan pelayanan atas informasi Pertanahan di Desa Tegorejo	4 Desember	Kepala Desa Tegorejo
399.	Pertemuan dengan pihak PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	4 Desember	PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Prov. Banten
400.	Investigasi ke Pengadilan Negeri Pati terkait persoalan eksekusi perkara No 3/Pdt.Eks/2012/PN.Pt atas tanah dan bangunan dengan SHM No 1214 di Desa Sendang rejo Kab. Pati	5 Desember	Pengadilan Negeri Pati
401.	Klarifikasi laporan masyarakat	5 Desember	Kota Sekayu Kab. Musi Banyu Asin
402.	Investigasi laporan masyarakat terkait pertanahan	5 Desember	Kantor BPN Kota Makassar
403.	Investigasi tentang laporan / pengaduan masyarakat terhadap BPN Kota Makasar	5 Desember	Kantor BPN Kota Makassar
404.	Melakukan klarifikasi laporan	5-6 Desember	DPRD dan PDAM Tirta Kepri, Tanjungpinang
405.	Investigasi ke Provinsi Jawa Barat	5-6 Desember	Polres Bogor, Kejari Bogor
406.	Investigasi di Provinsi Banten	5-7 Desember	Disnaker Kota Tangerang, Disnaker Kab. Tangerang, Pengadilan Agama Cilegon
407.	Investigasi ke DPRD Kab. Pati terkait kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Pati	6 Desember	DPRD Kab. Pati
408.	Investigasi laporan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh guru terhadap siswa	6 Desember	MAN 2 Model Makassar
409.	Investigasi ke Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait Kasus tumpang tindih antara SHM 1190/bulusan dan HGB No 2/Bulusan	9 Desember	Kantor Pertanahan Kota Semarang
410.	Investigasi dan klarifikasi II atas laporan tentang keganjilan penetapan 10 besar komisioner KPUD	9 Desember	Kantor KPU Sumatera Selatan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	Kab/Kota se-Sumatera Selatan		
411.	Klarifikasi terhadap Sekretaris Desa Sebagin Bangka Selatan terkait kasus Prona	10 Desember	Sekretaris Desa Sebagin Bangka Selatan
412.	Investigasi laporan masyarakat terkait layanan Samsat	10 Desember	Kantor Samsat Kota Makassar
413.	Investigasi mengenai dugaan penyimpangan prosedur dalam persetujuan pembangunan Rusunami Grand Dago Bandung	11 Desember	Lokasi Pembangunan Rusunami Grand Dago
414.	Klarifikasi laporan masyarakat terkait pemalsuan dokumen tentang tenaga honorer	11 Desember	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa, Kepala BKD Kab. Gowa
415.	Meminta Keterangan dan data	12 Desember	Balai Pemantapan Hutan Sumut
416.	Klarifikasi laporan masyarakat terkait seleksi KPUD	12 Desember	Kantor Tim Psikotes UNM, Sulsel
417.	Klarifikasi terkait laporan masyarakat tentang Pilkades Pemecutan Kaja	13 Desember	Pilkades Pemecutan Kaja
418.	Meminta Keterangan dan data	16 Desember	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
419.	Klarifikasi langsung	16 Desember	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin
420.	Meminta Keterangan dan data	17 Desember	Kantor Pertanahan Kota Medan
421.	Peninjauan lapangan laporan masyarakat mengenai adanya pembangunan pagar tanpa IMB	18 Desember	Pemkot Pontianak
422.	Investigasi luar kota dan klarifikasi II terkait laporan masyarakat	18-19 Desember	Kepala Desa Tebing Suluh, OKI
423.	Investasi laporan masyarakat	18-20 Desember	Kantor Polres Pangkal Pinang
424.	Investigasi dugaan terjadinya pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kab. Konawe Selatan	19-21 Desember	Kadis. Pendidikan Kab. Konawe Selatan
425.	Investigasi laporan terkait dugaan tidak ditanganinya permohonan izin lokasi	19-21 Desember	Bupati Pesisir/Sekda Pesisir Selatan, Inspektorat Pesisir Selatan, BKD Pesisir Selatan, KPPT Pesisir Selatan, Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Pesisir Selatan
426.	Klarifikasi terhadap Kepala Puskesmas Air Itam dan koordinasi dengan Ombudsman RI Sumatera Selatan terkait laporan tentang Polres Pangkal Pinang	20 Desember	Kepala Puskesmas Air Itam, Polres Pangkal Pinang
427.	Investigasi terkait adanya dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh BRI Cabang Cabang Saumlaki. Investigasi dilakukan pada Kantor BRI Wilayah Maluku di Ambon.	23-24 Desember	Kantor BRI Wilayah Maluku di Kota Ambon.
428.	Investigasi luar kota atas laporan masyarakat tentang penguasaan lahan	23-24 Desember	Dinas Perkebunan Muara Enim, Sumsel
429.	Koordinasi dengan Sekretaris Desa Sebagin dan Kepala Dusun Desa Sebagin terkait kasus prona dan meminta klarifikasi secara langsung tentang penyerahan sertifikat Prona ke masyarakat Sebagin	27 Desember	Sekretaris Desa Sebagin dan Kepala Dusun Desa Sebagin
430.	Klarifikasi laporan masyarakat terkait sengketa tanah		Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kab. Gowa

LAMPIRAN II

KEGIATAN MONITORING

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
1.	Monitoring tindak lanjut laporan permasalahan pertanahan.	7 Januari	Kantor Pertanahan Kota Jayapura (BPN Kota Jayapura).
2.	Monitoring pelayanan di Rumah Sakit Umum Pemerintah M.Djamil Padang.	10 Januari	Rumah Sakit Umum Pemerintah M.Djamil Padang.
3.	Monitoring terhadap transparansi pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2 % yang dilakukan oleh PT Garuda terhadap rekanan travel agen.	16 Januari	PT Garuda Indonesia.
4.	Monitoring pelayanan di Kantor Samsat Kota Padang.	17 Januari	Kantor Samsat Kota Padang.
5.	Monitoring pelayanan di Bank BTPN Wilayah Sumatera Barat.	1 Februari	Bank BTPN Wilayah Sumatera Barat.
6.	Monitoring kondisi pelayanan jembatan timbang di Kab. Labuhanbatu.	4-7 Februari	Dinas Pekerjaan Umum Kab Labuhanbatu.
7.	Monitoring tindak lanjut laporan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengiriman berkas kasasi atas perkara nomor 103/PID.B/2004/PN.KTP.	6 Februari	Pengadilan Negeri Ketapang.
8.	Monitoring pelayanan di RSUP M.Djamil Padang.	7 Februari	RSUP M.Djamil Padang.
9.	Monitoring pelayanan di Kantor Samsat Kota Padang.	8 Februari	Kantor Samsat Kota Padang.
10.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat.	11 Februari	Badan Meteorologi dan Geofisika.
11.	Monitoring tindak lanjut laporan permasalahan pertanahan.	12 Februari	Kantor Pertanahan Kota Jayapura (BPN Kota Jayapura).
12.	Monitoring terkait laporan mengenai belum adanya putusan atas permohonan sengketa konsumen yang dimohonkan Pelapor.	19 Februari	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
13.	Monitoring laporan perkembangan penyidikan kasus-kasus yang ditangani penyidik Polres TTS dan pelayanan Rutan Soe.	20-23 Februari	1. Polres TTS. 2. Rutan Soe.
14.	Monitoring ke sejumlah layanan publik di Kab. Barito Kuala.	25-28 Februari	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
15.	Monitoring pelayanan publik di Kab Limboto.	26 Februari-2 Maret	Pemerintah Kabupaten Limboto
16.	Monitoring pelayanan publik di Kab. Hulu Sungai Selatan.	4-7 Maret	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
17.	Monitoring penanganan laporan mengenai tuntutan tanah masyarakat Desa Alur Cempedak Kab Langkat seluas 237,24 Hektar yang masih dikuasai PT Jaya Baru Pertama yang tidak memiliki HGU terhadap tanah tersebut.	5-6 Maret	Pemerintah Kabupaten Langkat.
18.	Monitoring pelayanan publik di Kab. Limboto.	5-9 Maret	Pemerintah Kabupaten Limboto
19.	Monitoring pelayanan KTP di Kantor Kelurahan Bukit Duri, Kec Tebet.	6 Maret	Pemerintah Kota Jakarta Selatan
20.	Monitoring pelayanan publik di Ogan Komering Ulu pasca terjadi pengrusakan kantor Mapolres Ogan Komering Ulu.	13-15 Maret	Pemerintah Kab Ogan Komering Ulu
21.	Monitoring pelayanan di Kantor Imigrasi Klas IA Padang.	13 Maret	Kantor Imigrasi Klas IA Padang
22.	Monitoring pelayanan publik di Pemerintah Kota Pematang Siantar.	12-15 Maret	1. RSUD. 2. Dinas Kependudukan dan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
			Catatan Sipil. 3. Kantor Pertanahan. 4. Kantor SAMSAT. 5. Sat Lantas Polres. 6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. 7. Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tanah. 8. Kantor Urusan Agama.
23.	Monitoring pelayanan di Kantor KP2T.	14 Maret	Kantor KP2T.
24.	Monitoring pelayanan di Kantor Catatan Sipil.	15 Maret	Kantor Catatan Sipil.
25.	Monitoring pelayanan RSUD, Dinas Kependudukan, BPN, Kantor SAMSAT, Satlantas Polres, Badan Perizinan, Kantor Imigrasi, Rutan dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Sikka.	19-22 Maret	Pemerintah Kabupaten Sikka.
26.	Monitoring pelayanan publik di Kab. Kota Baru, Kalimantan Selatan.	19-22 Maret	
27.	Monitoring pelayanan publik di Kabupaten Jember.	20-23 Maret	1. RSUD Kab Jember. 2. Kantor Pertanahan Kab Jember. 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Jember. 4. Samsat Kab Jember. 5. Satlantas Polres Kab Jember. 6. Badan Pelayanan Perijinan Kab Jember. 7. KUA Kab Jember. 8. Kantor Imigrasi Klas II Jember.
28.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kab Berau.	25-26 Maret	1. RSUD Dr. Abdul Rivai Kab. Berau. 2. Kantor Imigrasi Kab. Berau. 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Berau.
29.	Monitoring pelayanan publik di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.	25-28 Maret	1. RSUD. 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Kantor Pertanahan. 4. Kantor SAMSAT. 5. Sat Lantas Polres. 6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. 7. Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tanah. 8. Kantor Urusan Agama.
30.	Monitoring pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.	25-28 Maret	1. RSUD. 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Kantor Pertanahan. 4. Kantor SAMSAT. 5. Sat Lantas Polres. 6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. 7. Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tanah. 8. Kantor Urusan Agama.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
31.	Monitoring penyelesaian laporan : 1. Terkait jabatan Kepala DesaKempleng yang sejak 6 Februari 2012 ditetapkan menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Mapolres Kediri. 2. Perkara pidana sebagaimana terdaftar dalam register LP No. 83/II/2010/Biro Ops tanggal 23 Februari 2010.	26-29 Maret	Polres Kediri.
32.	Monitoring tindaklanjut laporan mengenai : 1. Pencairan beasiswa di UT. 2. Penundaan berlarut proses laporan tindak pidana di Polres Kediri. 3. Pemberian sanksi Kades Kempleng Kec Purwosari. 4. Tunjangan profesi (TPP) .	26-29 Maret	1. Dinas Pendidikan Kab Jombang. 2. Pemerintah Kab Kediri 3. Polresta Kediri. 4. Pemerintah Kab Tulung Agung.
33.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak.	1 April	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.
34.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat terhadap pelayanan di Propam Polda Jateng.	1 April	Propam Polda Jateng.
35.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak.	2 April	KUA Kota Pontianak.
36.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD Abdul Muluk.	2 April	RSU Abdul Muluk.
37.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Samsat Kota Pekanbaru.	2 April	UPT Samsat Kota Pekanbaru
38.	Monitoring tindak lanjut laporan mengenai: 1. Pengangkatan jabatan struktural di Kab Purbalingga. 2. Pengajuan kredit ke Bank BPD Jawa Tengah.	2-5 April	1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Bank BPD Jawa Tengah
39.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik.	3 April	Samsat Kalimantan Barat.
40.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung.	3 April	Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung.
41.	Monitoring tindak lanjut atas penundaan medis untuk cuci darah pada pasien gagal ginjal.	4 April	RSU Abdoel Moelok Provinsi Lampung.
42.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.	5 April	Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru
43.	Monitoring pelayanan di RSUD Rasyidin Padang.	9 April	RSUD Rasyidin Padang.
44.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Pekanbaru.	11 April	UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.
45.	Monitoring tindak lanjut pelaksanaan hasil mediasi antara PT PLN (Persero) dengan warga Desa Nlegi, Desa Beji, Desa Bander dan desa Salam Kec pathuk Kab. Gunung Kidul.	12 April	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi jaringan Jawa Bali III.
46.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di BPN Kota Pekanbaru.	15 April	BPN Kota Pekanbaru.
47.	Monitoring pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA di Bandarlampung.	16 April	SMA I Bandarlampung.
48.	Monitoring pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA di Bandarlampung.	16 April	SMA Utama I Bandarlampung.
49.	Monitoring pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013 tingkat SMA sederajat di Wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.	16-17 April	Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
50.	Monitoring pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013 tingkat SMA sederajat di Wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.	16-17 April	Dinas Pendidikan Kota Depok.
51.	Monitoring pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013 tingkat SMA sederajat di Wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.	16-17 April	Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
52.	Monitoring pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013 tingkat SMA sederajat di Wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.	16-17 April	Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
53.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di KUA Kota Pekanbaru.	17 April	KUA Kota Pekanbaru.
54.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandarlampung.	17 April	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandarlampung.
55.	Monitoring perkembangan penanganan laporan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	17 April	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar.
56.	Monitoring perkembangan penanganan laporan masyarakat di RSUD Badung.	17 April	Rumah Sakit Umum Daerah Badung.
57.	Monitoring pelaksanaan ujian nasional di Kota Balikpapan.	17-19 April	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
58.	Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional.	18-23 April	Dinas Pendidikan Nasional Kota Denpasar.
59.	Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional.	18-23 April	Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Badung.
60.	Monitoring perkembangan penanganan laporan konflik tanah Subak Kota Pala Tabanan.	22 April	Kantor Pertanahan Tabanan.
61.	Monitoring laporan pembangunan pagar perumahan Villa Bukit Piranha yang tidak sesuai dengan Site Plan Advice Planning (AP) dan IMB.	22-23 April	Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.
62.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana.	23-24 April	Samsat Jembrana, Bali.
63.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana.	23-24 April	Kepolisian.
64.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana.	23-24 April	Badan Pertanahan.
65.	monitoring pelaksanaan ujian nasional di SMP Jembrana.	23-24 April	Dinas Pendidikan Basional Kabupaten Jembrana.
66.	Monitoring di Kabupaten Minahasa.	23-26 April	
67.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng, Bali.	25-26 April	Samsat.
68.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng, Bali.	25-26 April	Kepolisian.
69.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng, Bali.	25-26 April	Badan Pertanahan
70.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng, Bali.	25-26 April	BKD
71.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPMP) Kota Bandarlampung.	30 April	Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPMP) Kota Bandarlampung.
72.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Satlantas Polresta Pekanbaru.	1 Mei	Satlantas Polresta Pekanbaru.
73.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda.
74.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	RSUD Abdul Wahab Sjahrani Kota Samarinda.
75.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.
76.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda.
77.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	Kantor Bersama SAMSAT Samarinda.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
78.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda.
79.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	Rumah Tahanan Negara Klas IIA Kota Samarinda.
80.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu.
81.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kota Samarinda.	1-3 Mei	Kantor Imigrasi Klas I Samarinda.
82.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat terhadap pelayanan di Polres Grobogan.	2 Mei	Polres Grobogan.
83.	Monitoring pelayanan publik di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali.	2 Mei	Kantor Imigrasi Denpasar.
84.	Monitoring pelayanan publik terkait sidang gugatan cerai warga negara asing.	6 Mei	Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Badung.
85.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di RSUD Abunawas.	6-8 Mei	RSUD Abunawas.
86.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di KUA Kec. Poasia Kota Kendari.	6-8 Mei	KUA Kec. Poasia Kota Kendari.
87.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di BPN Kota Kendari.	6-8 Mei	BPN Kota Kendari.
88.	Monitoring tindak lanjut laporan terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Akte Kelahiran.	8 Mei	Pengadilan Negeri Bandar Lampung.
89.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat terhadap pelayanan di Polsek Kudus.	8 Mei	Kepolisian Sektor Kudus.
90.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat terhadap pelayanan di Polres Kudus.	8 Mei	Kepolisian Resor Kudus.
91.	Monitoring tindak lanjut laporan masalah tanah di Uluwatu Badung, Bali.	8 Mei	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
92.	Monitoring tindak lanjut laporan terkait pelayanan pasien yang disinyalir ditelantarkan akibat tak mampu membayar.	10 Mei	RSUD Sanglah Denpasar, Bali.
93.	Monitoring laporan terkait praktek percaloan tiket pesawat di Bandara Ngurah Rai.	12 Mei	Bandara Ngurah Rai, Bali.
94.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Samsat Kota Bandar Lampung.	14 Mei	Samsat Kota Bandar Lampung.
95.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kota Semarang.	15 Mei	Kantor Pertanahan Kota Semarang.
96.	Monitoring pelayanan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.	15 Mei	Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.
97.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan Satuan Pelayanan Administrasi di Poltabes Bandar Lampung.	15 Mei	Poltabes Bandar Lampung.
98.	Monitoring tindak lanjut penanganan laporan masyarakat mengenai keberatan mahasiswa atas adanya uang praktikum yang dibebankan kepada mahasiswa yang telah lulus praktikum dan kurang lengkapnya layanan perpustakaan STAIN. Permasalahan tanah hibah Pelapor sebagai tempat gereja GpDI Gunung Mas.	15-17 Mei	Kementerian Agama.
99.	Monitoring tindak lanjut penanganan permasalahan terkait HGU yang dimiliki PT Unggul Lestari yang diduga telah mengambil sebagian tanah garapan masyarakat yang tidak termasuk lokasi HGU.	15-17 Mei	Pemerintah Kota Waringin Timur.
100.	Monitoring tindak lanjut penanganan permasalahan tanah hibah sebagai tempat gereja GpDI Gunung Mas.	15-17 Mei	Pemerintah Kota Waringin Timur.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
101.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah.	16 Mei	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah.
102.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di SIM Kantor Imigrasi Bandar Lampung	16 Mei	Kantor Imigrasi Bandar Lampung.
103.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di KUA Kec Telukbetung Utara.	17 Mei	KUA Kec Telukbetung Utara.
104.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Samsat Pedurungan.	17 Mei	Samsat Pedurungan.
105.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di KUA Pedurungan.	17 Mei	KUA Pedurungan.
106.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.	20 Mei	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.
107.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.	20 Mei	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.
108.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Minahasa.	20-24 Mei	Pemerintah Kabupaten Minahasa.
109.	Monitoring penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Udayana.	21 Mei	Universitas Udayana, Bali.
110.	Monitoring pelayanan di Kantor Samsat Kota Padang.	21 Mei	Kantor Samsat Kota Padang.
111.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.	21-24 Mei	Kantor Samsat Palu.
112.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.	21-24 Mei	Lembaga Pemasarakatan Petobo.
113.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.	21-24 Mei	Kantor Imigrasi.
114.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.	21-24 Mei	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Prov. Sulawesi Tengah.
115.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.	21-24 Mei	KUA Palu Barat.
116.	Monitoring pelayanan sarana pendidikan yang rusak dan ambruk di SD Senganan I Penebel.	22 Mei	Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tabanan, Bali.
117.	Monitoring pelayanan di Kantor Sat Lantas Polresta Padang.	23 Mei	Kantor Sat Lantas Polresta Padang.
118.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di RSUD Kota Semarang.	23 Mei	RSUD Kota Semarang.
119.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Pekanbaru.	24 Mei	Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Pekanbaru.
120.	Monitoring pelayanan di Kantor Urusan Agama Padang Timur.	27 Mei	Kantor Urusan Agama Padang Timur.
121.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di RS Dadi Tjokrodipo.	28 Mei	RS Dadi Tjokrodipo.
122.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.	29 Mei	RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.
123.	Monitoring pelayanan di Lapas Kelas II A Pekanbaru.	30 Mei	Lapas Kelas II A Pekanbaru.
124.	Monitoring atas kesepakatan tentang standar pelayanan dan penetapan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2007 serta pemberlakuan tanda terima/kwitansi sebagai bukti pertanggung jawaban.	30 Mei	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
125.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Kota Semarang.	30 Mei	Satuan Lalu Lintas Kota Semarang.
126.	Monitoring pelayanan di SMP Negeri 8 Kota Padang.	30 Mei	SMP Negeri 8 Kota Padang.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
127.	Monitoring tindak lanjut proses ganti rugi pembangunan Jalan Tol Cijago bagi warga Kukusan Depok, Jawa Barat.	31 Mei	1. Tim Pembebasan Tanah (TPT). 2. Panitia Pengadaan Tanah (P2T).
128.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Banda Aceh.	Juni	Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh.
129.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Banda Aceh.	Juni	Kantor Samsat Lamteumen, Banda Aceh.
130.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Banda Aceh.	Juni	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.
131.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Banda Aceh.	Juni	Kantor Imigrasi Banda Aceh.
132.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Banda Aceh.	Juni	Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh.
133.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Banda Aceh.	Juni	Polresta Banda Aceh.
134.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Banda Aceh.	Juni	RSUD Meuraxa.
135.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Banda Aceh.	Juni	Kantor KPPTSP Kota Banda Aceh.
136.	Monitoring pelayanan di Kantor Sat Lantas Polresta Padang.	3 Juni	Kantor Sat Lantas Polresta Padang.
137.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian.	3 Juni	Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
138.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Perizinan Kota Kendari, Kantor Samsat dan Dinas Capil Kota Kendari.	3-5 Juni	Kantor Perizinan Kota Kendari.
139.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Samsat Kota Kendari.	3-5 Juni	Kantor Samsat Kota Kendari.
140.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Dinas Catatan Sipil Kota Kendari.	3-5 Juni	Dinas Catatan Sipil Kota Kendari.
141.	Monitoring pelayanan di RSUD Rasyidin Padang.	4 Juni	RSUD Rasyidin Padang.
142.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan Kantor Imigrasi Kota Semarang.	5 Juni	Kantor Imigrasi Kota Semarang
143.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	Juni	Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda.
144.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	Juni	RSUD Abdul Wahab Sjahrani Kota Samarinda.
145.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	Juni	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda.
146.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	Juni	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda.
147.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	Juni	Kantor Bersama SAMSAT Samarinda.
148.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	Juni	Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda.
149.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	5-6 Juni	Rumah Tahanan Negara Klas IIA Kota Samarinda.
150.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	5-7 Juni	Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu.
151.	Monitoring tindak lanjut hasil supervisi di Kota Samarinda.	5-8 Juni	Kantor Imigrasi Klas I Samarinda.
152.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Pelayanan SIM Polres Kendari.	10-12 Juni	Kantor Pelayanan SIM Polres Kendari.
153.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Imigrasi.	10-12 Juni	Kantor Imigrasi Kendari.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
154.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Lapas Kendari.	10-12 Juni	Lapas Kendari.
155.	Monitoring pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang.	12 Juni	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang.
156.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat	12 Juni	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jawa Tengah.
157.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPMP) Kota Bandarlampung	12 Juni	Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPMP) Kota Bandarlampung
158.	Monitoring laporan mengenai tidak diteruskannya SHM hasil LC tanah untuk 700 nelayan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.	12-15 Juni	1. Pemerintah Kabupaten Jember. 2. Polsek Cermee Bondowoso.
159.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat.	13 Juni	SMKN 2 Kota Semarang.
160.	Monitoring pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Padang.	13 Juni	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Padang.
161.	Monitoring pelayanan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.	14 Juni	Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
162.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandarlampung.	17 Juni	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandarlampung.
163.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat	17 Juni	PT.Indosat area Jawa Tengah.
164.	Monitoring pelayanan di Kantor Urusan Agama Padang Timur.	18 Juni	Kantor Urusan Agama Padang Timur.
165.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung.	18 Juni	Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung.
166.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan pada Badan Perizinan Terpadu Kota Semarang.	19 Juni	Badan Perizinan Terpadu Kota Semarang
167.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane.	20 Juni	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane
168.	Monitoring pelaksanaan PPDB 2013 di Kab. Purworejo.	20 Juni	1. SD N I Purworejo. 2. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Purworejo.
169.	Monitoring pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Kota Padang.	24 Juni	Kantor Badan Pertanahan Kota Padang.
170.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kampar.	24 Juni	SMPN I Siak Hulu Kab Kampar.
171.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kampar.	24 Juni	SDN 028 Kubang Jaya Kab Kampar.
172.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kampar.	24 Juni	SMAN 2 Siak Hulu Kab Kampar.
173.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru.	24 Juni	SMAN 1 Pekanbaru.
174.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru.	24 Juni	SMPN 1 Pekanbaru.
175.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru.	24 Juni	SDN 111 Suka Karya Pekanbaru.
176.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru	24 Juni	SMKN 6 Pekanbaru.
177.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru.	24 Juni	SMAN 11 Pekanbaru.
178.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru.	24 Juni	SMPN 26 Pekanbaru.
179.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kampar.	25 Juni	SDN 59 Siak Hulu Kab Kampar.
180.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kampar.	25 Juni	SMPN 29 Kab Kampar.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
181.	Monitoring pelayanan di SD Simpang Haru Kota Padang.	25 Juni	SD Simpang Haru Kota Padang.
182.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru.	25 Juni	SMAN 1 Kota Semarang.
183.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru.	25 Juni	SMKN 7 Kota Semarang.
184.	Monitoring laporan Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia Jombang terkait tidak transparannya proses seleksi honorer kategori 2 (K2) oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.	25-28 Juni	Pemerintah Kabupaten Jombang.
185.	Monitoring laporan Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia Jombang terkait tidak transparannya proses seleksi honorer kategori 2 (K2) oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.	25-28 Juni	BKD Kabupten Mojokerto.
186.	Monitoring laporan Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia Jombang terkait tidak transparannya proses seleksi honorer kategori 2 (K2) oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.	25-28 Juni	Kejaksaan Negeri Mojokerto.
187.	Monitoring laporan Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia Jombang terkait tidak transparannya proses seleksi honorer kategori 2 (K2) oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.	25-28 Juni	Sekolah MAN Sooko Mojokerto.
188.	Monitoring laporan Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia Jombang terkait tidak transparannya proses seleksi honorer kategori 2 (K2) oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.	25-28 Juni	Polres Gresik.
189.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kab Demak.	26 Juni	SMAN 1 Kabupaten Demak.
190.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kab Demak.	26 Juni	SMKN 1 Kabupaten Demak.
191.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru.	26 Juni	MAN 1 Pekanbaru.
192.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kab Indragiri Hilir.	26 Juni	MTsN Tembilahan Kab Indragiri Hilir.
193.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru di Kab Indragiri Hilir.	26 Juni	MAN Tembilahan Kab Indragiri Hilir.
194.	Monitoring proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta tahun ajaran 2013/2014 tingkat SD, SMP dan SMA.	26 Juni	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
195.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat terkait pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang.	26 Juni	Dinas Kesehatan Kota Semarang.
196.	Monitoring pelayanan di SMP Negeri 1 Kota Padang.	26 Juni	SMP Negeri 1 Kota Padang.
197.	Monitoring pelaksanaan pembagian BLSM di Kantor Pos Renon Denpasar yang secara nasioanla ditengarai banyak kekurangannya dalam sistem penentuan penerima BLSM.	26 Juni	Kantor Pos Renon Denpasar.
198.	Monitoring tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelayanan Majelis Pengawas Notaris.	27 Juni	Majelis Pengawas Notaris Jawa Tengah.
199.	Monitoring pelayanan di SMA Negeri 1 Kota Padang.	27 Juni	SMA Negeri 1 Kota Padang.
200.	Monitoring penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bandarlampung.	27 Juni	Dinas Pendidikan Nasional Kota Bandarlampung.
201.	Monitoring proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta tahun ajaran 2013/2014 tingkat SD, SMP dan SMA.	28 Juni	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
202.	Monitoring pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Kota Padang.	28 Juni	Kantor Badan Pertanahan Kota Padang.
203.	Monitoring pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013.	Juni	Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
204.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru.	28 Juni	SMAN 1 Kabupten Semarang.
205.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru.	28 Juni	SMKN 1 Kabupaten Semarang.
206.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru.	28 Juni	SMKN 8 Kota Semarang.
207.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru.	29 Juni	SMAN 1 Kabupaten Kendal.
208.	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru.	29 Juni	SMKN 2 Kabupaten Kendal.
209.	Monitoring kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2013/ 2014	1 - 6 Juli	1. Pemerintah Kota Pontianak 2. Pemerintah Kabupaten Pontianak 3. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
210.	Monitoring pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru	2-3 Juli	SMAN 1 Kab. Pandaan Kab. Pasuruan
211.	Monitoring pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2013-2014 tingkat SD, SMP, dan SMA atau sederajat	8 - 9 Juli	Pemerintah Kota Tangerang
212.	Monitoring pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2013-2014 tingkat SD, SMP, dan SMA atau sederajat	8 - 9 Juli	Pemerintah Kota Bekasi
213.	Monitoring laporan Inisiatif terkait Biaya Daftar Ulang SMKN I Ponorogo	15-18 Juli	1. Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo; 2. SMKN I Ponorogo
214.	Monitoring ke Sekolah Gratis Masjid Terminal (Master) Kota Depok terkait rencana relokasi Master	22 Juli	Pemkot Depok
215.	Monitoring hasil koordinasi dengan BPK Perwakilan Kalbar mengenai dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap bantuan beasiswa mahasiswa D3 Poltekkes Jurusan Kebidanan dan Keperawatan yang berasal dari Kab. Mempawah oleh Poltekkes Pontianak	24 - 25 Juli	Pemda Kab. Mempawah Kalimantan Barat
216.	Monitoring Tindak Lanjut laporan masyarakat	29 Juli 2013	Kantor Pelelangan Negara
217.	Monitoring Laporan Masyarakat	30 Juli - 2 Agustus	1. Dinsonakertrans Kabupaten Pasuruan; 2. SMKN 1 Singosari Malang; 3. Lapas Klas I Wanita Malang; 4. Pemerintah Kabupaten Malang; 5. Kelurahan Jatimulyo, Kec. Lowokwaru Malang
218.	Monitoring pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013	Juni s/d Juli	Dinas Pendidikan Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara
219.	Monitoring pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Balikpapan		Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Balikpapan
220.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat	30 Agustus	Pemerintah Provinsi Papua
221.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat	4 September	Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura
222.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat	4 September	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
223.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat mengenai permasalahan pertanahan	17 - 19 September	1. Kantor Pertanahan Lampung Barat 2. Bank BRI Liwa Lampung Barat

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
224.	Monitoring tindak lanjut laporan tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 01 Mandor Kabupaten Landak dan SMP Negeri 01 Ngabang yang memungut biaya dari orang tua siswa baru	17 – 20 September	1. SMP Negeri 01 Mandor Kab. Landak 2. SMP Negeri 01 Ngabang Kalimantan Barat
225.	Monitoring tindak lanjut laporan masyarakat	18 September	Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura
226.	Monitoring pelaksanaan seleksi CPNS/CPNSD se-Sulawesi Tenggara	September-November	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
227.	Monitoring	30 September-4 Oktober	Lapas Klas II A Kota Tarakan dan Lapas Klas II B Kabupaten Nunukan
228.	Observasi ke unit pelayanan publik	1 Oktober	SKPD Kota Padang dan Prov. Sumbar
229.	Pemantauan ke BKD Kabupaten Pringsewu	4 Oktober	BKD Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
230.	Monitoring kegiatan penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang	4 Oktober	Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang
231.	Melakukan pengawasan CPNS (verifikasi pelamar)	4-5 Oktober	Kemenkumham Tanjungpinang
232.	Monitoring terhadap penghentian sementara pelayanan Jamsoskes Sumatera Selatan	5, 7, 8 Oktober	RS Muhammadiyah Palembang, Pemprov Sumatera Selatan
233.	Penyerahan rekomendasi kepada Walikota Semarang terkait tindakan Satpol PP Kota Semarang yang melalaikan kewajiban hukum	8 Oktober	Satpol PP Kota Semarang
234.	Monitoring terkait tidak dibayarkannya tunjangan fungsional non sertifikasi	8-11 Oktober	Bupati Tanah Datar, Inspektorat UPTD Dinas Pendidikan Tanjung Baru, KPPT Kab. Tanah Datar
235.	Monitoring pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2013 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Barat	8-11 Oktober	Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Prov. Jawa Barat
236.	Monitoring penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	8-12 Oktober	Disnaker Lombok Barat, Balai Terpadu TKI, Disnaker Lombok Timur, Kemenag Loteng, BP3TKI Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat
237.	Melakukan monitoring penerimaan CPNS tahun 2013	9-11 Oktober	Kota Metro dan Kab. Lampung Timur
238.	Monitoring ke Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	9-11 Oktober	Bupati Tanah Datar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Baru
239.	Melakukan pengawasan tes verifikasi dokumen dan tinggi badan CPNS Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan 2013	9-11 Oktober	Kantor Kemenkumham Wilayah Sumatera Selatan
240.	Melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS BPKP tahun 2013	10 Oktober	BKN Regional XII Prov. Riau
241.	Monitoring dalam kota sebagai tindak lanjut laporan masyarakat	10 Oktober	Rumah terlapor di Palembang
242.	Melakukan pengawasan CPNS	11 Oktober	Kemenkumham Tanjungpinang
243.	Penelitian ke obyek pelayanan publik	11 Oktober	Samsat Padang
244.	Menyaksikan Verifikasi dan Rekapitulasi Pelamar Calon PNS	11 Oktober	Kemenkumham Prov. Sumatera Utara
245.	Pemantauan ujian CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2013	11-12 Oktober	Kementerian Keuangan RI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
246.	Menyaksikan pelaksanaan tes lanjutan rekrutmen CPNS Kota Denpasar	12 Oktober	Kantor BKN Regional X Denpasar
247.	Pemantauan ujian CPNS Pemerintah Kota Depok	12-13 Oktober	Pemkot Depok
248.	Menyaksikan pelaksanaan tes lanjutan rekrutmen CPNS Kota Denpasar	14 Oktober	Kantor BKN Regional X Denpasar
249.	Melakukan pengawasan CPNS (verifikasi peserta ujian dan pengambilan kartu ujian)	16 Oktober	Bandara Hang Nadim, Kementerian Perhubungan Udara
250.	Penelitian ke obyek pelayanan publik	16 Oktober	PDAM Kota Padang
251.	Menyaksikan penyerahan Master Soal Ujian CPNS Pelamar Umum dari Pemprov ke Pemda di Sekretariat Pemprov Bali	16 Oktober	Kantor Sekretariat Pemprov Bali
252.	Menyaksikan proses pemeriksaan Kesehatan Pelamar Calon PNS	16 Oktober	Kemenkumham Prov. Sumatera Utara
253.	Monitoring pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2013 Kanwil. KEMENKUMHAM Prov. Jawa Barat (Tes Kesehatan & Samapta)	16 Oktober	GOR Padjajaran Bandung
254.	Monitoring laporan masyarakat yang diterima oleh Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Pontianak	16-18 Oktober	Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, RSUD Dr. Rubini, Kanwil Kemenag Kabupaten Pontianak
255.	Melakukan pemantauan CPNS tahun 2013	16-18 Oktober	BKD Kab. Lampung Tengah
256.	Melakukan pengawasan tes kesehatan dan kesamaptaan CPNS Kemenkumham Sumatera Selatan 2013	16-19 Oktober	Lapangan sepak bola Ariodillah Palembang
257.	Melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2013	17 Oktober	Kanwil Kemenkumham Prov. Riau
258.	Menyaksikan pelaksanaan tes kesehatan di Kantor Kemenkumham Bali	17 Oktober	Kantor Kemenkumham Wilayah Bali
259.	Monitoring pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2013 unjtuk Kategori II di Kota Bandung	17 Oktober	BKD Kota Bandung
260.	Melakukan pengawasan CPNS (verifikasi peserta dan pengambilan kartu ujian) dan pengawasan CPNS (kesemaptaan dan tinggi badan)	17-18 Oktober	Kementerian Perhubungan Laut Kijang dan Kemenkumham Tanjungpinang
261.	Melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2013	18 Oktober	SPN Pekanbaru
262.	Penelitian ke obyek pelayanan publik	18 Oktober	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
263.	Menyaksikan tes kesamaptaan Kemenkumham Bali	18 Oktober	Kantor Kemenkumham Bali
264.	Pengawasan rekrutmen CPNS Kabupaten Gianyar	18 Oktober	Kantor Sekretaris Daerah Kab. Gianyar
265.	Monitoring kasus dalam rangka penyusunan laporan sistemik reviu solar bersubsidi bagi nelayan di Bogor, Jawa Barat	18-20 Oktober	Distribusi Solar Bersubsidi Bagi Nelayan di Provinsi Jawa Barat
266.	Pengawasan Pembukaan Master Soal CPNS Pelamar Umum di Riau di PT. Binta Grafindo	19 Oktober	Pemda Kabupaten /Kota se-Riau
267.	Pengawasan CPNS Kemenkumham Bali	19 Oktober	Kemenkumham Bali
268.	Monitoring CAT CPNS Kementerian Dalam Negeri di IPDN	19-20 Oktober	IPDN Sumedang
269.	Melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2013	21 Oktober	BKN Regional XII Prov. Riau
270.	Penelitian ke obyek pelayanan publik	21 Oktober	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar
271.	Menyaksikan penyerahan master soal ujian CPNS Kategori Dua dari Pemprov ke Pemda di Kantor Pos Denpasar	21 Oktober	Kantor Pos Denpasar

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
272.	Melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2013	22 Oktober	Kanwil Kemenkumham Prov. Riau
273.	Penelitian ke obyek pelayanan publik	22 Oktober	Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat
274.	Penelitian ke obyek pelayanan publik	23 Oktober	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sumbar
275.	Monitoring Pembukaan master soal CPNS Kab. Bogor Tahun 2013	23-24 Oktober	BKD Kab. Bogor
276.	Monitoring/pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan seleksi CPNS	23-25 Oktober	Pemkot Singkawang
277.	Penelitian ke obyek pelayanan publik	24 Oktober	BKD Prov. Sumatera Barat
278.	Menyaksikan pembukaan master soal ujian CPNS	25 Oktober	Lembaga Sandi Negara
279.	Monitoring lapangan ke Satker Maguwo	28 Oktober	Kementerian PU
280.	Monitoring laporan masyarakat di Provinsi Jawa Timur	28-31 Oktober	Kantor Pertanahan Surabaya I, Pertamina Region Jawa Timur, Polres Bojonegoro, Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, Pemprov Jawa Timur
281.	Monitoring laporan Rohmanudin terkait inkonsistensi Panwaslu atas batas waktu penyerahan berkas	29 Oktober	Panwaslu Kebumen
282.	Monitoring pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 Kategori II di Kabupaten Subang	29-30 Oktober	Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Inspektorat Daerah Kabupaten Subang
283.	Pengawasan proses seleksi CPNS di Kabupaten Ogan Komering Ilir	29-30 Oktober	Kabupaten Ogan Komering Ilir
284.	Pertemuan dengan beberapa jajaran instansi penyelenggara negara di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Sukabumi	29 Oktober - 1 November	Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Negeri Cibadak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dan Pemkab Sumedang
285.	Melakukan pemantauan terkait persiapan, tahapan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2013	30-31 Oktober	BKD Kab. Lampung Selatan
286.	Monitoring ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Kantor Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	30 Oktober - 2 November	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
287.	Monitoring pendistribusian soal dan LJK Tenaga Honorer Kategori II	31 Oktober	SECAPA TNI AD Bandung
288.	Pengawasan proses seleksi CPNS di Kabupaten Muara Enim	31 Oktober - 1 November	Kabupaten Muara Enim
289.	Tindak lanjut penanganan kasus	Oktober	Pemerintah Kabupaten Keerom
290.	Monitoring penerimaan CPNS melalui Posko Aduan	Oktober	
291.	Penanganan kasus oleh pelapor penerimaan CPNS K2	Oktober	Badan Koordinasi Pendidikan dan Latihan Aparatur Provinsi Papua
292.	Monitoring penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham Prov. Papua	Oktober	Kanwil Kemenkumham Prov. Papua
293.	Monitoring Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Oktober	20 SKPD di Kota Jayapura dan Prov. Papua
294.	Monitoring pelaksanaan seleksi CPNS/CPNSD Sulawesi Tenggara	Oktober	Instansi terkait di Sultra

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
295.	Monitoring	Oktober	SKPD Pemprov Kaltim di Kota Samarinda dan SKPD Pemkot Balikpapan
296.	Pengawasan penerimaan CPNS 2013	Oktober-Desember	Prov. Sulawesi Tengah
297.	Pengawasan Seleksi Nasional CPNS di wilayah Provinsi Banten		Prov. Banten
298.	Monitoring pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 dan pengawasan pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD)/Tes Kompetensi Bidang (TKB) untuk Kategori II	1-4 November	Sekda, Kepala BKD, Inspektorat Daerah Kab. Garut
299.	Pemantauan seleksi CPNS Kota Bandung Tahun 2013 dari Tenaga Honorar Kategori II	1-4 November	Pemkot Bandung
300.	Pemantauan seleksi CPNS Kota Bogor Th. 2013	1-4 November	Pemkot Bogor
301.	Menyaksikan bongkar muat dan distribusi soal ujian TKD	2 November	Kantor Pos Denpasar
302.	Melakukan pengawasan tes CPNS Kab. Ogan Komering Ilir	2 November	Pemkab Ogan Komering Ilir
303.	Pemantauan pelaksanaan seleksi CPNS	2-4 November	Pemprov. Lampung Pemkab dan Pemkot di Prov. Lampung
304.	Monitoring pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2013 dan Pengawasan Pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang untuk Kategori II di Kab. Subang	2-4 November	Pemkab. Subang
305.	Melakukan pengawasan penerimaan CPNS	2-6 November	Pemkab. Natuna
306.	Melakukan pengawasan penerimaan CPNS	2-6 November	Pemkab. Anambas
307.	Pemantauan pelaksanaan ujian CPNS	3 November	Pemprov. Kalimantan Tengah
308.	Monitoring pelaksanaan ujian CPNS K2	3 November	Perwakilan Sulbar
309.	Mengawasi pelaksanaan Ujian CPNS secara serentak di provinsi Bali	3 November	Badung, Tabanan, Karangasem, dan Denpasar
310.	Monitoring CPNS	3 November	Dilakukan oleh Perwakilan Kep. Bangka Belitung
311.	Monitoring penerimaan CPNS	3-4 November	Pemkab. Kendal Pemkab. Pekalongan
312.	Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian CPNS tahun 2013	3-4 November	Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Kab. Boalemo
313.	Monitoring penerimaan CPNS	4 November	Pemkab. Kudus Pemkab. Pati
314.	Monitoring Pembongkaran Tower BTS yang belum memiliki IMB oleh Satpol PP Kota Semarang di Kec. Gayam sari	6 November	Satpol PP Kota Semarang
315.	Melakukan pengawasan tes CPNS Kabupaten Muara Enim	6-8 November	Pemkab Muara Enim
316.	Pemantauan ujian CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013	10-12 November	Kantor BKN Regional III Bandung
317.	Monitoring terhadap pelayanan publik di PDAM Tirta Mayang Jambi	11 November	Kantor Pelayanan Benteng, Kantor Pusat PDAM Jambi
318.	Menyaksikan pelaksanaan test lanjutan rekrutmen CPNS Kantor Kemenkumham RI	11 November	Kantor BKN Regional X Denpasar
319.	Melakukan pengawasan tes CPNS Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan	11-13 November	Kantor BKN Prov. Sumatera Selatan
320.	Monitoring pelaksanaan CPNS Tahun 2013 pada Kanwil. KEMENKUMHAM Prov. Jabar (<i>Computer Assisted Test</i>)	11-14 November	BKN Kanreg. III Bandung

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
321.	Monitoring ke Provinsi Bengkulu untuk melakukan pertemuan dengan pihak Bank BRI Unit Pat Petulai, Bank BRI Cabang Curup, Kejaksaan Negeri Curup, Kepolisian Resor Rejang Lebong dan Bupati Bengkulu Utara	11-15 November	Bank BRI Cabang Curup, Kejaksaan Negeri Curup, Kepolisian Resor Rejang Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Pimpinan SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 3 Kabupaten Kaur Selatan
322.	Monitoring terhadap pelayanan publik	12 November	Lapas Klas II A Jambi
323.	Melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2013	12 Nopember	BKN Regional XII Prvin. Riau
324.	Melakukan pengawasan ujian CAT penerimaan CPNS 2013	12-13 November	Kemenkumham Kepri
325.	Monitoring laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	12-15 November	Dinas Kehutanan Kab. Ende, Univ. Flores, Bagian Organisasi Setda Kab. Ende
326.	Melakukan monitoring dan pencarian data penelitian kepatuhan Pemda dalam pelayanan publik, dan koordinasi dengan RSUD Prov. Kepri dan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang	13-14 November	SKPD Prov. Kepri dan RSUD Prov. Kepri
327.	Monitoring laporan masyarakat di Kota Padang Panjang	13-15 November	SMA 1 Sumbar, MAN Kotabaru, Kemenag Kota Padang Panjang, Tim Seleksi KPU Kota Padang Panjang
328.	Monitoring Aplikasi Administrasi Laporan dan Pengelolaan BMN	13-16 November 2013	Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
329.	Monitoring ke Kabupaten Kupang dan koordinasi dengan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Kupang	14-16 November	Biro Organisasi Setda Kabupaten Kupang
330.	Monitoring RSUD Kabupaten Bangka terkait pengaduan dari masyarakat	18 November	RSUD Kab. Bangka
331.	Monitoring dan mengawasi penerimaan CPNS	18-21 November	Pemkab. Tanatidung Pemkab Bulungan
332.	Menyaksikan pengembalian biaya TKI	21 November	Kantor Dinas Nakertrans provinsi Bali
333.	Monitoring guna menyusun laporan investigasi atas prakarsa sendiri (investigasi sistemik) tentang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu khususnya minyak solar bersubsidi kepada nelayan	21-24 November	Instansi terkait di Kabupaten Sukabumi, Prov. Jawa Barat
334.	Monitoring Administrasi Keuangan di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan	25-28 November	BPP Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan
335.	Monitoring Administrasi Keuangan di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi DI Yogyakarta	25-28 November	BPP Perwakilan Ombudsman Provinsi DI Yogyakarta
336.	Monitoring laporan masyarakat di Provinsi Jawa Barat	25-28 November	Kejaksaan Negeri Bandung, Disnaker Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bandung
337.	Monitoring laporan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah	25-28 November	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kendal, SMAN 1 Kendal, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Demak, SMP Satu Atap Sambiroto, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
338.	Monitoring ke BPSK Kota Padang atas dugaan tidak ditanganinya gugatan perkara konsumen	26 November	BPSK Kota Padang
339.	a. Monitoring tindak lanjut kasus pungutan dana sumbangan pengembangan institusi	26-27 November	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kendal

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
	terhadap para siswa SMAN 1 Kendal b. Monitoring tindak lanjut kasus pungutan dana setelah kelulusan terhadap siswa di SDN Sambiroto Kab. Demak		b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak c. SMAN 1 Kendal d. SDN Sambiroto Demak
340.	Monitoring pelayanan di Rumah Sakit	27 November	RSUD Ulin dan RSUD Ansyari Saleh
341.	Monitoring ke Rumah Sakit M. Djamil Padang	27 November	RSUP M. Djamil Padang
342.	Melakukan pengawasan demonstrasi ke PLN Wilayah Babel sekaligus klarifikasi ke General Manager PLN Wilayah Bangka Belitung terkait byar pet PLN	27 November	PLN Wilayah Bangka Belitung
343.	Monitoring Administrasi Keuangan di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau	29 November – 2 Desember	BPP Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau
344.	Monitoring penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua	November	Kantor Pelelangan Negara
345.	Monitoring pengurusan persyaratan tes CPNS dan IPDN	November	Polresta Jayapura dan RS Bhayangkara
346.	Monitoring ke BPN Kota Jayapura	November	Kantor BPN Kota Jayapura
347.	Monitoring tes kesamaptaaan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua	November	Lapangan Brimobda Polda Papua
348.	Melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS BPKP tahun 2013	November	
349.	Monitoring tes CAT penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua	November	Kantor BKN Provinsi Papua
350.	Monitoring ke SKPD di Provinsi Papua (Program Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)	November	Perijinan Satu Pintu Provinsi Papua, Dinas PU Provinsi Papua, Perindakop, BKPL, Dinas Perhubungan Provinsi Papua
351.	Monitoring ke SKPD di Kota Jayapura (Program Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)	November	BPSDA Kota Jayapura, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah
352.	Monitoring pelaksanaan seleksi CPNS/CPNSD Sulawesi Tenggara	November	Instansi terkait di Sultra
353.	Monitoring	November	SKPD Pemrov Kaltim di Kota Samarinda dan SKPD Pemkot Balikpapan
354.	Rapat koordinasi pengawasan CPNS di Sulawesi Tengah	November	Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah
355.	Rapat koordinasi pengawasan CPNS dengan BIN Perwakilan Sulawesi Tengah	November	Kantor BIN Sulawesi Tengah
356.	Monitoring laporan masyarakat di Kabupaten Mempawah oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat	3-4 Desember	Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak
357.	Monitoring di RSUD dr. Soedarso	4,5,18 Desember	Kab. Kubu Raya
358.	Monitoring ke BPSK Kota Padang	5 Desember	BPSK Kota Padang
359.	Meninjau secara langsung lapangan dan monitoring pertemuan warga Cangiling dengan PDAM Badung terkait distribusi air di Kabupaten Badung	5 Desember	Banjar Cangiling, Desa Balangan, Jimbaran Badung
360.	Monitoring di Pontianak	9 Desember	Kab. Pontianak
361.	Menghadiri rapat persiapan pengumuman CPNS Kota di Kantor Walikota Denpasar.	10 Desember	Kantor Walikota Denpasar.
362.	Monitoring di Kantor BRI Cabang Kupang	16 Desember	BRI Cabang Kupang
363.	Monitoring kasus terkait belum terbitnya sertifikat pelapor	16 Desember	Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
364.	Memonitoring pelaksanaan hasil survay kepatuhan SKPD terhadap UU 25 Tahun 2009	17 Desember	Kantor Dinas Trantib Kota Denpasar
365.	Monitoring hasil mediasi laporan LAM (Lingkar Advokasi Mahasiswa) mengenai penertiban hotel tanpa IMB	17-19 Desember	Kota Singkawang
366.	Menghadiri rapat penyerahan hasil passing grade kelompok Pelamar Umum penerimaan CPNS Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, dan kabupaten jembrana di Kantor BKD Provinsi Bali	20 Desember	Kantor BKD Provinsi Bali
367.	Menghadiri rapat penerimaan hasil test kelompok Pelamar Umum penerimaan CPNS Kota Denpasar	20 Desember	Kantor Walikota Denpasar
368.	Menghadiri rapat Pengumuman penerimaan CPNS Kabupaten Karangasem	21 Desember	Kantor Bupati Karangasem
369.	Pengawasan Pelaksanaan Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Pengadaan CPNSD Kota Denpasar Formasi Th 2013	24 Desember	Sekretaris Kota Denpasar
370.	Monitoring tindak lanjut penanganan kasus	Desember	Pemkab Jayapura
371.	Monitoring tindak lanjut penanganan kasus	Desember	Pemprov Papua
372.	Monitoring tindak lanjut penanganan kasus	Desember	Polda Papua
373.	Monitoring tindak lanjut penanganan kasus	Desember	Badan Keuangan, Biro Hukum dan Biro Perlengkapan
374.	Monitoring pelaksanaan seleksi CPNS/CPNSD Sulawesi Tenggara	Desember	Instansi terkait di Sultra

LAMPIRAN III

KEGIATAN MEDIASI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI TERLAPOR
1.	Mediasi pengembalian biaya berobat di RS Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada pasien peserta Jamkesmas.	28 Januari	RS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.	Mediasi permasalahan pertanahan.	13,25 Maret	1. Pemprov Kalimantan Selatan 2. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. 3. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
3.	Mediasi kasus Pasar Gotong Royong Magelang.	9 April	Pemerintah Kota Magelang.
4.	Mediasi di Yogyakarta.	10-12 April	
5.	Mediasi lanjutan kasus Fly over Jombor atas laporan Sudharto dkk.	11 April	Kementerian Pekerjaan Umum.
6.	Mediasi lanjutan kasus SUTET Pathuk Gunungkidul.	12 April	PT PLN (Persero).
7.	Mediasi penyelesaian permasalahan proses pencairan rekening titipan uang sebesar Rp. 30.000.000,- antara Pelapor dengan Bank Jawa Tengah Kantor Cabang Kebumen.	23-26 April	Bank Jawa Tengah Kantor Cabang Kebumen.
8.	Fasilitasi pertemuan antara Pelapor dengan Bank BCA.	29 April	BCA Surakarta.
9.	Mediasi penyelesaian permasalahan pelayanan di RSUD Kota Baru.	2 Mei	RSUD Kota Baru.
10.	Mediasi penyelesaian permasalahan terkait tagihan listrik, sebagaimana temuan dari Tim Penertiban Listrik.	16 Mei	PLN Cabang Banjarmasin.
11.	Mediasi penyelesaian permasalahan pelayanan pada RSUD Ulin.	22 Mei	RSUD Ulin.
12.	Mediasi penyelesaian permasalahan antara Pelapor dengan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin.	30 Mei	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin.
13.	Fasilitasi pertemuan antara LSM madani dengan SMK Muhammadiyah Bantul terkait adanya siswa yang dikeluarkan.	11 Juni	Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantul.
14.	Mediasi di Bengkulu.	13-15 Juni	
15.	Mediasi di Palu.	20-21 Juni	
16.	Mediasi di Jawa Timur.	24-26 Juni	
17.	Mediasi penyelesaian laporan LIPI mengenai Pembangunan hotel tanpa IMB dan dugaan penyerobotan lahan masyarakat Singkawang oleh Pemerintah Kota Singkawang yang digunakan sebagai TPPI (Taman Pasir Panjang Indah)	9 - 10 Agustus	Pemkot Singkawang
18.	Mediasi penyelesaian laporan mengenai dugaan penyerobotan lahan masyarakat Singkawang oleh Pemerintah Kota Singkawang yang digunakan sebagai TPPI (Taman Pasir Panjang Indah)	9 - 10 Agustus	Pemkot Singkawang
19.	Mediasi penyelesaian kasus dugaan penundaan berlakut pemberian surat izin pemeriksaan Bupati Indramayu terkait pemalsuan ijazah	5 - 7 September	1. Bupati Indramayu 2. Kuwu Pareang Girang 3. Kapolres Indramayu 4. Kades Mekarjati
20.	Mediasi penyelesaian laporan antara Pelapor dengan Unit BRI Batang Hari	13 September	BRI Unit Batang Hari Lampung Timur

21.	Mediasi penyelesaian laporan mengenai polusi yang ditimbulkan dari operasional bengkel CS Motor di Jl. Landak Timur, Kec. Pontianak Timur	16 September	Dinas Teknis terkait
22.	Mediasi penyelesaian laporan mengenai sengketa lahan di kompleks Pasar Laino Raha Kab. Muna	22-25 September	1. Kadis Perindustrian 2. Perdagangan Kab. Muna
23.	Melakukan Mediasi ; duduk bersama Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majene, Kepala Sekolah & Pelapor (Aminah)	24 s.d 27 September	Dinas Pendidikan Kabupaten Majene
24.	Fasilitasi pertemuan antara Pemkot Yogyakarta dengan Waldjito (pelapor) terkait penataan pedagang pasar Kranggan Yogyakarta	3 Oktober	Walikota Yogyakarta
25.	Mediasi penyelesaian laporan dari Sdr. Firdaus mengenai pembangunan pagar milik Sdr. Felix yang tidak memiliki IMB dan memasuki tanah milik Pelapor	4 Oktober	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Pontianak, Satpol PP Kota Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Pontianak
26.	Mediasi antara Radjoki Nainggolan dengan Pemerintah Kota Sibolga	4 Oktober	Pemerintah Kota Sibolga
27.	Fasilitasi pertemuan antara PT Bank BRI Unit Pasar Kembang dengan Murya Agus Kusnawan (pelapor) terkait kredit dengan agunan sertifikat yang masih dalam proses balik nama	9 Oktober	PT Bank BRI Unit Pasar Kembang
28.	Mediasi penyelesaian laporan dari Masyarakat Adat Dayak U'ud Danum sekaligus tinjauan lapangan ke lokasi perkebunan sawit di Desa Serawai Ambalau	9-11 Oktober	Instansi terkait
29.	Fasilitasi pertemuan lanjutan antara Bank BPD Jateng KCP Prembun dengan Supriyanto (pelapor)	18 Oktober	Bank BPD Jateng KCP Prembun, Kebumen
30.	Mediasi PT. PLN Unit Pelaksana Konstruksi Mataram	24 Oktober	PT. PLN Unit Pelaksana Konstruksi Mataram
31.	Fasilitasi pertemuan antara SMAN Pakem dengan pelapor	24 Oktober	Kepala Sekolah SMAN Pakem
32.	Mediasi penyelesaian laporan dari Sdr. Nazri Lubis dan Bahder Johan Nasution selaku kuasa hukum Zulkarnaini Datuak Bungsu	24-26 Oktober	Pemda Pasaman Barat, BPN Pasaman Barat, PT. PHP I Pasaman
33.	Fasilitasi pertemuan KPP Pratama Sleman dengan Martha Sasongko (pelapor)	25 Oktober	KPP Pratama Sleman
34.	Mediasi Pertemuan antara Terlapor dengan Dinas Kekuatanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango		Kepala Desa Bulontala Timur
35.	Mediasi antara BPKAD dan FITRA Sumsel	15 November	BPKAD Sumsel
36.	Fasilitasi pertemuan antara PT Bank BRI Muntilan dengan Sujadi (pelapor)	18 November	PT Bank BRI Muntilan
37.	Mediasi penyelesaian laporan a.n Kusnaen	23 November	RSUD Pambalah Batung
38.	Mediasi PT Taspen dan Kantor Ajendam VII/WRB	25 Nopember	PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama, Makassar, Kantor Ajendam VII/WRB
39.	Mediasi penyelesaian penertiban trotoar di Jl. Raya Cipacing Kab. Sumedang	28-29 November	Perwakilan Jabar
40.	Fasilitasi pertemuan antara SMKN Tempel dengan Dyah Emilia (pelapor)	5 Desember	SMKN Tempel
41.	Mediasi laporan pertanahan dengan BPN Provinsi Bali dan BPN Badung.	10 Desember	BPN Provinsi Bali dan BPN Badung
42.	Fasilitasi pertemuan antara UGM dengan Dyah pedagang Summor (pelapor)	17 Desember	Rektor UGM
43.	Mediasi Perwakilan Kalimantan Selatan	23 Desember	PT Angkasa Pura I
44.	Fasilitasi pertemuan antara Pedagang Pasar Simpang Haru, Pemerintah Kota Padang, dan PT. KAI Divre II Sumatera Barat	23 Desember	Pemerintah Kota Padang, PT. KAI Divre II Sumatera Barat

LAMPIRAN IV

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	Monitoring IT	Juli-November	Kantor Perwakilan Ombudsman RI	Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan Publik
2.	Pelatihan Tematik I	16-18 Oktober	Kantor Ombudsman RI	Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang
3.	Pelatihan Legal Penyusunan Perundang-undangan	21-23 Oktober		Dilaksanakan oleh Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang
4.	Pelatihan tentang Ombudsman RI Bagi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Medan, Papua, Sulawesi Utara, Maluku dan Lampung	22-26 Oktober	Hotel Acacia Jakarta	Dilaksanakan oleh Ombudsman RI dan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI
5.	Pelatihan <i>Advance Investigation - Ausaid</i>	22-24 Oktober	Hotel Royal Kuningan Jakarta	Dilaksanakan oleh Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang dan didanai Ausaid
6.	Pelatihan <i>Advance Investigation - Ausaid</i>	29-31 Oktober	Yogyakarta	Dilaksanakan oleh Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang dan didanai Ausaid
7.	Pelatihan <i>Public Relation dan Marketing Communication</i>	1-2 November		Dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Humas untuk meningkatkan keterampilan kehumasan
8.	Pembahasan dan finalisasi draft SOP tentang investigasi sistemik, SOP tentang penegakan integritas	1-4 November	Jawa Barat	Ombudsman RI
9.	Pelatihan Tematik II	6-8 November	Kantor Ombudsman RI	Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang
10.	Uji konsekuensi PPID di lingkungan Ombudsman RI	6-9 November	Tangerang, Banten	Ombudsman RI
11.	Peningkatan kinerja Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kantor Perwakilan Ombudsman	6-9 November	Tangerang, Banten	Ombudsman RI
12.	Pengolahan data dan penyusunan laporan monitoring penerimaan peserta didik baru th. 2013	8-10 November	Bogor	Ombudsman RI
13.	Rakernis Bidang Pencegahan	10-13 November		Bidang Pencegahan Ombudsman RI
14.	Workshop dengan BPN RI	13-16 November	Jakarta	Dilaksanakan oleh Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang, Tim V
15.	Studi referensi, kajian serta perbandingan mengenai <i>dwelling time</i> di pelabuhan di Malaysia	14-18 November	Malaysia	Ombudsman RI
16.	Pembahasan, penyusunan dan pengevaluasian kepatuhan kementerian/lembaga	17-20 November	Bogor	Ombudsman RI
17.	Pelatihan <i>Problem Solving</i>	21-24 November		<ul style="list-style-type: none"> Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> Jajaran Sekretariat Jenderal Ombudsman
18.	Pelatihan Teknik Interview	21-24 November		<ul style="list-style-type: none"> Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang Jajaran Sekretariat Jenderal Ombudsman
19.	Pelatihan <i>Basic Investigation - Ausaid</i>	2-6 Desember	Hotel Santika Surabaya	Ombudsman RI
20.	Pelatihan <i>Basic Investigation - Ausaid</i>	9-14 Desember	Surabaya	Pokja Jarlembang, Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang
21.	Pelatihan bidang pengawasan	16-19 Desember	Hotel Sahira Bogor	Bidang Pengawasan Ombudsman RI
22.	Workshop perkembangan dan pertukaran pengalaman unit pengaduan pelayanan publik (UP3) di tiga daerah pilot project SAJI-UNDP	16-19 Desember	Yogyakarta	Perwakilan Aceh, Perwakilan Sulteng, Perwakilan DIY
23.	Workshop Ajudikasi Khusus	Desember		Ombudsman RI
24.	Pelatihan Bahasa Inggris	Desember 2013-April 2014		Pokja Peningkatan Yanlik, Litbang

LAMPIRAN V

PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi	Keterangan
1.	Seleksi administrasi CPNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	30 September - 2 Oktober	Bogor	PNS Setjen Ombudsman RI, Staf Sekretariat Ombudsman RI
2.	Monitoring penerapan aplikasi administrasi laporan serta pengelolaan keuangan dan BMN di kantor Perwakilan Ombudsman RI di Kepulauan Riau	9-12 Oktober	Batam, Kepri	Biro ASIL, Biro Umum
3.	Monitoring penerapan aplikasi administrasi laporan serta pengelolaan keuangan dan BMN di kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur	9-12 Oktober	Surabaya, Jatim	Biro ASIL, Biro Umum
4.	Monitoring penerapan aplikasi administrasi laporan serta pengelolaan keuangan dan BMN di kantor Perwakilan Ombudsman RI di Kalimantan Selatan	9-12 Oktober	Banjarmasin, Kalsel	Biro ASIL, Biro Umum
5.	Monitoring penerapan aplikasi administrasi laporan serta pengelolaan keuangan dan BMN di kantor Perwakilan Ombudsman RI di Jawa Tengah	9-12 Oktober	Semarang, Jateng	Biro ASIL, Biro Umum
6.	Monitoring penerapan aplikasi administrasi laporan serta pengelolaan keuangan dan BMN di kantor Perwakilan Ombudsman RI di Nanggroe Aceh Darussalam	9-12 Oktober	Banda Aceh, NAD	Biro ASIL, Biro Umum
7.	Penyelesaian TUP Nihil untuk bulan September-Oktober dan rekonsiliasi SAKPA	17-20 Oktober	Bogor	Bagian Keuangan Biro Umum Setjen Ombudsman RI
8.	Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan oleh bendahara pengeluaran pembantu di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali	27-29 Oktober	Denpasar, Bali	Bagian Keuangan Biro Umum Setjen Ombudsman RI
9.	Koordinasi kegiatan penyusunan sasaran kerja PNS pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	28-31 Oktober	Bogor	PNS Setjen Ombudsman RI
10.	Penyusunan sasaran kerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	28-29 Oktober	Bogor	PNS Setjen Ombudsman RI
11.	Penyusunan sasaran kerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	30-31 Oktober	Bogor	PNS Setjen Ombudsman RI
12.	Penyusunan peraturan terkait tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	6-9 November	Bogor	PNS Setjen Ombudsman RI
13.	Pembahasan, penyusunan aktualisasi persediaan (SP2D Akun 53), aktualisasi barang milik	6-9 November	Bogor	PNS Setjen Ombudsman RI, Staf Sekretariat Ombudsman RI

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi	Keterangan
	negara (BMN) dan penginputan di aplikasi			
14.	Penyelesaian administrasi dokumen pengadaan kendaraan sosialisasi Ombudsman RI	12-14 November	Bogor	PNS Setjen Ombudsman RI
15.	Monitoring penerapan aplikasi administrasi laporan serta pengelolaan BMN di kantor Perwakilan Ombudsman RI di Nusa Tenggara Timur	18-21 November	Kupang, NTT	PNS Setjen Ombudsman RI
16.	Penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan aset/barang milik negara di Kantor Perwakilan serta pencatatan persediaan dan konsolidasi SAKPA/BMN untuk akhir periode tahun anggaran 2013	3-6 Desember	Bogor	Biro Umum

LAMPIRAN VI

KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	Sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada DPRD Kota Bandar Lampung.	3 Januari	Lampung	Pada kesempatan tersebut disampaikan mengenai terbentuknya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung. Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	4 Januari	Lampung	Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kerja sama dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada semua sektor, dan membangun partisipasi masyarakat secara aktif dalam mengawasi pelayanan publik di Provinsi Lampung.
3.	Sosialisasi mengenai tugas dan wewenang Ombudsman RI di Radio Sun FM Banjarmasin setiap minggu dengan tema yang berbeda misalnya masalah pelayanan rumah sakit di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, masalah pelayanan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pelayanan Puskesmas, dll.	4,11,18 Januari	Kalimantan Selatan	Pada kesempatan yang sama dilakukan penerimaan laporan melalui telepon interaktif. Kegiatan terselenggara atas kerja sama Perwakilan Ombudsman Prov. Banjarmasin dengan Radio Sun FM.
4.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	5 Januari	Lampung	Pada kesempatan tersebut disampaikan terbentuknya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung dan rencana kerja sama kedepan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
5.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	7 Januari	Sumatera Barat	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
6.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung.	7 Januari	Lampung	Pada kesempatan tersebut disampaikan mengenai terbentuknya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung. Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
7.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	8 Januari	Sumatera Barat	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
8.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung.	9 Januari	Lampung	Pada kesempatan tersebut disampaikan mengenai terbentuknya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung dan rencana kerja sama kedepan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
9.	Undangan Regional Meeting Advokasi Hak atas Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Universitas Negeri Medan.	10 Januari	Sumatera Utara	
10.	Sebagai narasumber pada acara "Burinik Papadaan" di chanel lokal Prima TV. Dialog dengan tema "Antara Kenaikan Tarif dan Peningkatan Pelanggan.	11 Januari	Kalimantan Selatan	
11.	Mengahdiri Penandatanganan Pakta Integritas dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Aceh.	11 Januari	Aceh	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
12.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	12 Februari	Aceh	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
13.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	12 Februari	Aceh	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
14.	Sosialisasi UU Nomor 37 Tahun tentang Ombudsman RI 2008 dan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Bupati Bandung Barat.	15 Januari	Jawa Barat	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
15.	Sosialisasi UU Nomor 37 Tahun tentang Ombudsman RI 2008 dan UU No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik di Kantor Walikota Cimahi.	17 Januari	Jawa Barat	
16.	Pelatihan peningkatan kapasitas Investigator diselenggarakan oleh Kerja sama Ombudsman RI dengan Australia Aid (AusAid)	20-25 Januari	Sumatera Barat	
17.	Focus Discussion Group yang diselenggarakan DPD PKS Banda Aceh dengan tema "Pelayanan Kesehatan Menuai Kritik".	22 Januari	Aceh	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				publik.
18.	Dialog interaktif di RRI Batan.	23 Januari	Kepulauan Riau	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
19.	Penandatanganan MoU Ombudsman RI Perwakilan dengan Komisi Informasi Aceh dalam rangka sosialisasi	31 Januari	Aceh	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
20.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID).	5 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID).
21.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Pelabuhan Panjang- Bandar Lampung.	5 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan pelayanan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Pelabuhan Panjang- Bandar Lampung.
22.	Menghadiri serta menjadi pembicara dalam acara seminar dan lokakarya implementasi UU Pelayanan Publik di Kota Bima, Kab. Bima.	6 Februari	Nusa Tenggara Barat	
23.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Lampung.	6 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan pelayanan PLN Distribusi Lampung.
24.	Sosialisasi, Audiensi dan pertemuan unsur pemerintah di pulau sumbawa, khususnya dengan Walikota Bima.	7 Februari	Nusa Tenggara Barat	
25.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Kantor	7 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Lampung.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Kementerian Agama Wilayah Lampung.			
26.	Memenuhi Undangan dari Pemerintah Kab.Batang perihal Pencanangan zona Integritas.	7-8 Februari	Jawa tengah	
27.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Kantor Imigrasi Bandar Lampung.	7 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Imigrasi Bandar Lampung.
28.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.	7 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.
29.	Sosialisasi,Audiensi dan pertemuan unsur pemerintah di pulau sumbawa,khususnya dengan Walikota Bima.	8 Februari	Nusa Tenggara Barat	
30.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Direktorat Jenderal Bea Cukai Cabang Pelabuhan Panjang- Bandar Lampung.	11 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Cabang Pelabuhan Panjang- Bandar Lampung.
31.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.	11 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
32.	Sebagai narasumber dalam semiloka sosialisasi UU Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh YAPPIKA dan Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPAK).	12 Februari	Sulawesi Tenggara	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
33.	Pembahasan rencana penguatan jaringan dengan Logica2.	12 Februari	Aceh	
34.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman	12 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di PT Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung.			membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pada PT Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung.
35.	Sosialisasi dan penyampaian hasil hasil supervisi di Kab. Bolaang Mongondow Timur.	11-14 Februari	Sulawesi Utara	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
36.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Lampung.	12 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pada PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Lampung
37.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Badan Pengurus mahasiswa Universitas Lampung.	12 Februari	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan di semua sektor.
38.	Rapat Koordinasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor BPN wilayah Sulawesi Utara.	15 Februari	Sulawesi Utara	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
39.	Sosialisasi di jajaran Polres Sungailiat Provinsi Bangka Belitung.	15 Februari	Sumatera Selatan	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
40.	Menghadiri undangan Walikota dalam rangka perayaan ulang tahun PDAM.	18 Februari	Kalimantan Selatan	PDAM merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
41.	Menghadiri sosialisasi strategi dan komunikasi pendidikan budaya anti korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informasi.	18-19 Februari	Jawa Barat	
42.	Dialog interaktif di RRI Pro I Jawa Timur dengan tema pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.	19 Februari	Jawa Timur	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
43.	Workshop Penguatan Peran Pemerintah dan Komunitas Masyarakat untuk mendorong	19-20 Februari	Aceh	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	pengembangan panas bumi yang berkelanjutan di Indonesia.			
44.	Menghadiri uji publik Raperda Reklamasi Pasca Tambang Batubara oleh PUSHAM Universitas Lambung Mangkurat bekerja sama dengan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan.	20 Februari	Kalimantan Selatan	
45.	Sosialisasi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu.	21 Februari	Jawa Tengah	
46.	Workshop tindak lanjut kesepakatan bersama Ombudsman RI dengan Kepolisian Negara RI.	20-22 Februari	Bogor, Jawa Barat	
47.	Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.	22 Februari	Sumatera Selatan	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
48.	Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.	22 Februari	Sumatera Selatan	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik.
49.	Koordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Utara.	25 Februari	Sumatera Utara	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
50.	Sebagai narasumber pada Desiminasi Analisis Hasil Mobile Complain PATTIRO	24-25 Februari	Jawa Tengah	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
51.	Menghadiri kegiatan Kesekretariatan RANHAM I Tahun Anggaran 2013 Kementerian Hukum dan HAM Sumut.	26 Februari	Sumatera Utara	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan public dan merupakan salah satu anggota Panitia Nasional RANHAM.
52.	Menghadiri undangan sebagai tenaga pengajar pada Diklat Teknis Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo.	26 Februari	Sumatera Utara	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
53.	Menghadiri undangan sosialisasi UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan.	27 Februari	Kalimantan Selatan	Ombudsman sebagai anggota panitia RANHAM
54.	Sosialisasi mengenai tugas dan wewenang Ombudsman RI di Radio Sun FM Banjarmasin setiap minggu dengan tema yang berbeda misalnya masalah pelayanan rumah sakit di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, masalah pelayanan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pelayanan Puskesmas, dll.	1,8,15 Maret	Kalimantan Selatan	Pada kesempatan yang sama dilakukan penerimaan laporan melalui telepon interaktif. Kegiatan terselenggara atas kerja sama Perwakilan Ombudsman Provinsi Banjarmasin dengan Radio Sun FM.
55.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	4 Maret	Sumatera Barat	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan DPRD Padang.			kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
56.	Dialog interaktif di SBO TV Surabaya dengan tema mengurai masalah trayek bus AKAP di terminal Tambak Oso Wilangun Surabaya.	4 Maret	Jawa timur	
57.	Dialog interaktif di Metro TV Surabaya dengan tema pengalihan trayek bus AKAP di terminal Tambak Oso Wilangun Surabaya.	4 Maret	Jawa timur	
58.	Sosialisasi mengenai tugas dan wewenang Ombudsman di wilayah Sumatera Utara.	5-6 Maret	Sumatera Utara	Sosialisasi dilakukan melalui penyebaran brosur, leaflet sticker di wilayah Desa Alur Cempedak Kab Langkat.
59.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	8 Maret	Kalimantan Timur	
60.	Talkshow "Mengukur Kinerja Pemerintah Zikir dan Pengawasan Legislatif serta Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah".	9 Maret	Aceh	
61.	Sebagai narasumber pada kegiatan uji publik dalam penyempurnaan Raperda Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pelayanan Publik.	11 Maret	Kalimantan Selatan	Pada saat yang bersamaan juga disampaikan fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman RI serta pembagian brosur.
62.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di PT Askes (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung.	12 Maret	Lampung	Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama untuk membangun terwujudnya koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pada PT Askes (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung.
63.	Menghadiri undangan Radio Idola Semarang dalam acara <i>Journey to Success</i> .	13 Maret	Jawa Tengah	
64.	Sebagai narasumber pada acara Koridor Hukum bersama Lembaga Mawar Saron.	13 Maret	Jawa Tengah	
65.	Kerja sama Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dengan KPU untuk pemantauan proses seleksi calon anggota KPU Kalimantan Selatan.	14 Maret	Kalimantan Selatan	Kegiatan tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan seleksi tertulis, demi menjamin proses keterbukaan dalam penerimaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
66.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang	14 Maret	Lampung	Hasil kegiatan adalah membangun hubungan kerja antara Ombudsman Perwakilan dengan Kepolisian Daerah dengan perannya masing-masing dalam rangka mendorong

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.			peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Lampung. Pada kesempatan tersebut Ombudsman Perwakilan menyerahkan dokumen Kesepakatan Bersama antara Ombudsman RI dengan Kepolisian Negara RI Nomor 2/ORI-MoU/V/2011, Nomor B/12/V/2011 tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat, dan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
67.	Kerja sama Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Sinkronisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.	18 Maret	Kalimantan Selatan	Pada pembahasan tersebut ada beberapa pasal yang menjadi catatan oleh Ombudsman dan diusulkan untuk dihapus yaitu pasal yang mencantumkan adanya Biro Jasa dalam Pelayanan Publik.
68.	Workshop "Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan" Oleh Pemerintahan Aceh dan Logica2.	18-20 Maret	Aceh	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
69.	Sosialisasi UU Nomor 37 Tahun tentang Ombudsman RI 2008 dan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Tenggara.	18-22 Maret	Aceh	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
70.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.	20 Maret	Lampung	Hasil kegiatan adalah membangun hubungan kerja antara Ombudsman Perwakilan dengan Universitas Lampung dengan perannya masing-masing dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung.
71.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan DPRD Sumatera Barat.	21 Maret	Sumatera Barat	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
72.	Sosialisasi pada acara Pencanangan dan Penandatanganan Piagam Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	21 Maret	Lampung	Pada kesempatan tersebut Ombudsman Perwakilan membagi-bagikan brosur, leaflet dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
73.	Sosialisasi untuk tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi pemuda.	19 Maret	Aceh	Pada kesempatan yang sama dibagikan buku saku mengenai Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada para peserta.
74.	Sosialisasi untuk jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan aktivis mahasiswa.	20 Maret	Aceh	Pada kesempatan yang sama dibagikan buku saku mengenai Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada para peserta dan menyerahkan kepada Perpustakaan Daerah.
75.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 di Kab Aceh Tenggara.	21 Maret	Aceh	
76.	Sebagai narasumber dalam rapat pembinaan dan pembentukan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Kalimantan Selatan.	22 Maret	Kalimantan Selatan	Pada acara tersebut disampaikan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman sesuai dengan UU 37 Tahun 2008 dan UU 25 Tahun 2009 serta pembagian brosur.
77.	Menghadiri acara Semarang Trending Topics dengan materi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Radio Idola Semarang.	22 Maret	Jawa Tengah	
78.	Pertemuan lanjutan dengan Pihak AusAid dan Logica terkait rencana kerjasama mengenai pengawasan dan pelatihan di unit pelayanan binaan Logica2.	25 Maret	Aceh	
79.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	25 Maret	Kalimantan Timur	
80.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 di LP Klas II A Bareleng.	25 Maret	Kepulauan Riau	Pada kesempatan tersebut disampaikan keberadaan Perwakilan Ombudsman di Batam Kepulauan Riau.
81.	Kerja sama dengan Media Berau Pos guna menyerap masukan dan permasalahan Pelayanan Publik yang di beritakan Berau pos.	25-26 Maret	Kalimantan Timur	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
82.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kab. Hulu Sungai Selatan.	25-27 Maret	Kalimantan Selatan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
83.	Sebagai narasumber pada pelatihan monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima oleh negara.	26-27 Maret	Jawa Timur	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
84.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 di Kantor PT Jamsostek Cabang Batam I.	25 Maret	Kepulauan Riau	Pada kesempatan tersebut disampaikan keberadaan Perwakilan Ombudsman di Batam Kepulauan Riau.
85.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 di PT Askes Cabang Batam.	25 Maret	Kepulauan Riau	Pada kesempatan tersebut disampaikan keberadaan Perwakilan Ombudsman di Batam Kepulauan Riau.
86.	Sosialisasi UU Nomor 37 Tahun tentang Ombudsman RI 2008 dan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Whaimorock, Distrik Abepura Kota Jayapura.	Maret	Papua	Diperoleh informasi bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat belum menerapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
87.	Pelatihan Penyelesaian secara Adat dan Pelayanan Publik bagi Pemerintahan Gampong.	26 Maret	Aceh	
88.	Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi dalam rangka pembinaan dan persiapan penilaian wilayah bebas korupsi.	27 Maret	Jawa Timur	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
89.	Sosialisasi dalam bentuk diskusi bersama dengan PT PLN Distribusi melalui siaran di TVRI SPK Lampung menyikapi kenaikan Tarif Dasar Listrik.	27 Maret	Lampung	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
90.	Menghadiri undangan hari jadi Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terbaik Samsat Corner Duta Mall Banjarmasin.	28 Maret	Kalimantan Selatan	Pada kesempatan tersebut dilakukan Peluncuran Program Layanan Samsat Online dan Relokasi Samsat Corner Duta Mall Banjarmasin.
91.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kab. Tulung Agung.	28 Maret	Jawa Timur	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
92.	Kerja sama dengan Universitas Sriwijaya dalam rangka sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	28 Maret	Sumatera Selatan	Telah tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam MoU antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan dengan FISIP Universitas Sriwijaya.
93.	Seminar Politik dan kebangsaan "Menuju Pemilu Berdasi (Bersih, damai dan Bersyari'at)" oleh KAMMI Aceh.	30 Maret	Aceh	
94.	Seminar Empat Pilar Kebangsaan dan Pelayanan Publik, kerjasama DPM FISIP Unsyiah dan DPD RI.	30 Maret	Aceh	Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				elayanan publik.
95.	Sosialisasi Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di RSUD Abdoel Moelok provinsi Lampung.	2 April	Lampung	Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
96.	<i>Workshop International Ombudsman Institute World Conference.</i>	2-7 April	Thailand	Kegiatan merupakan kerja sama internasional antara Ombudsman RI dengan Thai Ombudsman.
97.	Sosialisasi dengan tema "Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Kota Surabaya".	2 April	Jawa Timur	Kegiatan diadakan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya.
98.	Sosialisasi mengenai tugas dan wewenang Ombudsman RI di jajaran PGRI Kab. Purbalingga.	3 April	Jawa Tengah	Kegiatan dalam rangka membangun hubungan sinergis dengan jajaran Guru di Purbalingga dengan peserta sekitar 70 orang. Para guru berkomitmen akan mensosialisasikan kepada masyarakat di lingkungannya.
99.	Sosialisasi mengenai tugas dan wewenang Ombudsman RI kepada LSM dan aktivis di Kab. Purbalingga.	3 April	Jawa Tengah	Peserta sosialisasi antara lain LSM Mandat, Lembaga <i>Cinema Lover Community</i> , LSM Mitra Ditaman dll. Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, LSM dan aktivis akan menyampaikan kasus penyimpangan dalam pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.
100.	<i>Talkshow</i> Interaktif di Radio Suara Perwira Purbalingga.	3 April	Jawa Tengah	Masyarakat sangat antusias yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan melalui telepon. Terjalin kerja sama dengan pihak Radio yang memberi kesempatan Ombudsman melakukan <i>talkshow</i> kembali di waktu yang akan datang.
101.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk jajaran BPN Kota Bandar Lampung.	3 April	Lampung	Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
102.	<i>Workshop</i> Persiapan Pelatihan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Di Bogor.	3-5 April	Jawa Barat	Ombudsman merupakan lembaga negara mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
103.	Koordinasi dengan Bupati Tanah Datar.	4 April	Sumatera Barat	Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
104.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor	4 April	Sumatera Barat	Sosialisasi di lakukan dalam

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui Radio Lukan Nantuo Tanah Datar.			bentuk dialog interaktif dengan masyarakat tentang Peran Ombudsman.
105.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI dengan media di Purbalingga.	4 April	Jawa Tengah	Kegiatan tersebut dalam rangka membangun hubungan sinergis dengan media massa di Purbalingga; antara lain Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Satelit dan RSPD Purbalingga.
106.	Koordinasi dengan Walikota Bukittinggi.	5 April	Sumatera Barat	Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
107.	Dialog Interaktif melalui RRI Pro 1 Surabaya dengan tema "Problematika Pemekaran RT dan RW di Wilayah Siwalankerto Surabaya dan Administrasi Kependudukan"	5 April	Jawa Timur	Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
108.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di lingkungan Kampus STIE Banjarnegara.	5 April	Jawa Tengah	Kegiatan sosialisasi dengan peserta semua <i>civitas</i> akademika STIE Taman Siswa Banjarnegara.
109.	<i>Live Talkshow</i> interaktif di radio Rakosa FM Yogyakarta.	5 April	D.I.Yogyakarta	Disampaikan tugas dan wewenang Ombudsman RI, dan mendapat tanggapan dari masyarakat melalui telepon.
110.	Sebagai pembicara pada Diklatpim Tk III angkatan L II (S2) Tahun 2013 dengan peserta para pejabat struktural eselon III dari Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.	6 April	Kalimantan Selatan	Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan kuliah umum dengan tema "Melalui Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Kita Wujudkan Peningkatan Kinerja, Transparansi & Akuntabilitas.
111.	Sosialisasi di lingkungan Kantor Muhammadiyah dan Aisyiah Kuta Utara Badung.	7 April	Bali	Disampaikan tugas dan wewenang Ombudsman RI serta keberadaan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali.
112.	Sebagai pembicara pada Diklatpim Tk. IV Angkatan XVIII tahun 2013 dengan peserta para pejabat struktural eselon IV dari Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.	8 April	Kalimantan Selatan	Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan kuliah umum dengan tema "Meningkatkan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV yang Lebih Kapabel dan Akuntabel Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik".
113.	Sosialisasi fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI di	8-12 April	Bangka Belitung	Ombudsman merupakan lembaga negara yang

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, DPRD Provinsi Bangka Belitung, DPRD Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Univ. Negeri Bangka Belitung.			mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
114.	Diskusi dengan Badan Kesbangpol Prov Kalsel dalam rangka penyusunan program 2013 Pengurus Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Selatan.	10 April	Kalimantan Selatan	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
115.	Menghadiri seminar dengan tema menyongsong perspektif baru perlindungan saksi dan korban dalam revisi KUHAP yang diselenggarakan oleh LPSK	10 April	Jakarta	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
116.	Sosialisasi kepada jajaran Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung.	10 April	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
117.	Dialog Interaktif melalui RRI Pro 1 Surabaya dengan tema "Problematika terkait Pendistribusian Kartu Jamkesmas".	10 April	Jawa Timur	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
118.	Narasumber dialog publik "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Deklarasi MP3 Lampung".	11 April	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
119.	Mengikuti Seminar Keistimewaan DIY dan <i>Louning</i> Media center PWI Yogyakarta di STMIK Akakom Yogyakarta.	11 April	D.I.Yogyakarta	Disampaikan keberadaan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I. Yogyakarta dan sekaligus membangun sinergi dengan institusi lain di Yogyakarta.
120.	Audiensi dengan media cetak dalam rangka menjalin kerja sama untuk memperbaiki pelayanan publik.	12 April	Jawa Tengah	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
121.	Pembahasan rencana kerja sama dengan Logica 2.	12 April	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
122.	Menghadiri <i>launching</i> UP3 program Pembentukan Pengaduan.	15 April	Aceh	Kegiatan dalam rangka kerja sama antara Ombudsman RI dengan <i>Strengthening Access to Justice in Indonesia Project</i> (SAJI Project) UNDP mengenai Pembentukan dan Pengembangan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				Publik di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.
123.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.	15-18 April	Sumatera Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
124.	Sosialisasi dan Klinik Pengaduan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Jambi melalui media cetak, elektronik dan secara langsung kepada LSM, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kota Jambi.	15-19 April	Jambi	Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka persiapan pembentukan Perwakilan Ombudsman di Provinsi Jambi.
125.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui Radio Jejaka Pasaman Barat.	15 April	Sumatera Barat	Sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan masyarakat tentang Peranan Ombudsman melalui Radio Jejaka Pasaman Barat.
126.	Sosialisasi ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I di Bandar Lampung.	16 April	Lampung	
127.	Menghadiri <i>Louching SMS Gateway</i> Dinas Kesehatan Bantul, LOD DIY dan IDEA.	16 April	D.I.Yogyakarta	Kegiatan tersebut sekaligus membangun sinergis dengan stakeholder Ombudsman, Pemerintah, Ormas, LSM dan akademisi dan tokoh masyarakat.
128.	Dialog Publik dengan tema "Meningkatkan Eksistensi Jasa Raharja sebagai Asuransi masyarakat Indonesia".	17 April	Kalimantan Selatan	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
129.	Diskusi terkait Permasalahan Jamkesmas yang diselenggarakan oleh LOD Yogyakarta.	17 April	D.I.Yogyakarta	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I.Yogyakarta menyampaikan pengaduan terkait Jamkesmas yang diterima dari masyarakat.
130.	Sosialisasi di lingkungan Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.	18 April	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
131.	Sosialisasi di lingkungan BPN Aceh.	18 April	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
132.	Sosialisasi di lingkungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.	22 April	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
133.	Sosialisasi di jajaran Inspektorat Pemerintah Kota Bandar Lampung	23 April	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
134.	Seminar dengan tema "Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi".	23 April	Aceh	Kegiatan diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Aceh bekerja sama dengan KPK.
135.	Rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemeringkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Bali.	23 April	Bali	Membahas teknis pelaksanaan supervisi pelayanan guna pemeringkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
136.	Membangun jaringan kerja sama dengan LSM, Perguruan Tinggi, Media dan Talkshow di RRI Purwokerto dan Radio In Kebumen.	23-26 April	Jawa Tengah	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
137.	Pertemuan dengan LSM, Ormas dan Mahasiswa Purwokerto.	23 April	Jawa Tengah	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
138.	Sosialisasi Ombudsman di lingkungan STAIN Purwokerto dengan peserta <i>civitas</i> akademika, Dosen dan karyawan.	24 April	Jawa Tengah	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
139.	<i>Talkshow</i> interaktif di RRI Purwokerto.	24 April	Jawa Tengah	Kegiatan tersebut mendapat respon masyarakat, serta terjalin kerja sama dengan RRI yang memberikan kesempatan Ombudsman mengadakan <i>talkshow</i> lagi.
140.	Diskusi dan <i>sharing</i> dengan media terkait layanan publik di Purwokerto.	24 April	Jawa Tengah	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
141.	Sosialisasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bukit Tinggi.	24-26 April	Sumatera Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
142.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukit Tinggi.	24-26 April	Sumatera Barat	Sosialisasi dihadiri oleh jajaran SKPD, Lembaga Negara Vertikal, BUMN, BUMD dan PT.
143.	Mengadakan pertemuan dengan LBH Pakhis dan Jaringan di Kebumen.	25 April	Jawa Tengah	Peserta menyampaikan keluhan tentang pelayanan publik di Temanggung

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
144.	<i>Talkshow</i> interaktif di Radio RSPD Kebumen.	25 April	Jawa Tengah	Kegiatan tersebut mendapat respon masyarakat ditandai penyampaian tanggapan dan pertanyaan melalui telepon. Selain itu terjalin kerja sama dengan RSPD Kebumen untuk mengadakan <i>talkshow</i> .
145.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui RRI Bukit Tinggi.	25 April	Sumatera Barat	Sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan masyarakat tentang Peranan Ombudsman melalui RRI Bukit Tinggi.
146.	Koordinasi Pencanangan Perluasan Zona Wilayah Bebas Korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	25 April	Jawa Timur	Kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
147.	Narasumber acara “Burinik Papadaan” di Channel Lokal Prima TV. Topik: “Perbaikan Sarana Jalan Kalsel-Kalteng dan Kalsel-Kaltim Serta Pembangunan <i>Flyover</i> ”.	26 April	Kalimantan Selatan	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
148.	Sebagai narasumber diskusi publik yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.	26 April	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
149.	Koordinasi dengan Sekda Kota Padang Panjang.	26 April	Sumatera Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
150.	Sosialisasi di lingkungan Inspektorat Aceh.	26 April	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
151.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh.	29 April	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
152.	Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mengadakan diskusi media dengan tema “Mengurai Problem Pencairan Dana Sertifikasi Guru”. Peserta: media cetak dan elektronik di Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Pengamat Pendidikan serta perwakilan para guru.	30 April	Kalimantan Selatan	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan akan menindaklanjuti dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai permasalahan dana sertifikasi yang tiap tahun mengalami persoalan baik dalam pencairannya

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				maupun pada saat input data.
153.	Sosialisasi di lingkungan Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPMP) Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.	30 April	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
154.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Aliansi Jurnalis Independen Kota Pekanbaru.	30 April	Riau	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
155.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebagai peserta dari tokoh masyarakat, jajaran SKPD, Kepolisian, Samsat, BPN serta para Camat.	April	Sulawesi Utara	Disampaikan hasil supervisi di semua Kantor Camat, Dinas Catatan Sipil, Samsat dan Perijinan, antara lain pengenaan biaya dalam pengurusan SIUP dan TDP dan penyimpangan prosedur pelayanan. Telah ada tindak lanjut instansi penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
156.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dihadiri oleh SKPD, Samsat, BPN dan para Camat.	Mei	Sulawesi Utara	Disampaikan hasil supervisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
157.	Menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambungmangkurat dengan tema "Perlindungan Saksi Strategi Baru Melawan Kejahatan Lingkungan".	1 Mei	Kalimantan Selatan	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
158.	Narasumber Seminar Refleksi Garut 2 abad: "Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara yang Mandiri dan Independen Guna Mewujudkan <i>Good Governance and Clean Governance</i> ".	2 Mei	Jawa Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
159.	Dialog khusus tentang pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Utara di Pasific TV Manado.	2 Mei	Sulawesi Utara	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
160.	Sebagai nara sumber pada kegiatan Diklat PNS Pemkot Surabaya dalam rangka "Diklat Pembinaan PNS di Lingkungan Pemkot. Surabaya".	2 Mei	Jawa Timur	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
161.	Menghadiri penancangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah	2 Mei	Sulawesi Utara	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Provinsi Gorontalo.			mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
162.	Menghadiri penancangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Kabupaten Gorontalo.	3 Mei	Sulawesi Utara	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
163.	Menghadiri penancangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Kabupaten Puhuwato.	Mei	Sulawesi Utara	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
164.	Sebagai narasumber pada diskusi terkait KIK di UGM.	4 Mei	D.I.Yogyakarta	Peserta diskusi memberi apresiasi atas rekomendasi Ombudsman namun masih ada beberapa catatan adanya salah satu rekomendasi yang belum ditaati oleh Ombudsman.
165.	Sosialisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung.	6 Mei	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
166.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.	6 Mei	Riau	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
167.	Mengikuti Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Yogyakarta.	7 Mei	D.I.Yogyakarta	Ombudsman merupakan salah satu anggota Panitia RANHAM Nasional. Disampaikan usulan dan masukan terkait pengelolaan pengaduan masyarakat dan mekanisme penyelesaiannya.
168.	Sosialisasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung di Bandar Lampung.	7 Mei	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
169.	Menghadiri diskusi publik dengan tema "Investasi Cepat Satu Atap" yang diselenggarakan LSM Banua Terang. Kegiatan ini untuk mengkritisi dan memberikan masukan atas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.	7 Mei	Kalimantan Selatan	Kondisi saat ini lambatnya pelayanan perijinan masih banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, instansi teknis Dinas Tata Ruang Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin yang melakukan pengawasan terhadap bangunan masih sangat lemah.
170.	Penyusunan program kerja untuk	7-8 Mei	Aceh	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	bekerja sama dengan Logica 2.			
171.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh.	8 Mei	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
172.	Seminar "Optimalisasi penguatan Fatwa MUI Dalam Pembentukan Produk Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan" bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM.	11 Mei	Kalimantan Selatan	Kegiatan diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
173.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui RRI Padang.	12 Mei	Sumatera Barat	Sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan masyarakat tentang Peranan Ombudsman melalui RRI Padang.
174.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk Pers Mahasiswa se Kota Pekanbaru.	13 Mei	Riau	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
175.	Menghadiri undangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi	13-15 Mei	Daerah Istimewa Yogyakarta	Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
176.	Sebagai nara sumber pada kegiatan seminar SIAP II (<i>Strengthening, Integrity dan Accountability</i>)	14 Mei	Aceh	
177.	Seminar Penilaian kinerja tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.	15 Mei	Jawa Timur	Kegiatan dilaksanakan atas kerja sama dengan IGI
178.	Menjadi nara sumber dalam seminar Mekanisme Pengelolaan Pengaduan di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.	15 Mei	D.I.Yogyakarta	Peserta: jajaran RSUD dan Kantor Pelayanan dan Perijinan di D.I.Yogyakarta dan Jawa Tengah. Peserta diharapkan memahami pentingnya pengelolaan pengaduan sebagai masukan dalam peningkatan pelayanan yang berkualitas.
179.	Sosialisasi dan klinik pengaduan pelayanan publik di Kota Depok.	16 Mei	Jawa Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
180.	Sebagai narasumber pada rapat koordinasi Ormas dan <i>stakeholders</i> yang diselenggarakan Panwaslu.	16 Mei	Jawa Tengah	
181.	Dialog interaktif tentang pelayanan publik di Smart FM.	Mei	Sulawesi Utara	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
182.	Dialog interaktif melalui Radio Rakosa FM Yogyakarta.	17 Mei	D.I.Yogyakarta	Masyarakat menyampaikan perbagi pertanyaan mengenai pelayanan publik.
183.	Dialog Publik TVRI Lampung di Bandar Lampung.	17 Mei	Lampung	
184.	Mengikuti diskusi jaminan kesehatan untuk difabel yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta.	18 Mei	D.I.Yogyakarta	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I.Yogyakarta memberikan saran agar difabel mendapatkan akses jaminan kesehatan baik melalui kartu Jamkesmas, maupun Jamkesda.
185.	Diskusi publik dengan tema menciptakan Pilkada yang damai bekerja sama dengan Radio Idola Semarang	20 Mei	Jawa Tengah	Pada kesempatan tersebut sebagai sarana sosialisasi mengenai tugas dan wewenang Ombudsman RI dan menjalin kerja sama dengan media elektronik
186.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM.	21 Mei	Riau	Sosialisasi dilakukan dalam bentuk <i>Focus Group Discussion</i> .
187.	Sosialisasi dalam acara "Aspirasi Merah Putih Pro 3 FM" melalui RRI Stasiun Kendari.	21 Mei	Sulawesi Tenggara	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
188.	Sebagai nara sumber pada kegiatan konsultasi komunitas infokom.	23 Mei	Aceh	
189.	Rapat koordinasi RANHAM yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan.	21-22 Mei	Kalimantan Selatan	Ombudsman RI merupakan anggota Panitia Nasional RANHAM yang berperan serta dalam upaya mendorong pemenuhan hak masyarakat dari seluruh aspek kehidupan.
190.	Mengikuti <i>Focus Group Discussion</i> dengan tema "Pemetaan Masalah Seputar Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Perkebunan".	21 Mei	Kalimantan Selatan	Kegiatan ini diselenggarakan Pengelola Program Magister Sains Administasi Pembangunan (MSAP) Univ. Lambung Mangkurat bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah RI
191.	Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dalam rangka Jawa Timur menuju wilayah bebas dari korupsi dan penyelerasan dalam sistim integritas nasional.	21 Mei	Jawa Timur	
192.	Seminar <i>soft launching Indonesia Governance Index (IGI)</i> di Bandar Lampung.	22 Mei	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
193.	Peserta acara konsultasi publik, standar pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan tersebut merupakan koordinasi antar lembaga bidang hukum dalam upaya pengawasan pelayanan publik di Jawa Tengah.	22 Mei	Jawa Tengah	Kegiatan ini ditujukan untuk membangun hubungan sinergis dengan Instansi-instansi Pemerintah.
194.	Penyusunan anggaran kegiatan kerja sama dengan Logica 2.	22 Mei	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
195.	Menghadiri acara <i>launching</i> Pembentukan dan Pengembangan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.	22-24 Mei	Aceh	Pelaksanaan kerja sama antara Ombudsman RI dengan <i>Strengthening Access to Justice in Indonesia Project</i> (SAJI Project) UNDP.
196.	Koordinasi dengan Polresta Padang.	23 Mei	Sumatera Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik.
197.	Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik untuk Camat se-Kabupaten Lampung Timur di Sukadana – Lampung Timur.	23 Mei	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini diselenggarakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
198.	Seminar dalam rangka penilaian pelayanan publik dasar bidang pendidikan bekerja sama dengan LSM MCW Malang.	24 Mei	Jawa Timur	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
199.	Narasumber Diskusi Interaktif yang diselenggarakan Pusat Studi dan Strategi Kebijakan (Pussbik) dan MP3 Lampung – USAID – Yappika di Bandar Lampung.	24 Mei	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
200.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang.	24 Mei	Sumatera Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
201.	Menghadiri acara <i>launching</i> Pembentukan dan Pengembangan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.	25-27 Mei	Sulawesi Tengah	Kegiatan kerja sama antara Ombudsman RI dengan <i>Strengthening Access to Justice in Indonesia Project</i> (SAJI Project) UNDP
202.	Sosialisasi dan klinik pengaduan pelayanan publik di Kota Bogor.	26 Mei	Jawa Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
203.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk jajaran BPKP Provinsi Riau	27 Mei	Riau	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
204.	Pertemuan Pengembangan Jaringan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS).	27 Mei	Sumatera Barat	Koordinasi terkait Usaha Advokasi Pemberantasan Korupsi oleh masyarakat sipil.
205.	Audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali terkait pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru yang disinyalir merugikan peserta didik baru, berupa pungutan sekolah yang tidak resmi.	27 Mei	Bali	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
206.	Sebagai peserta pelatihan pengelolaan UP3 di Kabupaten Bener Meriah.	27-31 Mei	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
207.	Rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Utara mengenai Pelayanan Komunikasi Masyarakat.	28 Mei	Sulawesi Utara	Membahas kerja sama penanganan pengaduan masyarakat.
208.	Menerima kunjungan Setjen DPR RI dalam kaitannya dengan laporan pengaduan masyarakat.	29 Mei	Aceh	
209.	Seminar <i>Public Service Fair</i> yang diselenggarakan FH UGM.	30 Mei	D.I.Yogyakarta	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
210.	Pembahasan kerja sama dengan KPK dan BPKP.	30 Mei	Aceh	
211.	Sebagai narasumber pada sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan konsumen (IKM).	29-31 Mei	Bengkulu	Kegiatan diselenggarakan oleh KPPT Pemerintah Provinsi Bengkulu.
212.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Tabanan.	30 Mei	Bali	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tabanan berharap agar Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali dapat memberikan pengawasan yang lebih aktif terkait pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Tabanan.
213.	Finalisasi agenda kegiatan kerja sama dengan Logica2.	31 Mei	Aceh	
214.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar.	31 Mei	Bali	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tabanan berharap agar Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali dapat memberikan pengawasan yang lebih aktif terkait pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
215.	Dialog dengan masyarakat miskin jaringan <i>Urban Poor Consortium</i> (UPC)	2 Juni	Jakarta	
216.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.	Juni	Sulawesi Utara	Disampaikan hasil kegiatan supervisi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
217.	Surabaya Publik Award Tahun 2013 dalam pelayanan publik, bekerja sama dengan Universitas Petra Surabaya.	3 Juni	Jawa Timur	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
218.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan UPT Samsat Pekanbaru.	3 Juni	Riau	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
219.	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang.	3 Juni	Sumatera Barat	Koordinasi terkait pelaksanaan PPDB di Sumbar
220.	Seminar dengan tema "Bangkitlah Indonesia, Bangkitlah Pelayanan Publik"	4 Juni	Sumatera Selatan	Pembahasan seminar difokus pada 3 (tiga) hal: 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan di Sumatera Selatan. 2. Dimensi reflektif dari pelayanan publik, agar pejabat publik dalam memberikan pelayanan berpihak pada kebaikan dan kesejahteraan publik. 3. Berdasar prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai modalitas etika publik.
221.	Sosialisasi Ombudsman RI sekaligus koordinasi dalam Pengawasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	5 Juni	Kalimantan Selatan	Ombudsman menyampaikan fungsi dan tugasnya terkait dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
222.	Mengikuti kegiatan dialog publik dengan tema "Kerusakan lingkungan, pelanggaran hukum lingkungan dan momentum politik 2014".	5 Juni	Sulawesi Tenggara	
223.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Markas Polresta Pekanbaru.	5 Juni	Riau	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
224.	Dialog interaktif dengan tema akuntabilitas PPDB tahun 2013 melalui radio Rakosa FM Yogyakarta.	7 Juni	D.I.Yogyakarta	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
225.	Diskusi Media, dengan tema: "Eksklusivitas Layanan Pelabuhan". Peserta: berbagai pihak, terutama	10 Juni	Kalimantan Selatan	Materi yang dibahas dalam diskusi adalah pelayanan publik di Pelabuhan Trisakti

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	para Pimpinan Redaksi Media Massa, akademisi dan pengamat, untuk mengurai permasalahan keluhan pelayanan publik.			Banjarmasin.
226.	Pembahasan rencana kerja sama dengan Universitas Malikulsaleh Aceh untuk kegiatan sosialisasi Ombudsman RI.	10 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
227.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada LSM yaitu Sentra Program Pemberdayaan dan Kemiteraan Lingkungan (STABIL), Forum Pemberdayaan Masyarakat Untuk Transparansi (FORMAT), dan <i>Transparency International Indonesia</i> (TII).	11 Juni	Kalimantan Timur	Terjalin kerja sama antara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan LSM STABIL, FORMAT, dan TII dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kalimantan Timur.
228.	Audiensi dengan jajaran Pemerintah Kota Semarang.	12 Juni	Jawa Tengah	Terjalin koordinasi dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pelayanan publik di Pemerintah Kota Semarang.
229.	Sosialisasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Provinsi, <i>Civitas Akademika</i> , media cetak dan elektronik dan LSM Kota Medan.	10-13 Juni	Sumatera Utara	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
230.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di jajaran Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh.	11 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
231.	Lokakarya Nasional dengan tema "Mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas".	12 Juni	Jakarta	Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Th. 2009: penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
232.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Aceh.	12 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
233.	Pertemuan dengan Serambi Indonesia dalam rangka sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI	12 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
234.	Menghadiri undangan seminar	13 Juni	Sulawesi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Indeks Demokrasi Indonesia.		Tenggara	
235.	Kunjungan <i>Netherland de Nationale Ombudsman</i> dan SAJI-LEAD Project.	15-22 Juni	Belanda	Kunjungan pertukaran informasi mengenai sistem kerja dan memperkuat hubungan kerja sama antara Ombudsman RI dengan Ombudsman Belanda.
236.	Kunjungan kerja tim Ombudsman RI ke Kantor Ombudsman Belanda dan <i>Van Vollenhoven Institute</i> (Leiden University).	16-21 Juni	Belanda	Kegiatan ini atas undangan Ombudsman Belanda sebagai kunjungan balasan dari Ombudsman Belanda ke Ombudsman RI tahun 2012 dalam rangka menjalin kerja sama.
237.	Dialog interaktif penerimaan siswa dan mahasiswa baru di Radio Smart FM.	17 Juni	Sulawesi Utara	
238.	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sleman acara sarasehan pelayanan pendidikan dan PPDB Expo 2013	17 Juni	D.I.Yogyakarta	Dinas Pendidikan Sleman memberikan apresiasi dan bersedia bekerja sama dan memberikan peraturan teknis penyelenggaraan PPDB di Sleman.
239.	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Kota Yogyakarta acara sarasehan pelayanan pendidikan dan PPDB Expo 2013	17 Juni	D.I.Yogyakarta	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memberikan apresiasi dan bersedia bekerja sama dan memberikan peraturan teknis penyelenggaraan PPDB di Kota Yogyakarta.
240.	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantul acara sarasehan pelayanan pendidikan dan PPDB Expo 2013.	17 Juni	D.I.Yogyakarta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul memberikan apresiasi dan bersedia bekerja sama dan memberikan peraturan teknis penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Bantul.
241.	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kulonprogo acara sarasehan pelayanan pendidikan dan PPDB Expo 2013.	17 Juni	D.I.Yogyakarta	Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo memberikan apresiasi dan bersedia bekerja sama dan memberikan peraturan teknis penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Kulonprogo.
242.	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gunung Kidul acara sarasehan pelayanan pendidikan dan PPDB Expo 2013.	17 Juni	D.I.Yogyakarta	Dinas Pendidikan Gunung Kidul memberikan apresiasi dan bersedia bekerja sama dan memberikan peraturan teknis penyelenggaraan PPDB.
243.	Pemantauan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2013-2014, bekerja sama dengan SBO TV Surabaya.	18 Juni	Jawa Timur	
244.	Koordinasi dengan Bupati Pasaman Barat.	18 Juni	Sumatera Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
245.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Balikpapan Barat	19 Juni	Kalimantan Timur	Pada kesempatan tersebut diberikan penjelasan mengenai prosedur penyampaian laporan apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
246.	Sosialisasi dalam acara "Aspirasi Merah Putih Pro 3 FM" melalui RRI Stasiun Kendari".	19 Juni	Sulawesi Tenggara	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
247.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Pemerintah Kab. Sijunjung.	19-21 Juni	Sumatera Barat	Dihadiri jajaran SKPD, Lembaga Negara Vertikal, BUMN, BUMD, dan PT.
248.	Sosialisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.	20 Juni	Lampung	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
249.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui Radio Lansek Manih.	20 Juni	Sumatera Barat	Sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan masyarakat tentang Peranan Ombudsman RI.
250.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI kepada anggota Aisyiah Denpasar.	20 Juni	Bali	Dijelaskan tugas dan wewenang Ombudsman RI dan keberadaan Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Bali.
251.	Penandatanganan kerja sama dengan FE Universitas Syiahkuala.	21 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
252.	Pembahasan rencana kerja sama dengan Kobar GB dalam pengawasan pelayanan publik.	21 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
253.	Diskusi publik dengan tema "Peran mahasiswa dan pelajar dalam mengawasi pelayanan publik".	22 Juni	Aceh	Kegiatan dilaksanakan berkerjasama dengan Ortom Muhammadiyah (IPM).
254.	Koordinasi dengan Polda Sumatera Barat.	22 Juni	Sumatera Barat	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
255.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	22 Juni	Kalimantan Timur	Diberikan penjelasan prosedur penyampaian

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Balikpapan Kota.			laporan apabila masyarakat mengetahui dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
256.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Balikpapan Tengah.	25 Juni	Kalimantan Timur	Diberikan penjelasan prosedur penyampaian laporan apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
257.	Sebagai narasumber Bimtek Penyusunan Program legislasi Daerah (Prolegda) yang diadakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Kalimantan Selatan, dengan topik "Peran Strategi Balegda dalam Menjaring Kebutuhan Hukum Masyarakat pada Penyusunan Prolegda".	25 Juni	Kalimantan Selatan	Peserta: Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Kalsel, akademisi, serta anggota DPRD. Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan mengenai tugas dan fungsi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
258.	Dialog Interaktif dengan tema "Problematika pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2013-2014 di Kota Surabaya" melalui RRI Pro 1 Surabaya.	25 Juni	Jawa Timur	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
259.	Sosialisasi di lingkungan Universitas Teuku Umar dengan tema "Peran Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik".	25 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
260.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman RI melalui RRI Denpasar.	25 Juni	Bali	Dijelaskan sejarah Ombudsman RI serta penanganan laporan yang sedang ditangani oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali.
261.	Pelaksanaan Sarasehan Pelayanan Pendidikan dan PPDB Expo 2013.	25 Juni	D.I.Yogyakarta	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
262.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Balikpapan Selatan	26 Juni	Kalimantan Timur	Diberikan penjelasan prosedur penyampaian laporan apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
263.	Sosialisasi kepada masyarakat Kampung Tambak Mulyo, Tanjung Mas Semarang mengenai tugas dan wewenang Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.	26 Juni	Jawa Tengah	Pada kesempatan tersebut disediakan formulir untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan pelayanan publik.
264.	Sebagai narasumber pada kegiatan forum <i>consultative meeting jurnalis</i> SMS untuk pemantauan pelayanan publik.	27 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
265.	Sebagai narasumber pada kegiatan bimbingan teknis penyuluhan hukum.	27 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
266.	Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pameran gelar pelayanan publik di Makodam Brawijaya Surabaya pada tanggal 28-30 Juni 2013 Pencanangan Perluasan Zona Wilayah Bebas Korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	27 Juni	Jawa Timur	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
267.	Sosialisasi dengan tema "Ombudsman dan Posko Pengaduan PPDB melalui Radio Swiba FM (RSPD) Kabupaten Karanganyar.	27 Juni	Jawa Tengah	Diadakan dialog interaktif dengan masyarakat antara lain menanyakan peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik.
268.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Balikpapan Utara.	28 Juni	Kalimantan Timur	Diberikan penjelasan prosedur penyampaian laporan apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
269.	Sebagai narasumber kegiatan <i>consultative meeting</i> .	28 Juni	Aceh	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
270.	Gelar Pameran Pelayanan Publik di Makodam Brawijaya Surabaya.	28 Juni	Jawa Timur	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
271.	Sebagai narasumber dalam acara Diskusi Publik dengan tema " Peran Pemuda Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi "	28-29 Juni	Banten	Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
272.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Balikpapan Timur.	29 Juni	Kalimantan Timur	Diberikan penjelasan prosedur penyampaian laporan apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
273.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI kepada masyarakat Banyuwangi yang berada di Bali.	29 Juni	Bali	Dijelaskan sejarah Ombudsman RI serta penanganan laporan yang sedang ditangani Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali.
274.	Sosialisasi tentang tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia	2-3 Juli	Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
275.	Menghadiri undangan dari DPRD	2 Juli	Sumatera Barat	Kegiatan dalam rangka

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Sumatera Barat			mendengar pandangan akhir Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur tahun 2012.
276.	Pelatihan Kepemimpinan untuk 23 Kepala Perwakilan dan Asisten Madya Ombudsman RI, difasilitasi oleh <i>Australian Aid</i>	2 – 5 Juli	Jakarta	Kerjasama Ombudsman RI dengan <i>Commonwealth Ombudsman</i>
277.	Seminar LPSIPA	3 Juli	Aceh	Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan sebagai narasumber
278.	Lokakarya BLUD	4 Juli	Aceh	Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan sebagai narasumber
279.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan tema, “Peran, fungsi dan tugas Ombudsman RI dalam pelayanan Publik”	8 Juli	Kabupaten Gresik, Jawa Timur	Sosialisasi UU No. 37/2008 dan UU No. 25 /2009
280.	Sosialisasi mengenai “Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik”	9 – 10 Juli	Temanggung, Jawa Tengah	Pada kesempatan tersebut Ombudsman sekaligus menjadi saksi pada acara pencaanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemkab. Temanggung
281.	Sosialisasi tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia melalui RRI Pontianak	10 Juli	Kalimantan Barat	
282.	Sosialisasi mengenai keberadaan Ombudsman RI dan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dengan masyarakat di Kota Pandeglang	20 - 21 Juli	Pandeglang, Banten	Pada kesempatan yang sama diadakan klinik pengaduan untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dalam kaitannya dengan pelayanan publik di Kota Pandeglang
283.	Koordinasi dalam rangka kesiapan transportasi Arus Mudik dan Arus Balik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013	22 Juli	Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur	Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Pem. Kota Surabaya
284.	Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.	22 – 26 Juli	Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara	Pada kesempatan yang sama diadakan klinik pengaduan untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dalam kaitannya dengan pelayanan publik di Kota Pandeglang
285.	Sebagai nara sumber pada FGD sosialisasi hasil-hasil DPD RI	23 Juli	Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh, Aceh	
286.	Koordinasi dengan dengan pihak Logica2, Bappeda Aceh dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pembentukan unit pengaduan.	25 Juli	Banda Aceh, Aceh	
287.	Koordinasi dalam rangka inspeksi mendadak pelayanan antrian di Bagian Instalasi Bedah.	25 Juli	RS. Dr. Soetomo Surabaya	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
288.	Dialog Interaktif dengan tema " Persiapan transportasi Arus Mudik dan Arus Balik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013 " melalui RRI Pro 1 Kota Malang.	31 Juli	Malang, Jawa Timur	
289.	Sosialisasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan SMA 6 Kendari.	1 Agustus	Kendari, Sulawesi Tenggara	
290.	Pembahasan tindak lanjut penelitian pelayanan publik di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	15 Agustus	Jakarta	
291.	Sosialisasi UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe.	19 Agustus	Kab. Konawe Sulawesi Tenggara	
292.	Menghadiri undangan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pelayanan kependudukan di Kota Surabaya.	19 Agustus	Pemerintah Kota Surabaya, Jawa timur	
293.	Sosialisasi UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran BKD Kab. Konawe Sulawesi Tenggara.	20 Agustus	Kab. Konawe Sulawesi Tenggara	
294.	Sosialisasi UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di jajaran Sekretariat Daerah Kab. Konawe Sulawesi Tenggara.	21 Agustus	Kab. Konawe Sulawesi Tenggara	
295.	Menghadiri undangan dari Kecamatan Waru Sidoarjo dalam rangka pelayanan administrasi pertanahan.	22 Agustus	Kecamatan Waru Sidoarjo, Jawa Timur	
296.	Kegiatan Forum Bakohumas Kementerian Pekerjaan Umum	23 Agustus	Solo, Jawa Tengah	Kegiatan diselenggarakan oleh Kementerian PU
297.	Koordinasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dalam rangka penyusunan Ranperda Layanan Publik.	23 Agustus	Sumatera Barat	Pada kesempatan tersebut Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menyampaikan materi terkait penyusunan PERDA Layanan Publik.
298.	Rapat dalam rangka rencana kegiatan penelitian dengan Perwakilan Ombudsman RI Yogyakarta dan Jawa Tengah.	24 – 25 Agustus	Yogyakarta,	
299.	Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Anggaran UKP4	26 Agustus	Yogyakarta, Jawa Tengah	Kegiatan diselenggarakan oleh UKP4 Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
300.	Menghadiri undangan dari Kantor Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo dalam rangka pelayanan lingkungan hidup	26 Agustus	Sidoarjo, Jawa Timur	
301.	Menghadiri undangan dari Pemkot. Surabaya dalam rangka pelayanan kepegawaian	27 Agustus	Pemkot Surabaya, Jawa timur	
302.	Seminar Nasional Ombudsman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala	28 Agustus	Banda Aceh, Aceh	
303.	Menghadiri undangan DPRD Sumatera Barat	29 Agustus	Kantor DPRD Sumatera Barat	Kegiatan tersebut merupakan rapat Paripurna

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				tentang Ranperda APBD Perubahan 2013
304.	Koordinasi dengan Sekda Padang Panjang	29 Agustus	Kantor Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat	Memberikan arahan tentang pelayanan publik
305.	Menghadiri Undangan DPRD Sumatera Barat	30 Agustus	Kantor DPRD Sumbar	Rapat Paripurna tentang Ranperda APBD Perubahan 2013
306.	Sebagai narasumber dengan tema "Peran, fungsi dan tugas Ombudsman RI dalam pelayanan Publik"	2 September	Pemkot. Surabaya, Jawa Timur	Kegiatan diselenggarakan oleh BKP&PM Pemkot. Surabaya
307.	Dialog dengan tema "Detak Sumbar" Pelayanan Publik di Padang TV	3 September	Padang, Sumatera Barat	
308.	Sebagai narasumber pada kegiatan diskusi dengan lingkungan dunia usaha	4 September	Banda Aceh, Aceh	
309.	Pertemuan dengan Sekda Pemerintah Aceh, Logica dan SKPA Banda Aceh	4 September	Kantor Sekda Pemerintah Aceh,	
310.	Sebagai narasumber pada orasi ilmiah di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry	4 September	Fakultas Syariah, Banda Aceh	
311.	Sosialisasi Ombudsman dan Diskusi Media dengan tema: "Komitmen Perbaikan Pelayanan Publik"	5 September	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Sebagai narasumber adalah Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Caleg DPRD Kota Banjarmasin yang dan dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi/Kota, Unsur Media Massa, Akademisi, Pengamat Kebijakan Publik, LSM serta Tokoh Masyarakat.
312.	Menghadiri undangan Pengenalan website PECAPP (<i>Public Expenditure Analysis Capacity Strengthening Program</i>)	6 September	Banda Aceh	
313.	Pertemuan dalam rangka pengembangan jaringan kerja dengan Wartawan dan LSM	09 September	Sumatera Barat	Dari kegiatan tersebut terbangun jaringan kerja dalam rangka melaksanakan pengawasan layanan publik
314.	Sosialisasi tentang UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemda Payakumbuh.	10 September	Pemerintah Kota Payakumbuh	.
315.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) pengembangan kurikulum dan modul diklat manajemen pelayanan publik.	11 September	Jakarta	
316.	Koordinasi dengan Walikota Payakumbuh	11 September	Kantor Walikota Payakumbuh	Pada kesempatan tersebut sekaligus mensosialisasikan mengenai tugas dan wewenang Ombudsman dalam kaitannya dengan pelayanan publik.
317.	Sosialisasi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI	11-13 September	Kabupaten Sambas	Pada kesempatan yang sama diadakan gerai pengaduan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				menyampaikan permasalahan mengenai pelayanan publik.
318.	Dialog Interaktif Radio di radio Harau FM Payakumbuh.	12 September	Sumatera Barat	
319.	Dialog Interaktif di Radio Top FM Padang Panjang.	12 September	Padang Panjang, Sumatera Barat	
320.	Dialog Interaktif dengan tema "Upaya mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan prima sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik " di Radio Suara Jombang	12 September	Jombang, Jawa Timur	
321.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan tema, "Peran, fungsi dan tugas Ombudsman RI dalam Pelayanan Publik"	12 September	Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa timur	
322.	Otonomi Awards (<i>The Fajar Institute of Pro Otonomi/FIPO</i>)	13 - 15 September	Makassar, Sulawesi Selatan	
323.	Sebagai narasumber pada kegiatan seminar Pelayanan Publik dengan Tema Kualitas Pelayanan Publik di Otonomi Daerah Oleh BAPPEDA Sumatera Barat.	13 September	Sumatera Barat	
324.	Sebagai narasumber pada Diklat Pelayanan Publik di Lingkungan Disdukcapil Tanah Datar	14 September	Bukittinggi, Sumatera Barat	
325.	Sosialisasi tentang Peranan Ombudsman dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Universitas Bung Hatta	14 September	Univ Bung Hatta Sumatera Barat	
326.	Pertemuan dengan pihak Logica2	15 September	Kantor Logica2, Banda Aceh	
327.	Menghadiri Undangan DPRD Sumatera Barat	16 September	Kantor DPRD Sumbar	Kegiatan Paripurna Ranperda tentang STOTK, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Perlindungan Perempuan dan Anak
328.	Sosialisasi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	17 September	Kabupaten Landak, Kalimantan Barat	Pada kesempatan yang sama diadakan gerai pengaduan bagi masyarakat
329.	Undangan dari Komisi Yudisial RI dalam rangka Pelantikan anggota Perwakilan Komisi Yudisial RI Jawa Timur	17 September	Jawa timur	
330.	Sosialisasi UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk jajaran Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Tenggara	19 September	Sulawesi Tenggara	
331.	Dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badko HMI Cabang Kendari	19 September	Sulawesi Tenggara	
332.	Dialog Interaktif tentang Pengawasan CPNS melalui RRI Padang	19 September	Padang, Sumatera Barat	
333.	Dialog "Berita Ranah Minang" Pelayanan Publik melalui TVRI Sumatera Barat	20 September	Sumatera Barat	
334.	Koordinasi dengan Sekda Tanah	20 September	Pemerintah	Memberikan arahan tentang

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Datar		Kabupaten Tanah Datar	pelayanan publik
335.	Koordinasi dengan Sekda Kota Pesisir Selatan	20 September	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Memberikan arahan tentang pelayanan publik
336.	Dialog Interaktif Radio FM Pesisir Selatan	20 September	Sumatera Barat	
337.	Sebagai narasumber pada kegiatan seminar Pelayanan Publik Aceh Besar ORI dan IMM	22 September	Aceh	
338.	Menghadiri kegiatan Yayasan Anak Bangsa (YAB) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional "Aceh Damai Dalam Keberagaman"	22 September	Banda Aceh	
339.	Sosialisasi tentang pengawasan seleksi CPNS/CPNSD	26 September	Sulawesi Tenggara	Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan kerjasama dengan Puspaham Sulawesi Tenggara dan DPD KNPI Sulawesi Tenggara
340.	Menghadiri seminar kinerja USAID	25 September	Banda Aceh	
341.	Pertemuan dengan UNDP SAJI	26-27 September		
342.	Dialog interaktif terkait pengawasan seleksi CPNS/CPNSD melalui RRI Kendari Sulawesi Tenggara	26 September	Kendari, Sulawesi Tenggara	
343.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan tema, "Peran, fungsi dan tugas Ombudsman RI dalam Pelayanan Publik"	26 September	Jawa Timur	
344.	Sosialisasi Ombudsman dan Diskusi Media dengan tema: "Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam"	26 September	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Pada kesempatan tersebut Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mengadakan diskusi melalui Stasiun Televisi Lokal (Duta TV) dengan tema "Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam"
345.	Sosialisasi pemantauan seleksi CPNS/CPNSD yang bebas pungli dan KKN kerjasama dengan ICW dan Puspaham Sulawesi Tenggara	27 September	Kendari, Sulawesi Tenggara	
346.	Sebagai narasumber Seminar Peranan Ombudsman dalam Peningkatan Pelayanan Publik oleh PERMAHI Padang	27 September	Padang, Sumatera Barat	
347.	Pertemuan dalam rangka menjalin kerja sama dengan Dekan dan Pembantu Dekan IV Fakultas Hukum Univ. Malikussaleh Lhokseumawe	27 September	Lhokseumawe, Aceh	
348.	Sebagai narasumber pada kuliah umum Pelayanan Publik di Universitas Jabal Ghafur	28 September	Sigli, Aceh	
349.	Dialog interaktif terkait seleksi CPNS/CPNSD yang diselenggarakan oleh Sindo TV Kendari	30 September	Kendari, Sulawesi Tenggara	
350.	Melakukan wawancara dan	1 Oktober	Urban TV Batam	Perwakilan Kepulauan Riau

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	sosialisasi tentang pengaduan CPNS			
351.	Kunjungan kerja	1 Oktober	RRI Stasiun Jambi, Kota Jambi	Perwakilan Jambi
352.	Menghadiri peresmian ruang <i>assessment center</i> dan <i>launching</i> program unggulan Biro SDM Polda DIY	1 Oktober	Gedung Ditsabhara Polda DIY	Perwakilan DIY
353.	Sosialisasi penggunaan sistem CAT dalam rekrutmen CPNS Kota Denpasar	1 Oktober	Kantor BKN Regional X Denpasar	Perwakilan Bali
354.	Narasumber pada kegiatanSilaturahmi dan deklarasi mendukung gerakan anti korupsi menuju PEMILU 2009	1 Oktober	Kota Tanjung Balai	Perwakilan Sumatera Utara
355.	Rapat bersama Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan membahas persiapan penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan 2013	1 Oktober	Kantor Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan	Perwakilan Sumatera Selatan
356.	Semiloka Koordinasi dan Supervisi KPK	2 Oktober	Gedung Grahadi Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
357.	Menghadiri seminar hari hak untuk tahu Dishubkomintel dan KIA	2 Oktober	Aula UPTD Seuramoe Informasi Aceh	Perwakilan Aceh
358.	Menghadiri semiloka koordinasi dan supervisi (korsup) pencegahan korupsi di KP3B	2 Oktober	KP3B	Perwakilan Banten
359.	Mengikuti workshop IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY tahun 2013	3 Oktober	Hotel Grage, Suryowijayan, Malioboro Yogyakarta	Perwakilan DIY
360.	Menghadiri undangan peresmian Polres Mesuji dan penandatanganan Pakta Integritas	3 Oktober	Polres Mesuji	Perwakilan Lampung
361.	Pengawasan CPNS	4 Oktober	Kantor BKD Sidoarjo	Perwakilan Jawa Timur
362.	Menghadiri <i>13th Asian Ombudsman Association Conference</i>	5-9 Oktober	Teheran, Iran	Bangjarlem, Anggota Ombudsman
363.	Pertemuan dengan pimpinan DPRD Prov. Papua Barat	6 Oktober	Kantor DPRD Prov. Papua Barat	Perwakilan Papua Barat
364.	Rapat Koordinasi	7 Oktober	PN Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
365.	Pertemuan dengan Wakil Gubernur Prov. Papua Barat	7 Oktober	Kantor Gubernur Prov. Papua Barat	Perwakilan Papua Barat
366.	Sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman RI	7 Oktober	UMG, STIA Bina Taruna	Perwakilan Gorontalo
367.	Menjadi narasumber Dialog Interaktif "Jambi Hari Ini"	7 Oktober	RRI Stasiun Jambi, Kota Jambi	Perwakilan Jambi
368.	Sosialisasi "Bimbingan Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Pemakaian dan Pemanfaatan Tenaga Listrik" oleh PT. PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Kelistrikan	7 Oktober	Emersia Hotel & Resort	Perwakilan Lampung
369.	Menghadiri <i>talkshow</i> dengan topik menyorot pelayanan publik di Aceh	7 Oktober	TVRI Banda Aceh	Perwakilan Aceh
370.	Mendapatkan penjelasan terkait rekrutmen CPNS Kabupaten Jembrana	7 Oktober	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Jembrana	Perwakilan Bali
371.	Sosialisasi dan audiensi kepada	7 Oktober	Pengadilan Tinggi	Perwakilan Banten

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan jajarannya		Banten	
372.	Rapat bersama Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan, LBH Palembang dan BEM Unsri	7 Oktober	Kantor Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan	Perwakilan Sumatera Selatan
373.	Melakukan sosialisasi	7-10 Oktober	Pemkab Lingga dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Lingga	Perwakilan Kepulauan Riau Peserta pejabat di SKPD, Camat dan Lurah
374.	Sosialisasi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan pembukaan Gerai Pengaduan	7-11 Oktober	Kab. Sintang	Perwakilan Kalimantan Barat
375.	Melakukan observasi lapangan unit-unit pelayanan pelayanan publik dalam rangka kepatuhan	7-23 Oktober	SKPD DKI Jakarta	Pelaksana SKPD DKI Jakarta
376.	Pengawasan CPNS	8 Oktober	BKD Mojokerto	Perwakilan Jawa Timur
377.	Pengawasan CPNS	8 Oktober	Kemenkumham Jawa Timur	Perwakilan Jawa Timur
378.	Sosialisasi tentang keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat sekaligus membuka gerai pengaduan masyarakat	8 Oktober	Kantor Pemkab Sintang	Perwakilan Kalimantan Barat
379.	Mengadakan <i>Talkshow</i> tentang peran dan fungsi Ombudsman RI	8 Oktober	RRI	Perwakilan Gorontalo
380.	Kunjungan kerja ke Gubernur Jambi Hasan Basri Agus	8 Oktober	Rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi	Perwakilan Jambi
381.	Diskusi tematik potret kualitas standar pelayanan kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2013 oleh Pusat Studi Strategi dan Kebijakan	8 Oktober	Ruang Restoran Hotel Marcopollo	Perwakilan Lampung
382.	FGD "Transparansi Cegah Korupsi" oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung	8 Oktober	Kantor Sekretariat KIP Provinsi Lampung	Perwakilan Lampung
383.	Sosialisasi Ombudsman RI kepada para Kepala Sekolah Negeri se-Kota Denpasar	8 Oktober	Balaikota Denpasar Bali	Perwakilan Bali
384.	Sosialisasi dan audiensi kepada Kepala DJPBN Serang dan jajarannya	8 Oktober	DJPBN Serang	Perwakilan Banten
385.	Sosialisasi dan audiensi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten dan jajarannya	8 Oktober	Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten	Perwakilan Banten
386.	Narasumber atas undangan Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan	8 Oktober	Hotel Salak Bogor	Ombudsman RI
387.	Menghadiri lokakarya pengintegrasian SPM dalam RPJMD	8-10 Oktober	Hotel Best West OJ Jotel Malang	Perwakilan Jawa Timur
388.	Sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman RI	9 Oktober	NGO Jaringan Pengembang-an Sumber Daya Alam, PWI	Perwakilan Gorontalo
389.	Menghadiri Lokakarya Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan KPK dan BPKP	9 Oktober	Kantor Gubernur Jambi	Perwakilan Jambi

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
390.	Sosialisasi Ombudsman Bali kepada anggota lembaga konsultasi dan bantuan hukum wanita dan keluarga di jalan	9 Oktober	Kantor lembaga konsultasi dan bantuan hukum wanita dan keluarga di jalan Tukad	Perwakilan Bali
391.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan pembagian Brosur dan Leaflet	9-11 Oktober	Wisata Aeroz Kota Medan	Perwakilan Sumatera Utara
392.	Sosialisasi Ombudsman RI	10 Oktober	Radio Pradnya Suara Tuban	Perwakilan Jawa Timur
393.	Sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman RI	10 Oktober	Kemenkumham Prov. Gorontalo	Perwakilan Gorontalo
394.	Mendapatkan penjelasan terkait rekrutmen CPNS dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali dan Inspektur seluruh Bali	10 Oktober	Kantor BPKP Provinsi Bali	Perwakilan Bali
395.	Menghadiri semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh KPK dan Pemerintah Aceh	10 Oktober	Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh	Perwakilan Aceh
396.	Sosialisasi dan audiensi kepada Kapolda Banten dan jajarannya	10 Oktober	Polda Banten	Perwakilan Banten
397.	Sosialisasi dan audiensi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi	10 Oktober	Kejaksaan Tinggi Banten	Perwakilan Banten
398.	Sosialisasi Ombudsman RI	11 Oktober	Kantor Pemkab. Lamongan	Perwakilan Jawa Timur
399.	Sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman RI	11 Oktober	Walikota Gorontalo, DPRD Gorontalo	Perwakilan Gorontalo
400.	Mendapatkan penjelasan terkait rekrutmen CPNS Kabupaten Karangasem	11 Oktober	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Jembrana	Perwakilan Bali
401.	Menyaksikan pelaksanaan verifikasi dokumen asli dan pemberian kartu peserta ujian CPNS	11 Oktober	Kantor Kemenkumham Prov. Bali	Perwakilan Bali
402.	Menghadiri pertemuan dengan pihak BKPP Provinsi Aceh	11 Oktober	Aula BKPP Banda Aceh	Perwakilan Aceh
403.	Menghadiri pertemuan dengan pihak Logica terkait lanjutan pembahasan RAB kerjasama	11 Oktober	Kantor Logica2 Banda Aceh	Perwakilan Aceh
404.	Rapat Koordinasi Pengawasan Proses seleksi Nasional CPNS Tahun 2013	11 Oktober	Kantor Perwakilan BPKP Prov. Jawa Barat	Perwakilan Jawa Barat
405.	Narasumber kegiatan penyusunan dan pembahasan sistem pengaduan <i>whistleblower</i> dan pengelolaan gratifikasi di lingkungan KESDM	11-12 Oktober	Serpong Tangerang, Banten	Ombudsman RI
406.	Sebagai Pemakalah mengenai Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Diberikan pada Acara Pembekalan KKN Universitas Kristen Indonesia Maluku)	12 Oktober	Aula Universitas Kristen Indonesia Maluku	Perwakilan Maluku
407.	Sosialisasi klinik dan konsultasi pelayanan publik	13 Oktober	Citraland, Simpang Lima	Perwakilan Jawa Tengah
408.	Mengikuti Diskusi Tematik Pelayanan Publik	15-19 Oktober	Jakarta	Menyampaikan informasi yang diperoleh kepada Kepala dan Asisten lain di

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
				Perwakilan Ombudsman RI masing-masing
409.	Pengawasan CPNS	16 Oktober	Kemenkumham Jatim	Perwakilan Jawa Timur
410.	<i>Workshop Mystery Shoper</i>	16 Oktober	Hotel Inna Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
411.	Narasumber talkshow Morning Coffee tentang Pelayanan Publik	16 Oktober	RRI Gorontalo	Perwakilan Gorontalo
412.	Sosialisasi dan audiensi kepada Bupati Serang dan jajarannya	16 Oktober	Kabupaten Serang	Perwakilan Banten
413.	Sosialisasi dan Rakor tentang Implementasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan pada seluruh SKPD lingkup Pemkab Belu	16-19 Oktober	Kab. Belu	
414.	Seminar Revitalisasi Pengadilan Tipikor	17 Oktober	KY Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
415.	Rapat Persiapan Tes CPNS	17 Oktober	Pemprov Jawa Timur	Perwakilan Jawa Timur
416.	Diskusi dengan BEM U KBM Unila	17 Oktober	Aula Kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung	Perwakilan Lampung
417.	Menghadiri Undangan Sosialisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU (DKPP)	17 Oktober	Hotel J.W Marriot Medan	Perwakilan Sumatera Utara
418.	Menerima kunjungan Badan Intelijen Nasional Daerah	17 Oktober	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Aceh	Perwakilan Aceh
419.	Sosialisasi dan audiensi kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi dan jajarannya	17 Oktober	Komisi Informasi Provinsi Banten	Perwakilan Banten
420.	Sosialisasi dan audiensi kepada Pemred Radar Banten dan jajarannya	17 Oktober	Harian Radar Banten	Perwakilan Banten
421.	Menghadiri undangan diskusi panel Keterbukaan Informasi Publik	17-18 Oktober	Hotel Aston Tanjungpinang	Perwakilan Kepulauan Riau (Peserta)
422.	Talkshow Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	18 Oktober	Bandung TV	Perwakilan Jawa Barat
423.	Sosialisasi tentang Ombudsman RI pada kuliah umum	19 Oktober	STAI Darul Ulum Kab. Hulu Sungai Selatan	Target mahasiswa STAI yang ada di Kabupaten-kabupaten, Prov. Kalimantan Selatan
424.	Menghadiri undangan sebagai narasumber Dialog Interaktif dengan tema "Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di Kota Metro"	19 Oktober	OR Pemda Kota Metro	
425.	Sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman RI	21 Oktober	Universitas Gorontalo	Perwakilan Gorontalo
426.	Rapat Koordinasi	21 Oktober	LSM Fitra Jatim	Perwakilan Jawa Timur
427.	Pengawasan CPNS	21 Oktober	BKD Jawa Timur	Perwakilan Jawa Timur
428.	Sosialisasi dan audiensi kepada Kakanwil Kementerian Agama Banten dan jajarannya	21 Oktober	Kementerian Agama Banten	Perwakilan Banten
429.	Sosialisasi dan audiensi kepada Wakil Ketua PTUN Serang dan jajarannya	21 Oktober	PTUN Serang	Perwakilan Banten
430.	Rapat Koordinasi dengan	21 Oktober	Kantor	Perwakilan Jawa Barat

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat mengenai prosedur ganti rugi atas kerusakan barang-barang milik Toko Black Cat.		Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat	
431.	Pengawasan CPNS	22 Oktober	Pemprov Jawa Timur	Perwakilan Jawa Timur
432.	Sosialisasi dan audiensi kepada Pemred Banten Pos dan jajarannya	22 Oktober	Harian Banten Pos	Perwakilan Banten
433.	Kunjungan ke Pemda Ogan Ilir dalam rangka persiapan sosialisasi Ombudsman RI	22 Oktober	Pemkab Ogan Ilir	Perwakilan Banten
434.	Narasumber kegiatan bimbingan teknis penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22 Oktober	Bandung, Jawa Barat	Ombudsman RI
435.	Sosialisasi tentang Ombudsman RI dalam rangka membangun jaringan kerja dengan akademisi dan LSM	22-25 Oktober	Surakarta dan Sukoharjo	
436.	Pengawasan CPNS	23 Oktober	SMAN 5 Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
437.	Pertemuan dan silaturahmi dengan Kepala BPKP beserta staf mengenai pencegahan penyimpangan dan pengawasan seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 Kab. Sarolangu, Kab. Batanghari, dan Kota Sungai Penuh	23 Oktober	Kantor BPKP Perwakilan Jambi, Kota Jambi	Kepala Perwakilan dan Asisten
438.	Menghadiri undangan Kementerian Agama Kanwil Prov. Riau	23 Oktober	Hotel Mutiara Merdeka	Menjadi narasumber dengan tema "Peran Ombudsman Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik"
439.	Peserta sosialisasi panduan penyelenggaraan CPNSD dari pelamar umum dan honorer kategori II Daerah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2013 oleh BKD Provinsi Lampung	23 Oktober	GOR Saburai Bandar Lampung	Perwakilan Lampung
440.	Sebagai Peserta aktif Kegiatan Sekretariat RANHAM IV Kementerian Hukum dan HAM SUMUT	23 Oktober	Kementerian Hukum dan HAM SUMUT	Perwakilan Sumatera Utara
441.	Rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan seleksi nasional penerimaan CPNS tahun 2013	23 Oktober		Perwakilan Banten
442.	Sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman RI	24 Oktober	Kantor Pengaduan Pelayanan Publik	Perwakilan Gorontalo
443.	Mengikuti semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi tahun 2013	24 Oktober	Hotel Garuda Yogyakarta	Perwakilan DIY
444.	Talkshow interaktif di Radio Sukoharjo, Jawa Tengah	24 Oktober	Radio RSDP Kab. Sukoharjo	Perwakilan DIY
445.	Menghadiri diskusi publik PECAPP	24 Oktober	3 in 1 Coffee Shop Banda Aceh	Perwakilan Aceh
446.	Sosialisasi Single Window	25 Oktober	Pemkot Surabaya	Perwakilan Jatim
447.	Memberikan paparan tupoksi dan	25 Oktober	Kampus	Perwakilan DIY

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	peran Ombudsman		Universitas Sukoharjo	
448.	Rapat koordinasi pengawasan dan pengamanan seleksi CPNS DIY tahun 2013	25 Oktober	BKD DIY	Perwakilan DIY
449.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Masyarakat	25 Oktober	Kementerian Hukum dan HAM SUMUT	Perwakilan Sumatera Utara
450.	Menerima kunjungan Kepala BPKP Aceh terkait masalah CPNS	25 Oktober	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Aceh	Perwakilan Aceh
451.	Menerima kunjungan Ketua Komisi D DPRK Nagan Raya terkait permasalahan K2 Pemkab Nagan Raya	25 Oktober	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Aceh	Perwakilan Aceh
452.	Sosialisasi dengan LSM dan Tokoh Masyarakat, Radio Barometer Kota Kediri	26 Oktober	Kediri, Jatim	Perwakilan Jawa Timur
453.	Menghadiri seminar ARD (<i>Aceh Resource and Development</i>) dengan tema peran masyarakat dalam gerakan memperkokoh wawasan kebangsaan	26 Oktober	Aula Kesbangpolinmas Prov. Aceh	Perwakilan Aceh
454.	Menghadiri seminar sosialisasi pemantauan pelaksanaan <i>e-procurement</i> di instansi pemerintah	28 Oktober	Aula Pemkot Banda Aceh	Perwakilan Aceh
455.	Menghadiri seminar kebangsaan	28 Oktober	Hotel Regina Banda Aceh	Perwakilan Aceh
456.	Rapat Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dan Dinas Pertamanan dan Pemakan Kota Bandung membahas prosedur dalam seleksi CPNS untuk Kategori II	28 Oktober	Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Perwakilan Jawa Barat
457.	Talkshow Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	28 Oktober	PRFM Bandung	Perwakilan Jawa Barat
458.	Menghadiri undangan Gubernur Kepri untuk acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi bersama KPK dan BPKP	28-29 Oktober	Kantor Provinsi Kepulauan Riau, Dompak	Perwakilan Kepulauan Riau
459.	Pertemuan dengan Tim Komisi II DPR RI	28-30 Oktober	Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara	Ombudsman RI
460.	Mengikuti kegiatan <i>Advance Investigation Training</i>	28 Oktober-1 Nopember	Hotel Aston, Yogyakarta	Perwakilan Kepulauan Riau (Peserta)
461.	Menghadiri seminar Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Diseminasi Program Kinerja-USAID		Hotel Club Bunga Kota Batu, Malang	
462.	Pengawasan CPNS	29 Oktober	Akademi Keselamatan Penerbangan Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
463.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan tema "Forum Silaturahmi Pemangku Pelayanan Publik" di Jawa Tengah	29 Oktober	Hotel Horison Semarang	Perwakilan Jawa Tengah
464.	Mendampingi kunjungan kerja	29-30 Oktober	Jayapura	Ombudsman RI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Komisi II DPR RI ke Provinsi Papua			
465.	Sosialisasi tentang Ombudsman RI	29 Oktober-1 November	Radio RSPD Purbalingga	Perwakilan DIY
466.	Seminar keterbukaan informasi publik	30 Oktober	Hotel Empire Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
467.	Sebagai Pemakalah mengenai Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Manfaatnya Bagi AMAN Di Maluku (Diberikan pada Acara Diskusi Sehari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)	30 Oktober	Baeleo Negeri Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat	Perwakilan Maluku
468.	Mengikuti pemaparan hasil koordinasi supervisi pencegahan korupsi oleh KPK, Ombudsman, BPKP.	30 Oktober	Kantor Gubernur Bali	Perwakilan Bali
469.	Menghadiri Rakor Camat	30 Oktober	Hermes Hotel Banda Aceh	Perwakilan Aceh
470.	Kunjungan ke Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat	31 Oktober	Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
471.	Menghadiri lokakarya seminar koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi	31 Oktober	Pemprov Gorontalo	Perwakilan Gorontalo
472.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan pembagian Brosur dan Leaflet	31 Oktober	Wisata Pagaruyung Kota Medan	Perwakilan Sumatera Utara
473.	Rapat koordinasi dan kerjasama pengawasan pemilu dan launching gerakan satu juta relawan pengawas pemilu oleh Bawaslu Prov. Lampung	31 Oktober	Emerald Ballroom, Emersia Hotel	Perwakilan Lampung
474.	Talkshow interaktif	31 Oktober	Radio RSDP Kab. Banjarnegara	Perwakilan DIY
475.	Audiensi dan sosialisasi ke Pemda Provinsi Bengkulu	31 Oktober	Pemprov Bengkulu	Perwakilan Bengkulu
476.	Menghadiri seminar nasional LAN dengan tema reformasi birokrasi di daerah: kesiapan dan tantangan	31 Oktober	Hotel Hermes Palace Banda Aceh	Perwakilan Aceh
477.	Sosialisasi dan audiensi kepada Komisioner KPU Banten dan jajaran sekretariat	31 Oktober	KPU Banten	Perwakilan Banten
478.	Sosialisasi	31 Oktober-2 November	Mesjid Nurul Hijrah	Perwakilan Sulawesi Barat
479.	Penyusunan buku best practices kantor perwakilan	Agustus-Oktober		Komblik Bangjarlem
480.	Narasumber pada pengembangan kapasitas P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tojo Una Una	Oktober	Hotel Marina Sulteng	Perwakilan Sulawesi Tengah
481.	Narasumber pada peluncuran buku menakar komitmen kerakyatan calon dalam pilkada Donggala dan Pemilu 2014 karya Adha Nadjamuddin	Oktober	Press Room Kantor GKDH Palu	Perwakilan Sulawesi Tengah
482.	Narasumber pada sosialisasi peran Ombudsman dalam pencegahan korupsi	Oktober	Press Room Kantor GKDH Palu	Perwakilan Sulawesi Tengah
483.	Melakukan sosialisasi UU 37 tahun	Oktober-	Kantor Kemenag,	Perwakilan Aceh

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	2008 tentang Ombudsman di Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil dan Aceh Selatan	November	STAIN Gajah Putih dan BKPP Aceh tengah, Kantor Inspektorat dan BKPP Gayo Lues, Kantor Inspektorat dan BKPP Aceh Tenggara, Inspektorat dan BKDSubulussalam, Kantor BKPP Aceh Singkil, Kantor Inspektorat dan BKPP Aceh Selatan	
484.	Rapat teknis penilaian layanan prima 3 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah	Oktober	Kantor Kemenpan_RB Jakarta	Perwakilan Sulawesi Tengah
485.	Narasumber RRI Stasiun Palu untuk program sahabat merah putih	Oktober-Desember	RRI Stasiun Palu	Perwakilan Sulawesi Tengah
486.	Narasumber RRI Stasiun Palu untuk Berita Pelayanan Publik	Oktober-Desember	RRI Stasiun Palu	Perwakilan Sulawesi Tengah
487.	Narasumber Radio Al Chairaat pada Program Kareba Ka Komiu dan Program Non Jayo-jayo	Oktober-Desember	Radio Al Chairaat	Perwakilan Sulawesi Tengah
488.	Narasumber dalam Berita			
489.	Iklan layanan masyarakat	Oktober-Desember		
490.	Penerbitan majalah Suara Ombudsman	Januari-Desember		
491.	Pengawasan CPNS	1 November	BKD Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
492.	Sosialisasi dan audiensi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten dan jajarannya	1 November	BPK RI Prov. Banten	Perwakilan Banten
493.	Pemantauan pelaksanaan ujian tulis seleksi CPNS DIY tahun 2013	3 November	Ruang Wakil Gubernur DIY	Perwakilan DIY
494.	Sosialisasi <i>mystery shopper</i>	4 November	RRI Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
495.	Sosialisasi	4 November	Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
496.	Narasumber sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	4 November	Kab. Pesawaran	Perwakilan Lampung
497.	Sosialisasi di Kab. Ogan Ilir	4 November	Kab. Ogan Ilir	Perwakilan Sumatera Selatan
498.	Sebagai Pemakalah mengenai Memahami Kebijakan Publik : Dalam Kerangka Pikir Dan Tindak Untuk Advokasi Di Maluku (Diberikan pada Acara Pelatihan TIM Advikasi Kebijakan Publik Oleh GMKI Cabang Ambon)	5 November	Kantor GMKI Cabang Ambon, Kota Ambon	Perwakilan Maluku
499.	Sosialisasi	6 November	STIE MM Mamuju	Perwakilan Sulawesi Barat
500.	Mengikuti pelatihan Bendahara Pengeluaran	6-9 November	Jakarta	Peningkatan pengetahuan dalam mengelola keuangan
501.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan	6-9 November	Kabupaten	Perwakilan Sumatera Utara

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	pembagian Brosur dan Leaflet disertai Ceramah di Kecamatan Pahae Jae dan Kecamatan Simangumban		Tapanuli Utara	
502.	Menjadi narasumber pelayanan haji	7 November	Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo	Perwakilan Gorontalo
503.	Sosialisasi dan menjadi narasumber UU No. 37 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009 di Kab. Tanjung Jabung Barat	7 November	Aula PKK Kab. Tanjung Jabung Barat	
504.	Sosialisasi tentang Ombudsman RI	7 November	Kantor Pemkab. Bangkalan	
505.	Sosialisasi	7 November	Terminal Simbuang Mamuju	Perwakilan Sulawesi Barat
506.	Narasumber dalam seminar di UGM	7 November	Kampus UGM Yogyakarta	Perwakilan DIY
507.	Workshop Tindak Lanjut MoU Ombudsman RI dengan POLRI	7 November	Jakarta	Bid. Penyelesaian Laporan & Subbid Peningkatan Kapasitas Yanblik & Litbang
508.	Rakor Ombudsman RI dengan Polri	7 November	Hotel Borobudur, Jakarta	Bidang Pengawasan
509.	Narasumber dalam seminar "Optimalisasi Sistem Pelayanan Publik Bagi Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial"	7 November	Hotel California Bandung	Perwakilan Jawa Barat
510.	Sosialisasi tentang Ombudsman RI	8 November	RKPD Kab. Pamekasan	
511.	Menghadiri undangan DPRD Kota Batam dalam konsultasi Narasumber Pansus Pembahasan Ranperda tentang Pelayanan Publik	8 November	Kantor DPRD Kota Batam	Perwakilan Kepri
512.	Sosialisasi	8 November	Polres Mamuju	Perwakilan Sulawesi Barat
513.	Sosialisasi	11 November	Kantor Gubernur Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
514.	Pengawasan CPNS	12 November	BKD Sidoarjo	Perwakilan Jawa Timur
515.	Sosialisasi	12 November	Wakil Gubernur Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
516.	Audiensi dan sosialisasi ke Polres Rejang Lebong dan Kejari Curup	12 November	Polres Rejang Lebong	Perwakilan Bengkulu
517.	Menghadiri rapat koordinasi pembentukan forum pemantau independen pembangunan zona integritas di lingkungan Ditlantas Polda Kep. Bangka Belitung	12 November	Ditlantas Polda Kep. Bangka Belitung	Perwakilan Kep. Bangka Belitung
518.	Rapat Koordinasi mengenai Workshop Problematika Kasus Pertanahan dan Penyelesaiannya	12 November	Kanwil. BPN Prov. Jawa Barat	Perwakilan Jawa Barat
519.	Melakukan persiapan kegiatan Diskusi Publik dengan tema "Partisipasi Mahasiswa dalam Membangun Kualitas Pelayanan Publik"	12-13 November	Universitas Sebelas Maret	Ombudsman RI dengan Universitas Sebelas Maret
520.	Sosialisasi dan koordinasi kelembagaan	12-15 November	Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Paser	Perwakilan Samarinda

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
521.	Sosialisasi	13 November	Ketua DPRD Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
522.	Audiensi dan sosialisasi	13 November	Pemda Kab. Bengkulu Utara	Perwakilan Bengkulu
523.	Kunjungan ke Kantor KIP Aceh	13 November	Kantor KIP Aceh	Perwakilan Aceh
524.	Kunjungan ke Bawaslu Aceh	13 November	Kantor Bawaslu Aceh	Perwakilan Aceh
525.	Rapat Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional	13 November	Kantor Ombudsman RI	Bidang Pengawasan
526.	Mengikuti Workshop "Problematika Kasus Pertanahan dan Penyelesaiannya"	13-16 November	Bogor, Jawa Barat	
527.	Rapat koordinasi	14 November	BLH Sidoarjo	Perwakilan Jawa Timur
528.	Peresmian kantor dan diskusi "Peradilan yang bersih"	14 November	Kantor Komisi Yudisial Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
529.	Sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman RI	14 November	Sekda Kabupaten Gorontalo Utara	Perwakilan Gorontalo
530.	Menghadiri seminar tema "Penanganan Sengketa Pelayanan Publik" dan penandatanganan <i>Citizen Charter</i> antara Puskesmas Sooko Tuban dengan Warga (multi stakeholder forum/MFS)	14 November	Puskesmas Sooko Kec. Tuban	
531.	Mengikuti workshop RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi DIY	14 November	Hotel Rose In Yogyakarta	Perwakilan DIY
532.	Pembicara talkshow yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Alumni Universitas Gadjah Mada	14 November	Yogyakarta	Ombudsman RI
533.	Menjadi narasumber sosialisasi Ombudsman RI di Tingkat Grassroot	14-15 November	Samarinda	Diselenggarakan oleh Lembaga Gerbang Kalimantan Timur
534.	Sosialisasi dan konsultasi dengan LSM dan masyarakat serta menyebarkan brosur, stiker, dan leaflet	14-16 November	Kab. Asahan	Perwakilan Sumatera Utara
535.	Sosialisasi	14-17 November	Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Kapolda Sulselbar, Pengadilan Tinggi Makassar	Perwakilan Sulawesi Barat
536.	Menghadiri undangan koordinasi tentang pemantau dan tata cara pemantauan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD	15 November	Prov. Kep. Bangka Belitung	Perwakilan Kep. Bangka Belitung
537.	Menghadiri sosialisasi UU Pelayanan Publik di lingkungan Kemenag Aceh Barat	15 November	Gedung serbaguna Lapang, Meulaboh	Perwakilan Aceh
538.	Sosialisasi dan konsultasi dengan LSM dan masyarakat Kab. Asahan, Sumatera Utara, menyebarkan brosur, stiker, dan leaflet Ombudsman RI	15-17 November	Kab. Asahan	Kepala Perwakilan
539.	Menjadi narasumber sosialisasi pada kegiatan Pembinaan Kepegawaian	16 November	Hotel Arowana, Pekanbaru	Kepala Perwakilan
540.	Menghadiri undangan Badan Pertanahan Nasional RI	16 November	Hotel Arowana	Menjadi narasumber pada pembinaan SDM

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
541.	Sosialisasi Ombudsman RI dan klinik pengaduan pelayanan publik	16-17 November	Kota Pandeglang	Ombudsman RI
542.	Sosialisasi dan klinik pengaduan bersama Tim Asisten ORI Pusat di Kabupaten Pandeglang	17 November	Kab. Pandeglang	Perwakilan Banten
543.	Rapat koordinasi	18 November	ITS Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
544.	Menghadiri undangan dari Globali Biennale guna menyambut perhelatan <i>World Cultural Forum 2013</i> di Rumah Topeng dan wayang Setiadharma Kamenuh Gianyar	18 November	Rumah Topeng dan Wayang Setiadharma Kamenuh Gianyar	Perwakilan Bali
545.	Rapat koordinasi	19 November	Polda Jatim	Perwakilan Jawa Timur
546.	Narasumber dalam workshop penguatan komunikasi dan lembaga negara oleh Jawa Pos for Otonomi Daerah	19 November	Mecure Hotel	Perwakilan Sumatera Barat
547.	Keikutsertaan dalam Rapat Forum Lalu Lintas Kota Serang	19 November	Hotel Flamengo	Perwakilan Banten
548.	Talkshow di RRI Palembang	19 November	RRI Palembang	Perwakilan Sumatera Selatan
549.	Menghadiri undangan perihal Pansus Pembahasan Ranperda tentang SOTK	20 November	Kantor DPRD Kota Batam	Perwakilan Kep. Riau
550.	Koordinasi tentang Dukungan Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk pembangunan kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat	20 November	Ketua DPRD Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
551.	Kunjungan kerja	20 November	Redaksi Jambi TV	Perwakilan Jambi
552.	Kunjungan kerja	20 November	Redaksi Jek TV	Perwakilan Jambi
553.	Narasumber Kuliah Umum	20 November	Kampus Fisipol UGM	Perwakilan DIY
554.	Melakukan seminar dan penandatanganan MOU ORI Aceh dan Universitas Malikussaleh	20 November	Aula Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe	Perwakilan Aceh
555.	Menghadiri seminar KPI dengan tema sinergi KPI, media dan elemen masyarakat menciptakan penyiaran sehat	20 November	Hermes Palace Hotel Banda Aceh	Perwakilan Aceh
556.	Menghadiri rapat koordinasi forum gubernur sewilayah Sumatera tahun 2013	20 November	Prov. Kep. Bangka Belitung	Perwakilan Kep. Bangka Belitung
557.	Sosialisasi Ombudsman RI, menjadi narasumber, dan penandatanganan kesepakatan bersama	20-21 November	Kab. Lampung Tengah	seminar Sosialisasi Ombudsman RI dengan tema " Peran Ombudsman RI, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang lebih Baik"
558.	Menghadiri Undangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau	21 November	Universitas Riau	Menjadi Narasumber Kuliah Umum Dosen tamu
559.	Sosialisasi	21 November	Kantor Kanwil BPN Prov. Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
560.	Menghadiri undangan FISIP Universitas Riau	21 November	Universitas Riau	Menjadi narasumber Kuliah Umum/dosen tamu
561.	Narasumber sosialisasi dan penyusunan standar pelayanan serta	21-22 November	Bogor	Ombudsman RI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	penilaian unit pelayanan publik di lingkungan Badan Litbang ESDM			
562.	Memenuhi undangan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat	21-23 November	Lombok	Ombudsman RI
563.	Melakukan dialog tentang Pelayanan Publik Kota Batam	22 November	RRI Kota Batam	Adanya informasi kepada masyarakat sehubungan dengan akan diterbitkannya Perda Pelayanan Publik Kota Batam
564.	Sosialisasi tentang Ombudsman RI	22 November	Gedung Wakil Bupati Kab. Hulu Sungai Selatan	Target ibu-ibu PKK yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita se Prov. Kalimantan Selatan
565.	Narasumber pada kegiatan bimbingan teknis penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22-23 November	Medan, Sumatera Utara	Ombudsman RI
566.	Menghadiri undangan Ombudsman RI dalam rangka Raker Penyelesaian Laporan	23-28 November	Hotel Grand Inna Kuta, Bali	Penyelesaian laporan, evaluasi, dan rencana program th. 2014
567.	Rapat persiapan peluncuran penelitian kepatuhan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota	23-28 November	Bali	Ombudsman RI
568.	Menghadiri undangan diskusi pengawasan pemilu	24 November	Hotel Aston Sol Marina Bangka Tengah	Perwakilan Kep. Bangka Belitung
569.	Seminar mengenai potret keterbukaan informasi di Jawa Barat	25 November	Hotel Topas Galeria Bandung	Perwakilan Jawa Barat
570.	Menghadiri kunjungan ke UP3 Bener Meriah	25-26 November	Pemkab Bener Meriah	Perwakilan Aceh
571.	Mengikuti acara publikasi hasil penelitian LOD DIY dalam perumusan draft naskah akademik dan Raperda Pelayanan Publik DIY	26 November	Kantor LOD DIY	Perwakilan DIY
572.	Narasumber Rapat Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan	26 November	Kantor Bupati Tabanan	Perwakilan Bali
573.	Menghadiri sosialisasi UU Pelayanan Publik di lingkungan Kemenag Aceh Utara	27 November	Aula Wisma Kuta Karang, Lhokseumawe	Perwakilan Aceh
574.	Peresmian Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) di Puskesmas Menteng, Palangkaraya, Talkshow dan sosialisasi UP3 di RRI bersama Ombudsman RI, UNDP, Dinkes Kota Palangkaraya	28 November	Puskesmas Menteng, TVRI, RRI Kalimantan Tengah	Kerjasama ORI, UNDP, Pemkot
575.	Rapat koordinasi	28 November	Walikota Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
576.	Sosialisasi "Operasi Siger Terang" oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung	28 November	Ruang Aula Balai Sakai Sambayan PT. PLN	Perwakilan Lampung
577.	Menghadiri diskusi publik PECAPP Unsyiah	28 November	3 in 1 Coffee Shop Banda Aceh	Perwakilan Aceh
578.	Penandatanganan janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu	28 November	Aula Auditorium Kota Palu	Perwakilan Sulawesi Tengah
579.	Narasumber talkshow interaktif	28-29 November	TVRI Kota	Ombudsman RI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	mengenai membangun partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik melalui pemanfaatan unit pengaduan pelayanan publik (UP3) di Kota Palangkaraya		Palangkaraya	
580.	Sosialisasi Ombudsman RI dalam acara Rapat Kerja pengawasan tahapan pemilu tahun 2014 dengan tema "Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014"	28-29 November	The Bandungan Hotel Kab. Semarang	Perwakilan Jawa Tengah
581.	Menghadiri lokakarya evaluasi dan keberlanjutan program Logica2	28-29 November	Hermes Palace Hotel Banda Aceh	Perwakilan Aceh
582.	Keikutsertaan dalam Rapat Forum Lalu Lintas Kabupaten Serang	29 November	Kantor Dishubkominfo Kab. Serang	Perwakilan Banten
583.	Narasumber pada pengembangan kapasitas P2TP2A dalam penghapusan perdagangan orang di Sulawesi Tengah	November	Gedung Bapelkes Provinsi	Perwakilan Sulawesi Tengah
584.	Narasumber pada Musda Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia	November	Graha Mulia Hotel	Perwakilan Sulawesi Tengah
585.	Pelatihan TOT petugas UP3M tentang pendampingan psikologi	November	Swisbel Hotel Palu	Perwakilan Sulawesi Tengah
586.	Memenuhi undangan Dies Natalis ke 58 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	1-2 Desember	UKM Yogyakarta	Ombudsman RI
587.	<i>Support Program Ausaid</i>	2 Desember	Hotel Santika Surabaya	Perwakilan Sulawesi Tengah
588.	Menghadiri acara diklat dengan tema "Peningkatan Pelayanan Publik di Kab. Lumajang"	2 Desember	Hotel Aston Jember	
589.	Mengikuti pelatihan <i>Basic Investigation Training</i>	2-7 Desember	Hotel Surabaya	Penyelenggara AusAID
590.	Narasumber di RRI Palangkaraya	3 Desember	RRI Palangka Raya	Permintaan dari RRI
591.	Menghadiri undangan Upacara HUT PU	3 Desember	Dinas PU Prov. Kalteng	Undangan Gubernur
592.	Keikutsertaan dalam Rapat Forum Lalu Lintas Kota Serang	3 Desember	Mapolresta Serang	Perwakilan Banten
593.	Rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri	3 Desember	Hotel Alila Jakarta	Bidang Pengawasan Ombudsman RI
594.	Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Pemprov. Sumatera Selatan	3 Desember	Hotel Arista Palembang	Ombudsman RI
595.	Kunjungan media dalam rangka sosialisasi Ombudsman RI	3-5 Desember	Kab. Subang	
596.	Koordinasi ke Inspektorat Sulawesi Barat	4 Desember	Kantor Gubernur Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
597.	Menghadiri undangan strategic meeting SAJI dan Bappenas	4-5 Desember	Bandung	Bidang Pencegahan
598.	Koordinasi ke Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	5 Desember	Kantor Gubernur Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
599.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka Optimalisasi Pelayanan Publik untuk	5 Desember	Kab. Lampung Timur	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Sekretaris Camat dan Kasi Trantib Kab. Lampung Timur			
600.	Koordinasi dengan IRWIL Prov. Papua Barat dalam rangka RAKORNAS Ombudsman RI	5 Desember	Kantor IRWIL Prov. Papua Barat	Perwakilan Papua Barat
601.	Melakukan Raker Penyusunan Standar Pelayanan di KPUD dan KPUP	5 Desember	Kantor ORI Kepri	Adanya komitmen dari KPUD dan KPUP untuk membuat dan melaksanakan standar pelayanan
602.	Narasumber bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur di Pemkab Lampung Timur	5 Desember	Hotel Yestoya Way Jepara Kab. Lampung Timur	Perwakilan Lampung
603.	Mengikuti seminar “Seleksi Pengangkatan Hakim sebagai Rangkaian Proses Reformasi Peradilan”	5 Desember	Fakultas Hukum UGM	Perwakilan DIY
604.	Koordinasi dengan SEKDA Prov. Papua Barat dalam rangka RAKORNAS Ombudsman RI	6 Desember	Kantor SEKDA Prov. Papua Barat	Perwakilan Papua Barat
605.	Koordinasi dengan Kepala Biro Pemerintahan Prov. Papua Barat tentang pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Prov. Papua Barat	6 Desember	Kantor Gubernur Prov. Papua Barat	Perwakilan Papua Barat
606.	Koordinasi ke Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat	6 Desember	Kantor BPS Prov. Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
607.	Koordinasi mengenai tindak lanjut undangan Rapat Kerja Nasional Ombudsman RI	6 Desember	Kantor Gubernur Sulawesi Barat	Perwakilan Sulawesi Barat
608.	Melakukan seminar dengan tema runtuhkan sendi-sendi korupsi di sekitar kita yang merupakan kerjasama ORI Perwakilan Aceh dan Asian Law Student Association Chapter Syiah Kuala	6 Desember	Aula Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh	Perwakilan Aceh
609.	Menerima Undangan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Rapat Koordinasi	6-7 Desember	Kabupaten Tapanuli Selatan	Perwakilan Sumatera Utara
610.	Konfrensi Pers dengan wartawan tentang Launching Hasil Penelitian Tentang Kepatuhan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	7 Desember	Koran Rakyat Maluku, Koran Metro Maluku dll.	Perwakilan Maluku
611.	Narasumber kuliah kemahiran litigasi	7 Desember	Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) Magelang	Perwakilan DIY
612.	Konferensi pers hasil penelitian kepatuhan Pemda terhadap layanan publik	7 Desember	Kantor Graha Pena Padang Ekspres Group	Perwakilan Sumatera Barat
613.	Dialog khusus “Peringatan Hari Anti Korupsi dan Kepatuhan Pemda terhadap Pelayanan Publik”	7 Desember	Kantor Padang TV	Perwakilan Sumatera Barat
614.	Mempublikasikan hasil Survej Kepatuhan Pemerintah Daerah, dan mensosialisasikan eksistensi	7 Desember	Warkop Roemah Kopi, Sulawesi Selatan	Perwakilan Sulawesi Selatan

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
	Ombudsman			
615.	Pemaparan hasil survei kepatuhan UU 25/2009 di Pemerintahan DKI Jakarta dan Pemerintahan Daerah	8 Desember	Jakarta	Ombudsman RI
616.	TV Dialog Interaktif tentang Launching Hasil Penelitian Tentang Kepatuhan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	8 Desember	TVRI Regional Ambon	Perwakilan Maluku
617.	Dialog Publik dan Ekspose hasil survey kepatuhan Pemda dalam pelaksanaan UU No. 25 Thn 2009 Tentang Pelayanan Publik	8 Desember	Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau	Dihadiri 20 wartawan dari media cetak dan elektronik
618.	Melakukan diskusi dengan narasumber, tenaga ahli dan jurnalis terkait penilaian kepatuhan	8 Desember	Bandoeng Resto Batam Centre	Adanya hasil penilaian kepatuhan dan publikasi di media cetak
619.	Melakukan siaran publikasi hasil kepatuhan	8 Desember	Urban TV Batam	Ditayangkan hasil penilaian kepatuhan
620.	Launching hasil survey Penilaian Kepatuhan Pemda dalam Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	8 Desember	Hotel Semesta Semarang	Perwakilan Jawa Tengah
621.	Launching survey kepatuhan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	8 Desember	Cafe Capung Banjarmasin	Perwakilan Kalimantan Selatan
622.	Melakukan dialog publik di TVRI Aceh dengan tema pemaparan hasil survey kepatuhan Pemda terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	8 Desember	TVRI Aceh	Perwakilan Aceh
623.	Konferensi pers hasil survei kepatuhan Pemda terhadap UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	8 Desember	Ruang Pertemuan TVRI Sumatera Selatan	Perwakilan Sumatera Selatan
624.	Launching survey kepatuhan pemerintah daerah terhadap UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	8 Desember	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Prov. Jawa Barat	Perwakilan Jawa Barat
625.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan mengunjungi redaksi media massa di Kota Pematang Siantar	8-10 Desember	Kota Pematang Siantar	Ombudsman RI
626.	Dialog Live hasil survey kepatuhan SKPD terhadap UU 25 Tahun 2009 di Dewata TV	9 Desember	Stasiun Dewata TV	Perwakilan Bali
627.	Seminar	9 Desember	PUSHAM Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
628.	Launching survei uji kepatuhan	9 Desember	SBO TV	Perwakilan Jawa Timur
629.	Talkshow atau blocking time hasil survey kepatuhan Pemda dalam pelaksanaan UU No. 25 Thn 2009 Tentang Pelayanan Publik	9 Desember	Studio Riau Televisi (RTV)	Kepala Perwakilan di dampingi Guru Besar Kebijakan Publik dari Fisip UR sebagai narasumber
630.	Narasumber dalam forum publik TVRI	9 Desember	TVRI Lampung	Perwakilan Lampung
631.	Menghadiri kunjungan lapangan persiapan fasilitasi dan dukungan RB pada Pemda	9 Desember	Kantor Gubernur Aceh	Perwakilan Aceh

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
632.	Sosialisasi Ombudsman RI melalui media massa di Kota Pematang Siantar	9-10 Desember	Kota Pematang Siantar	Perwakilan Sumatera Utara
633.	Pencatatan pernikahan bukti Dispendum Capil Surabaya	10 Desember	SBO TV	Perwakilan Jawa Timur
634.	Menyampaikan hasil survey kepatuhan SKPD terhadap UU 25 Tahun 2009 di RRI Denpasar	10 Desember	Stasiun RRI Denpasar	Perwakilan Bali
635.	Narasumber di TVRI Medan dengan Tema Korupsi melanggar hak-hak rakyat	10 Desember	TVRI Medan	Perwakilan Sumatera Utara
636.	Sosialisasi Ombudsman RI dalam acara lokakarya UNDP dengan tema "Membangun pelayanan publik yang prima dan berkeadilan"	10-11 Desember	Hotel Puri Asri, Hall Amarta	Perwakilan Jawa Tengah
637.	Rapat Koordinasi Nasional Ombudsman RI	10-13 Desember	Jakarta	
638.	Pengembangan jaringan	11 Desember	Kota Samarinda	Perwakilan Samarinda
639.	Narasumber Radio Lite FM dan di TVRI Medan dengan tema Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang Pelayanan Publik	11 Desember	TVRI Medan	Perwakilan Sumatera Utara
640.	Keikutsertaan dalam Rapat Forum Lalu Lintas Kabupaten Serang	11 Desember	Kantor Dishubkominfo Kab. Serang	Perwakilan Banten
641.	Narasumber Sosialisasi/pengarahan dengan tema "Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik" pada acara pencaangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani	11-12 Desember	Pemkab Purworejo	Perwakilan Yogyakarta
642.	Narasumber pencaangan zona Purworejo bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani	12 Desember	Pemkab Purworejo	Perwakilan DIY
643.	Menghadiri undangan sosialisasi pembentukan komunitas ASEAN 2015	12 Desember	Prov. Kep. Bangka Belitung	Perwakilan Kep. Bangka Belitung
644.	Narasumber dalam kegiatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam	13 Desember	Hotel Goodway Batam	Perwakilan Kep. Riau
645.	Melakukan koordinasi dengan Yakkum Bali terkait Perda bagi kaum Disabilitas	13 Desember	Annika Linden Centre, Jl. Bakung No.19, tohpati, Denpasar Timur	Perwakilan Bali
646.	Focus group discussion tentang reformasi birokrasi	13 Desember	Kampus d3 Fisip Unpad	Perwakilan Jawa Barat
647.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	14 Desember	Desa Oelomion, Kecamatan Nekamese, Kab. Kupang	Perwakilan Nusa Tenggara Timur
648.	Menghadiri undangan diskusi publik bernaf FH Unsyiah dengan tema kesejahteraan yang terabaikan	14 Desember	Aula Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh	Perwakilan Aceh
649.	Sosialisasi dan klinik pengaduan bersama Tim Asisten Pusat	15-16 Desember	Kota Serang dan Cilegon	Perwakilan Banten

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
650.	Workshop bidang pencegahan untuk laporan perkembangan dan pertukaran pengalaman pelebagaan unit pengaduan pelayanan publik tiga daerah	15-19 Desember	Inna Garuda Hotel Yogyakarta	Perwakilan Sulawesi Tengah
651.	Rakor penerimaan CPNS Pemkot Surabaya	16 Desember	Pemkot Surabaya	Perwakilan Jawa Timur
652.	Pencatatan pernikahan di KUA Surabaya	16 Desember	SBO TV	Perwakilan Jawa Timur
653.	Ekspose media tentang peran dan fungsi Ombudsman RI	16 Desember	TVRI, RRI, Radar Gorontalo, Gorontalo Post	Ombudsman RI, Perwakilan Gorontalo
654.	Penandatanganan MOU dengan Universitas Riau Kepulauan sekaligus memberikan kuliah umum untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan	16 Desember	Universitas Riau Kepulauan	Perwakilan Kep. Riau
655.	Menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM	16 Desember	Bidakara	Bidang Pengawasan Ombudsman RI
656.	Penandatanganan pakta integritas di lingkungan pemerintah daerah	16 Desember	Aula Pemkab Sigi	Perwakilan Sulawesi Tengah
657.	Sosialisasi Ombudsman RI dengan mengunjungi redaksi media massa di Kota Pekalongan	16-18 Desember	Kota Pekalongan	Ombudsman RI
658.	Pelatihan metode supervisi layanan publik	16-19 Desember	Bogor	Bidang Pengawasan Ombudsman RI
659.	Pencatatan nikah Dispenduk Surabaya	17 Desember	RRI Surabaya	Perwakilan Jatim
660.	Mengikuti rapat forum lalu lintas	17 Desember	Ruang Rapat Kendalisodo Dishub Kominfo Prov. DIY	Perwakilan DIY
661.	Sarasehan "Hak Masyarakat dalam Pelayanan Publik"	17 Desember	Kota Gorontalo	Ombudman RI, Perwakilan Gorontalo
662.	Sosialisasi "Peran Ombudsman RI, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang lebih baik"	17 Desember	Aula Kopiah Emas Setdakab Lampung Tengah	Perwakilan Lampung
663.	Sosialisasi Ombudsman RI melalui kunjungan kerja ke Harian Waspada dan Universitas Dharmawangsa	17 Desember	Kota Medan	Perwakilan Sumatera Utara
664.	Menghadiri undangan Bawaslu terkait peningkatan pengawasan yang optimal pada pemilu DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember	Prov. Kep. Bangka Belitung	Perwakilan Kep. Bangka Belitung
665.	Sosialisasi	17-18 Desember	Universitas Bengkulu	Perwakilan Bengkulu
666.	Sosialisasi Ombudsman RI dalam acara rapat koordinasi evaluasi pelayanan publik di Jawa Tengah	18 Desember	Ruang rapat gedung A Jl. Pahlawan No. 9 Semarang	Perwakilan Jawa Tengah
667.	Narasumber seminar kepemudaan dengan tema "Peran Pemuda dalam Merespon dan Memperluas Proses Kebijakan Publik"	18 Desember	Aula Wisma Malaqbi Mamuju	Perwakilan Sulawesi Barat
668.	Narasumber sosialisasi UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi	18 Desember	Kantor PDAM Tirta Mayang Kota Jambi	Perwakilan Jambi

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
669.	Pembahas seminar indeks kepuasan masyarakat	18 Desember	Kantor Bappeda Prov. Jambi	Perwakilan Jambi
670.	Mengikuti refleksi akhir tahun 2013 LOD DIY	18 Desember	LOD DIY	Perwakilan DIY
671.	Menyampaikan sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan hasil survey kepatuhan SKPD terhadap UU 25 Tahun 2009	18 Desember	Kantor Walikota Denpasar	Perwakilan Bali
672.	Sosialisasi Ombudsman RI melalui kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Utara dan Harian Medan Bisnis	18 Desember	Kota Medan	Perwakilan Sumatera Utara
673.	Menghadiri undangan rapat pembahasan pengintegrasian perizinan dan penetapan standar pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal	18 Desember	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kep. Bangka Belitung, Dinas Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, dan Universitas Bangka Belitung	Perwakilan Kep. Bangka Belitung
674.	Menghadiri malam puncak KPID Banten Award 2013	18 Desember	Prov. Banten	Perwakilan Banten
675.	Penyampaian hasil survey kepatuhan Pemda dalam pelaksanaan UU No. 25 Thn 2009 Tentang Pelayanan Publik	19 Desember	Kantor Gubernur Riau	Perwakilan Riau
676.	Narasumber seminar problema kelistrikan di wilayah Lampung	19 Desember	Auditorium Perpustakaan Unila	Perwakilan Lampung
677.	Mengikuti workshop ekspose kajian <i>community policing</i> DIY	19 Desember	Hotel Garuda Yogyakarta	Perwakilan DIY
678.	Memenuhi undangan Pemprov Sumatera Barat dalam rapat koordinasi peningkatan dan pengasalan pelayanan publik	19 Desember	Kantor Gubernur Sumatera Barat	Perwakilan Sumatera Barat
679.	Menyampaikan sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan hasil survey kepatuhan SKPD terhadap UU 25 Tahun 2009	19 Desember	Kantor Bupati Badung Bali	Perwakilan Bali
680.	Menghadiri undangan rapat pembahasan pengintegrasian perizinan dan penetapan standar pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal	19 Desember	Disnaker Prov. Kep. Bangka Belitung, Dinas Kelautan Prov. Kep. Bangka Belitung, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, dan Universitas Bangka Belitung	Perwakilan Kep. Bangka Belitung
681.	Narasumber dalam workshop penguatan komunikasi lembaga negara oleh Jawa Pos for Otonomi Daerah	19-20 Desember	Mecure Hotel	Perwakilan Sumatera Barat

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	LOKASI	KETERANGAN
682.	Menghadiri sarasehan “Membangun Komunikasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”	20 Desember	Kantor Bea Cukai Gorontalo	
683.	Penyampaian hasil survey kepatuhan Pemda dalam pelaksanaan UU No. 25 Thn 2009 Tentang Pelayanan Publik	20 Desember	Kantor Walikota Pekanbaru	Perwakilan Riau
684.	Talkshow Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	20 Desember	TOP TV	Perwakilan Papua
685.	Diskusi internal dengan mengundang narasumber terkait penanganan kasus Kepolisian yang masih berjalan di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah	20 Desember	Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah	Perwakilan Jawa Tengah
686.	Koordinasi dan memberikan arahan tentang pelayanan publik kepada Sekda Pesisir Selatan	20 Desember	Kantor Bupati Pesisir Selatan	Perwakilan Sumatera Barat
687.	Pelatihan Pengawasan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik oleh Pemda (bekerjasama dengan <i>Indonesia Corruption Watch</i>)	20 Desember	Kantor ORI Bali	Perwakilan Bali
688.	Narasumber dialog interaktif Jambi Hari Ini di RRI Stasiun Jambi	23 Desember	RRI Stasiun Jambi	Perwakilan Jambi
689.	Narasumber dalam dialog publik “kepatuhan Pemda terhadap layanan publik” oleh Permahi Padang	23 Desember	Aula Gubernur Sumatera barat	Perwakilan Sumatera barat
690.	FGD dengan tema “quo vadis pelayanan pertanahan di Sumatera Barat”	24 Desember	Kantor Ombudsman Sumatera Barat	Perwakilan Sumatera barat
691.	Kunjungan ke Inspektorat Aceh	24 Desember	Kantor Inspektorat Aceh	Perwakilan Aceh
692.	Menghadiri diskusi panel pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Lhokseumawe dengan tema peluang dan tantangan AMM dalam pengawasan pelayanan publik dalam perspektif politik Aceh	25 Desember	Aula Komplek Pendidikan Muhammadiyah Kota Lhokseumawe	Perwakilan Aceh
693.	Menyampaikan sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan hasil survay kepatuhan SKPD terhadap UU 25 Tahun 2009	27 Desember	Kantor BKD provinsi Bali	Perwakilan Bali
694.	Menjadi narasumber pada acara dialog publik yang diselenggarakan oleh Yayasan Puspa Indonesia Sumatera Selatan bekerjasama dengan Komite Indonesia untuk Demokrasi dengan tema “Menuju pelayanan publik berkualitas dan pro rakyat”	27 Desember	Hotel Grand Nikita Kota Prabumulih	Perwakilan Sumatera Selatan
695.	Wawancara Eksklusif TVRI dan Dialog Khusus Prime Time	Desember	TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	Perwakilan Sulawesi Tengah

LAMPIRAN VII

KEGIATAN SUPERVISI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI
1.	Supervisi penyelenggaraan pelayanan pada kantor Samsat Padang.	23 Januari	Samsat Padang.
2.	Supervisi penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang.	19 Februari	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang.
3.	Supervisi pelayanan RSUP muhammad Hoesin Palembang.	20 Februari	RSUP muhammad Hoesin Palembang.
4.	Supervisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil Kota Palembang).	21 Februari	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
5.	Supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di Kab. Minahasa Tenggara.	13-16 Maret	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
6.	Supervisi Pelayanan Publik di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.	11-15 Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan di Kantor Satuan Penerbitan SIM Polres Kab Purworejo 2. Pelayanan di RSUD Saras Husada Kab Purworejo 3. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Purworejo 4. Pelayanan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab Purworejo 5. Pelayanan di Kantor UPT, SAMSAT Kab Purworejo 6. Kantor Pertanahan Kab Purworejo 7. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kab Purworejo. 8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan dan Kec Purworejo Kota.
7.	Supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah Kotamobago.	18-22 Maret	Pemerintah Kotamobago.
8.	Supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru.	25-29 Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satlantas Polres Kotabaru 2. SAMSAT Kabupaten Kotabaru 3. LAPAS Klas II B Kotabaru 4. Kantor Pertanahan Kotabaru 5. Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan Terpadu Kabupaten Kotabaru 6. RSUD Kabupaten Kotabaru 7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru
9.	Supervisi penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.	25 Maret	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.
10.	Supervisi terhadap penerapan kebijakan pungutan kepada pasien yang berobat sebesar Rp.98.000,- /pasien sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua.		RSUD Dok II Jayapura.
11.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa	2-5 April	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Imigrasi Kelas I Manado. • Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI
	Tenggara.		<ul style="list-style-type: none"> • KUA Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. • Kantor Samsat Pembantu/ UPDT Minahasa Tenggara. • RSUP Ratatotok, Buyat. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. • Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tomohon. • Pelayanan SIM Polres Minahasa Selatan.
12.	Supervisi instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.	15-20 April	<ul style="list-style-type: none"> • Satlantas Polres Sikka. • UPT Samsat Kabupaten Sikka. • Rumah Tahanan Klas II B Sikka. • Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka. • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sikka. • RSUD TC Hillers. • Kantor Imigrasi Maumere. • Kementerian Agama Kabupaten Sikka.
13.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Jember.	8-12 April	<ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian Resor. • Kantor Samsat. • Lembaga Pemasyarakatan Klas II A. • Kantor Pertanahan. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. • Dinas PU. • Cipta Karya dan Tata Ruang. • RSUD. • Kantor Imigrasi. • Kantor Kementerian Agama.
14.	Supervisi terhadap instansi penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota Tasikmalaya.	22-26 April	<ul style="list-style-type: none"> • Satlantas Polres Kota Tasikmalaya. • Samsat Kota Tasikmalaya. • LAPAS Klas I B Tasikmalaya. • Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. • Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya. • RSUD Kota Tasikmalaya. • Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. • Kantor Imigrasi Klas II Tasikmalaya.
15.	Supervisi terhadap instansi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Karangasem.	29 April-3 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • RSUD Karangasem. • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. • Kantor UPT Samsat Karangasem. • Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem. • Pelabuhan Padang Bai Karangasem. • KUA Kecamatan Karangasem. • Kantor Pertanahan Karangasem. • Satlantas Polres Karangasem. • Imigrasi Kelas I Denpasar.
16.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba.	13-17 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • RSUD Sultan Daeng Raja Kab. Bulukumba. • Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bulukumba.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. • Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bulukumba. • Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba. • KUA Kecamatan Ujungbulu Kabupten Bulukumba. • Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. • Satlantas Polres Kabupaten Bulukumba.
17.	Supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tengah.	13-16 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Satlantas Polres Maluku Tengah. • Kantor Samsat Kabup[atenu Maluku Tengah. • Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah. • RSUD Masohi. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. • Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Maluku Tengah. • Rumah Tahanan Negara Kelas II B Masohi. • KUA Kecamatan Kota Masohi.
18.	Supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di Kota Samarinda.	20-24 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Satlantas Polres. • Kantor Bersama Samsat. • Rumah Tahanan Negara Klas IIA. • Kantor Pertanahan. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. • RSUD Abdul Wahab Sjahranie. • Kantor Imigrasi Klas I. • Kantor Kementerian Agama.
19.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah	21-24 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • RSUD Undata. • Kantor Samsat Palu. • Lembaga Pemasyarakatan Petobo. • Kantor Imigrasi. • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah. • KUA Palu Barat.
20.	Supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di Kota Jayapura	27-31 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Satlantas Polres. • Kantor Bersama Samsat. • Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura. • Kantor Pertanahan. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. • Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap. • RSUD. • Kantor Imigrasi Klas I. • Kantor Kementerian Agama.
21.	Supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan di Kota Pontianak	27-31 Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Pontianak. • Kantor Kementerian Agama KotaPontianak. • Kantor Bersama Samsat. • Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pontianak. • Kantor Pertanahan Kota Pontianak. • Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. • RSUD. • Kantor Imigrasi Kelas I. • Kantor Kementerian Agama KotaPontianak.
22.	Supervisi terhadap instansi penyelenggara pelayanan di Kota Kendari	17-19 Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. • Kantor Imigrasi Kelas I Kendari. • Kantor Samsat Kota Kendari.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI
			<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari. • KUA Kecamatan Poasia Kendari. • Badan Penyelenggaraan Perizinan Kota Kendari. • Kantor Pertanahan Kota Kendari. • Unit Pembuatan SIM Satlantas Polresta Kendari. • RSUD Abunawas Kendari.
23.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Natuna	24-28 Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian Resor Natuna. • KUA Kecamatan Ranai. • Kantor samsat Kabupaten Natuna. • Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. • Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Natuna. • Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna. • RSUD Kabupaten Natuna. • Kantor Imigrasi Kelas II Ranai. • Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur.
24.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Semarang	15-19 Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan SIM Satlantas Polresta Semarang • SAMSAT Pedurungan, Semarang • Kantor Pertanahan Kota Semarang • Kantor Imigrasi Kelas I Semarang • LAPAS Kelas I Semarang • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang • RSUD Kota Semarang • KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
25.	Penegakan Integritas Kantor Perwakilan	15-19 Juli	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah
26.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pekanbaru	12-16 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan SIM Satlantas Polresta Pekanbaru • SAMSAT Pekanbaru • Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru • Kantor Imigrasi Pekanbaru • LAPAS Pekanbaru • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekanbaru • RSUD Kota Pekanbaru • KUA Kecamatan Kota Pekanbaru
27.	Penegakan Integritas Kantor Perwakilan	12-16 Agustus	Kantor Perwakilan Ombudsman RIP Provinsi Riau
28.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Padang	19-23 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • RSUD dr. Rasidin Kota Padang • Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang • UPT Samsat Kota Padang • Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang • Kantor Imigrasi Kelas I Padang • Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur • Kantor Pertanahan Kota Padang • Satuan Lalu Lintas Polresta Padang (khusus pelayanan SIM)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI
29.	Penegakan Integritas Kantor Perwakilan	19-23 Agustus	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat
30.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Mataram	19-23 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan SIM Satlantas Polresta Mataram • SAMSAT Mataram • Kantor Pertanahan Kota Mataram • Kantor Imigrasi Mataram • LAPAS Mataram • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram • RSUD Kota Mataram • KUA Kecamatan Kota Mataram
31.	Penegakan Integritas Kantor Perwakilan	19-23 Agustus	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat
32.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Banda Aceh	26-30 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan SIM Satlantas Polresta Banda Aceh • SAMSAT Kota Banda Aceh • Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh • Kantor Imigrasi Banda Aceh • LAPAS Banda Aceh • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banda Aceh • RSUD Kota Banda Aceh • KUA Kecamatan Kota Banda Aceh
33.	Penegakan Integritas Kantor Perwakilan	26-30 Agustus	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh
34.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Palu	26-30 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan SIM Satlantas Polresta Palu • SAMSAT Kota Palu • Kantor Pertanahan Kota Palu • Kantor Imigrasi • LAPAS • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu • RSUD Kota Palu • KUA Kecamatan Kota Palu
35.	Penegakan Integritas Kantor Perwakilan	26-30 Agustus	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah
36.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Palembang	2-6 September	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan SIM Satlantas Polresta Palembang • SAMSAT Kota Palembang • Kantor Pertanahan Kota Palembang • Kantor Imigrasi Palembang • LAPAS Palembang • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang • RSUD Kota Palembang • KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
37.	Penegakan Integritas Kantor Perwakilan	2-6 September	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan
38.	Supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lampung	2-6 September	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan SIM Satlantas Polresta Bandar Lampung • SAMSAT Kota Bandar Lampung • Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung • Kantor Imigrasi Bandar Lampung

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI
			<ul style="list-style-type: none"> LAPAS Bandar Lampung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandar Lampung RSUD Kota Bandar Lampung KUA Kecamatan Kota Bandar Lampung
39.	Penegakan Integritas Kantor Perwakilan	2-6 September	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung
40.	Rapat persiapan survai kepatuhan Pemda terhadap UU 25/2009	2 Oktober	Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan
41.	Survey kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	4 Oktober	Pemerintahan Kota Denpasar dan Pemerintahan Provinsi Bali
42.	Pengawasan tes rekrutmen CPNS Kota Denpasar	5 Oktober	Kantor BKN Regional X Denpasar
43.	Rapat pemantapan rencana survai kepatuhan Pemda terhadap UU 25/2009	7 Oktober	Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan
44.	Supervisi pada 16 Kantor Pelayanan Publik di Kota Ambon	7 - 12 Oktober	Kantor Pelayanan Publik di Kota Ambon
45.	Survei kepatuhan Pemda terhadap UU 25/2009	10-20 Oktober	Dinas/Kantor di Prov. Sumatera Selatan
46.	Supervisi pada 11 Kantor Pelayanan Publik pada Tingkat Provinsi Maluku	13 - 18 Oktober	Kantor Pelayanan Publik pada Tingkat Provinsi Maluku
47.	Pengawasan Penerimaan CPNS thn 2013 di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah <ol style="list-style-type: none"> Membentuk posko pengaduan penerimaan CPNS Melakukan koordinasi dengan BKD Kota Semarang dan BKD Provinsi Jawa Tengah 	23 Oktober	Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
48.	Pengawasan CPNS	24 Oktober	PT Jasindo Tiga Perkasa
49.	Supervisi pelayanan publik di Pasaman Barat	24-26 Oktober	Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat dsb.
50.	Melakukan supervisi ke kantor BKD, Dukcapil, RSUD dan Terminal Kabupaten Ogan Ilir	25 Oktober	BKD, Dukcapil, RSUD dan Terminal Kabupaten Ogan Ilir
51.	Observasi kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	28-30 Oktober	Pemprov Sumatera Selatan
52.	Survey kepatuhan layanan publik	Oktober	SKPD Prov. Sultra dan Pemkot Kendari
53.	Survey Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 bekerjasama dengan akademisi UNILA	Oktober	Kantor SKPD di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung
54.	Pelaksanaan survey kepatuhan di pemerintah	Oktober-November	Pemda Sulawesi Tengah
55.	Pengawasan Pelaksanaan Ujian CPNS Tahun 2013 dari jalur	3 November	Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	INSTANSI
	honorer kategori 2 Membuatr posko pengaduan di lokasi pelaksanaan ujian		
56.	Pengawasan Pelaksanaan Ujian CPNS Tahun 2013 di Kab. Kudus dan Kab. Pati a. Bertemu dengan panitia Penerimaan CPNS b. Berkoordinasi proses seleksi dan ujian CPNS	4 November	BKD Kab. Kudus dan BKD Kab. Pati
57.	Pengawasan Pelaksanaan Ujian CPNS Tahun 2013 di Kab. Kendal dan Kota Pekalongan a. Bertemu dengan panitia Penerimaan CPNS b. Berkoordinasi proses seleksi dan ujian CPNS	4 November	BKD Kab.Kendal dan BKD Kota Pekalongan
58.	Survei tambahan terhadap sejumlah SKPD di Pemkot Palembang dan Pemprov Sumatera Selatan	27-28 November	Pemkot Palembang dan Pemprov Sumatera Selatan
59.	Survey kepatuhan layanan publik	November	SKPD Prov. Sultra dan Pemkot Kendari
60.	Survey Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 bekerjasama dengan akademisi UNILA	November	Kantor SKPD di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung
61.	Ekspose penelitian kepatuhan pemerintah daerah	8 Desember	Dilaksanakan oleh Kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung
62.	Menyampaikan hasil survey kepatuhan SKPD terhadap UU 25 Tahun 2009	11 Desember	Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
63.	Survey Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 bekerjasama dengan akademisi UNILA	Desember	Kantor SKPD di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung